



**VOKASI**  
KUAT, MENGUATKAN  
INDONESIA



# LAPORAN KINERJA 2023



## **Direktorat Kursus dan Pelatihan**

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

# Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Kursus dan Pelatihan berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan tahun 2023. Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tahun 2023 menetapkan tiga sasaran dan empat indikator kinerja. Secara umum Direktorat Kursus dan Pelatihan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja ke depannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya Laporan Kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan Tahun 2023.

Jakarta, 29 Januari 2024  
Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan

Dr. Wartanto



# Daftar Isi



5

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Ikhtisar Eksekutif .....	1

## BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum .....	6
Tugas, Fungsi .....	7
Dasar Hukum .....	8
Isu & Peran Strategis .....	9



11

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Visi, Misi, Tujuan .....	12
Rencana Kinerja .....	13
Program Prioritas Nasional .....	17



19

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja .....	20
Realisasi Anggaran .....	136
Inovasi .....	140
Penghargaan .....	145
Crosscutting/Collaborative .....	147



156

## BAB IV PENUTUP

Kesimpulan .....	158
Upaya yang dilakukan .....	159

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian tiga Sasaran Kegiatan (SK) dengan empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kerjanya adalah sebagai berikut.

## SASARAN KEGIATAN 1

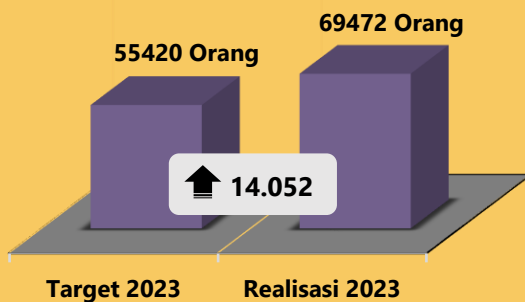
Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja



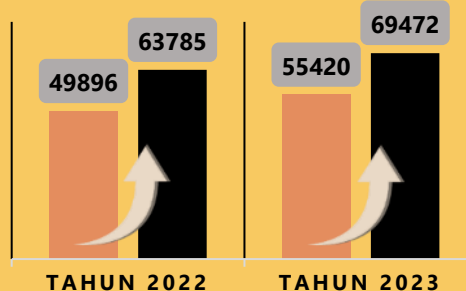
### IKK 1.1

Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha

% Capaian : 125,35%



#### Perbandingan Realisasi



Presentase Kenaikan Realisasi dari 2022 ke 2023:

**11,41%**

Target  
Realisasi

## SASARAN KEGIATAN 2

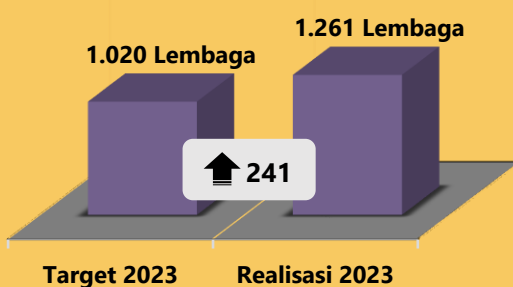
Meningkatnya lembaga kursus & pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja



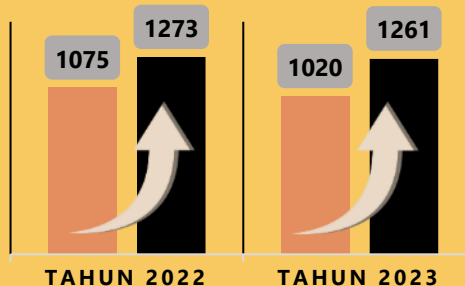
### IKK 2.1

Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

% Capaian : 123,63%



#### Perbandingan Realisasi



Presentase Penurunan Realisasi dari 2022 ke 2023

**1,11%**

Target  
Realisasi

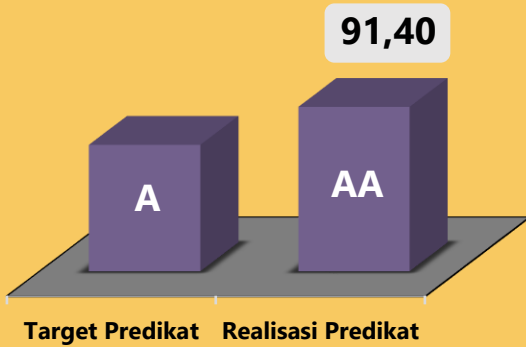
### SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan



#### IKK 3.1

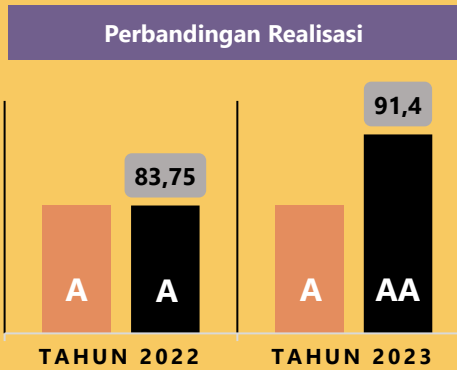
Predikat SAKIP  
Direktorat Kursus  
dan Pelatihan



Peningkatan nilai pada SAKIP dari 2022 ke 2023 sebesar:

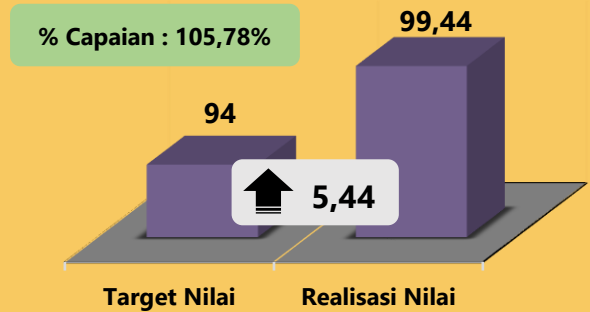
**7,65**

Target  
Realisasi



#### IKK 3.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L  
Direktorat Kursus & Pelatihan



Peningkatan NKA dari 2022 ke 2023 sebesar:

**0,57**

Target  
Realisasi



## Kinerja Keuangan

**PAGU 2023**

346.293.663.000

**REALISASI 2023**

346.011.302.399

Presentase Kinerja Keuangan

**99,92%**

# Kendala/ Masalah



## 1

Komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan atau pendampingan pendidikan non formal kursus dan pelatihan di wilayahnya belum merata dan masih terbatas. Selain itu, peran aktif Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam padanan anggaran juga masih minim

## 2

Belum optimalnya pendampingan rintisan usaha yang dilakukan kepada lulusan peserta didik PKW. Salah satu penyebabnya karena tidak adanya anggaran untuk melakukan pendampingan lulusan program tersebut

## 3

Terbatasnya jumlah program studi yang selaras dengan bidang keterampilan di LKP serta biaya kuliah jalur RPL masih belum terjangkau

## 4

Luas lahan 5.000m<sup>2</sup> dan pendidik yang memenuhi kriteria sebagai syarat pendirian Akademi Komunitas/PTV masih sulit untuk dipenuhi

## 5

Target Renstra Direktorat Kursus dan Pelatihan belum sepenuhnya dipenuhi anggarannya



# Upaya yang dilakukan

## 1

Melibatkan Pemerintah Daerah, DUDIKA, dan KemendesPDTT dalam agenda pelaksanaan program Ditsuslat baik dalam bentuk sosialisasi, diskusi terpumpun, dan seminar, serta menyiapkan konsep padanan anggaran bagi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pembinaan/pendampingan kursus dan pelatihan di wilayahnya untuk mendorong terbentuknya ekosistem kolaborasi yang lebih erat

## 2

Mendorong lembaga untuk berpartisipasi dalam program Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka serta mengarahkan lembaga untuk bekerjasama dengan UMKM dalam membantu pendampingan rintisan usaha

## 3

Dilakukan kegiatan sinkronisasi dengan Perguruan Tinggi yang terdaftar dalam Sierra, khususnya dengan Politeknik Negeri dan LLDIKTI. Sedangkan untuk mengatasi kendala pembiayaan dapat menjajaki ketersediaan beasiswa dari LPDP

## 4

Mengusulkan revisi Permendikbud No. 7 Tahun 2020 terutama mengenai luas lahan dan pendidik untuk persyaratan pendirian Akademi Komunitas

## 5

Mengusulkan penambahan dana lewat skema BA-BUN untuk memenuhi target renstra

Laporan Kinerja 2023



# BAB I

## PENDAHULUAN

Direktorat Kursus dan Pelatihan

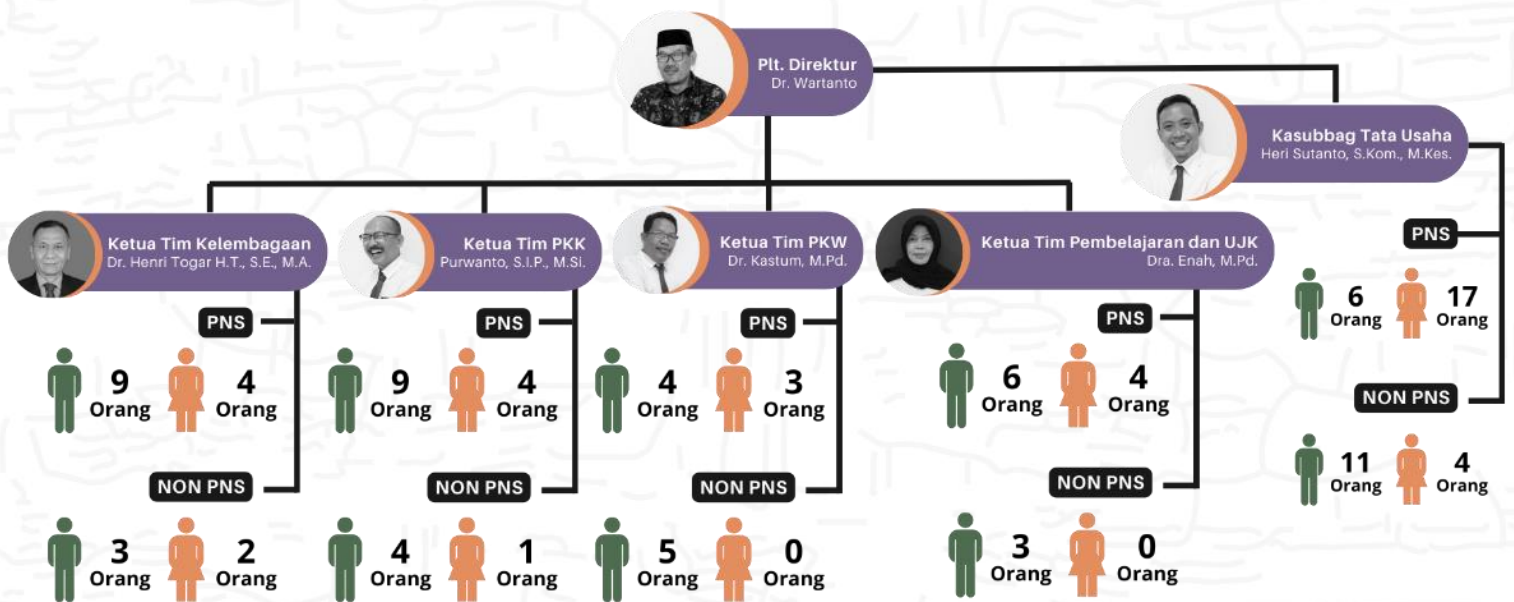


# Gambaran Umum

Direktorat Kursus dan Pelatihan merupakan satuan kerja di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Direktorat Kursus dan Pelatihan pertama kali dibentuk pada April 2006 lewat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Direktorat Kursus dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Direktur (Eselon II). Sejak awal mula didirikan hingga sekarang, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah mengalami 6 (enam) kali pergantian pimpinan. Saat ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan dipimpin oleh Dr. Wartanto. Adapun wilayah kerja Direktorat Kursus dan Pelatihan melingkupi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Data SDM



**Total SDM Ditsuslat Tahun 2023** | **105** Orang

PNS sebanyak 72 orang (Kelompok jabatan fungsional sebanyak 17 orang), dan Non PNS sebanyak 33 orang

\*Sumber Data SDM Direktorat Kursus dan Pelatihan Tahun 2023

# Tugas



**“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja”**

*(Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021)*

# Fungsi



- 1 Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 2 Perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 3 Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan & pelatihan kerja
- 5 Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 7 Penyiapan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan keterampilan & pelatihan kerja pada kursus & pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing/lembaga asing
- 8 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 9 Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat



# Dasar Hukum

**1**

**Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah**

**2**

**Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

**3**

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja**

**4**

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

**5**

**Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

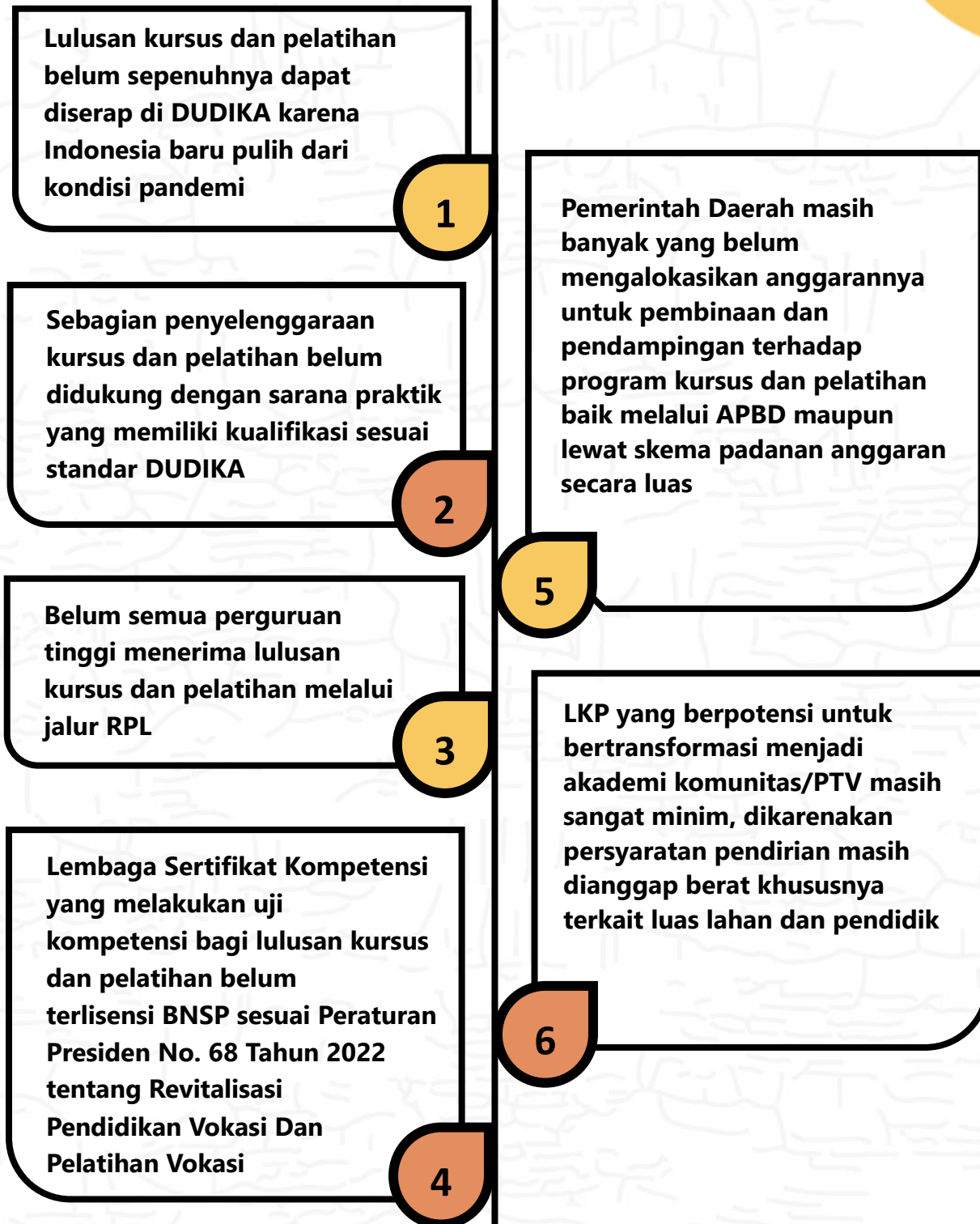
**6**

**Permendikbudristek No. 13/2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024**

**7**

**Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, & Teknologi**

# Isu Strategis



# Peran Strategis



- 1** Berperan penting dalam memberikan layanan ATS untuk memiliki berbagai keterampilan, terserap di DUDIKA dan dapat berwirausaha
- 2** Berperan penting dalam meningkatkan kualitas instruktur, pengelola, dan sarana praktik agar sesuai dengan standar DUDIKA
- 3** Berperan penting dalam melakukan sinkronisasi kualifikasi lulusan kursus dan pelatihan dengan perguruan tinggi vokasi melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 4** Berperan penting sebagai fasilitator dalam membangun koordinasi antara Lembaga Sertifikasi Kompetensi & DUDIKA untuk meningkatkan penjaminan mutu lulusan kursus dan pelatihan yang bersertifikasi dan berlisensi BNSP sesuai dengan Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
- 5** Berperan penting dalam membangun jejaring melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk membangun bersama pendidikan vokasi non formal melalui kursus dan pelatihan baik melalui skema padanan anggaran, APBD, CSR dari DUDIKA di wilayah masing-masing maupun anggaran lainnya
- 6** Berperan penting dalam pelaksanaan pendampingan bagi LKP yang berpotensi untuk bertransformasi menjadi Akademi Komunitas bersama dengan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Vokasi

Laporan Kinerja 2023



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

Direktorat Kursus dan Pelatihan


# Visi

*"Membangun rakyat Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup, yang unggul, terus berkembang, terampil, mandiri, berkarakter, profesional, dan berdaya saing"*

\*Renstra Periode Tahun 2020 – 2024



# Misi




Meningkatkan akses layanan kursus dan pelatihan bagi peserta didik dari anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS), menganggur dan berasal dari keluarga kurang mampu

Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kursus dan pelatihan yang kreatif dan berkarakter

Meningkatkan layanan lembaga kursus dan pelatihan yang berkualitas

Mewujudkan tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan yang transparan dan akuntabel

# Tujuan



Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan DUDIKA

Penguatan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Kursus dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan DUDIKA

Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus & Pelatihan



# Rencana Kinerja

Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan target kinerja tahun 2020-2021 untuk Direktorat Kursus dan Pelatihan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang dapat dilihat secara rinci melalui tabel di bawah ini.

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target	
			2020	2021
<b>SK 1: Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri</b>				
IKK 1	Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	Orang	100	200
IKK 2	Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	Orang	200	200
IKK 3	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	Lembaga	100	100
<b>SK : Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan</b>				
IKK 1	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	Predikat	BB	BB
IKK 2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas pelaksanaan RKA/KL satker minimal 93	Nilai	93	93

**Tabel Target dan Alokasi Anggaran Sasaran Kegiatan Direktorat Kursus dan Pelatihan 2020-2021**

Pada tahun 2022, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Adanya perubahan tersebut turut mengubah target kinerja



Direktorat Kursus dan Pelatihan sehingga matriks target renstra tahun 2020-2021 di atas tidak bisa dibandingkan dengan target renstra tahun 2022-2024.

Dalam perubahannya, Direktorat Kursus dan Pelatihan menetapkan tiga sasaran dan empat indikator kinerja kegiatan yang dijelaskan secara rinci melalui tabel di bawah ini:

Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Base line	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>SK : Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja</b>									
IKK 2.6.3.1	Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	Orang	70.385	17.164	85.000	100.000	88.661,00	419.435,00	494.555,00
<b>SK : Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja</b>									
IKK 2.6.3.2	Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	Lembaga	974	1.075	1.794	2.430	12.157,00	40.908,00	53.917,00
<b>SK : Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan</b>									
IKK	Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	Nilai	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50

**Tabel Target dan Alokasi Anggaran Sasaran Kegiatan Direktorat Kursus dan Pelatihan 2022-2024**

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, Direktorat Kursus dan Pelatihan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

### Perjanjian Kinerja (Awal)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2023
1	Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 1.1	Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	<b>19.700</b>

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2023
2	Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 2.1	Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	<b>1.000</b>
3	Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	IKK 3.1	Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	<b>A</b>
		IKK 3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	<b>94</b>

### Alokasi Anggaran

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp 29.554.855.000
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp 127.996.698.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 157.551.553.000</b>

Pada tahun 2023, dilakukan revisi pada target sasaran kegiatan 1 yaitu "meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja" dan sasaran kegiatan 2 yaitu "meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja".

Faktor yang mempengaruhi adanya perubahan target ini karena adanya realokasi BA-BUN yang dipergunakan untuk realisasi program prioritas nasional seperti PKK dan PKW serta penyaluran bantuan uji kompetensi. Adanya tambahan anggaran ini, mempengaruhi capaian realisasi jumlah peserta didik yang mengikuti Program PKK dan PKW serta satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, target Perjanjian Kinerja direvisi dan disesuaikan dengan proyeksi tambahan anggaran.

## Perjanjian Kinerja (Akhir)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2023
1	Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 1.1	Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	55.420
2	Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 2.1	Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1.020
3	Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	IKK 3.1	Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	A
		IKK 3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	94

## Alokasi Anggaran

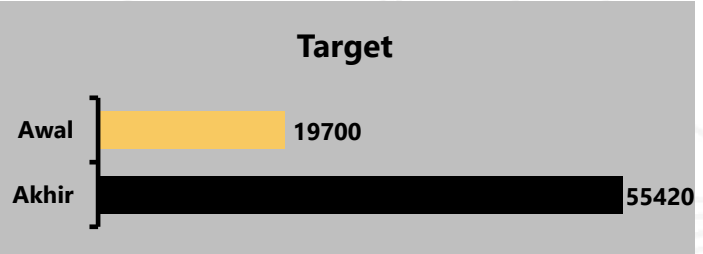
Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp 29.254.395.000
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp 317.039.268.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 346.293.663.000</b>

# Perbandingan Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir Tahun 2023

## SK 1 - Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

### IKK 1.1

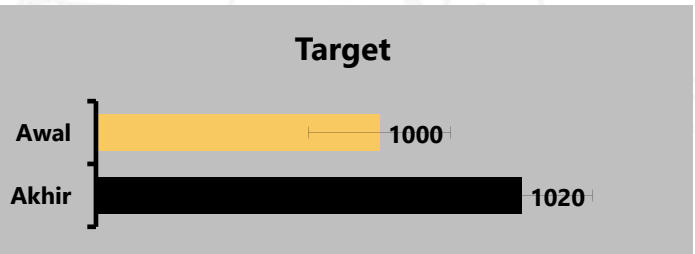
Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha



## SK 2 - Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan

### IKK 2.1

Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja



## SK 3 - Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan

### IKK 3.1

Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan

Target  
Awal : A | Akhir : A

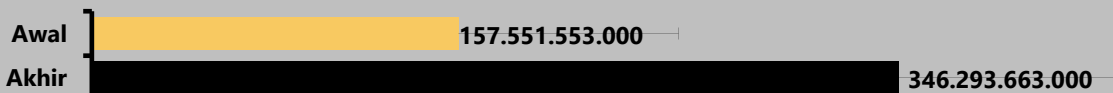
### IKK 3.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan

Target  
Awal : 94 | Akhir : 94

## Alokasi Anggaran

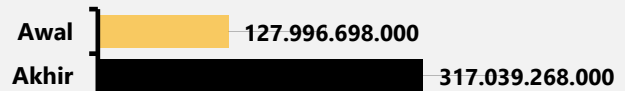
### Total Alokasi Anggaran



### Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi



### Pembinaan Kursus dan Pelatihan



# Program Prioritas Nasional



Pada periode tahun 2020-2024, Direktorat Kursus dan Pelatihan memiliki tiga program yang menjadi prioritas nasional. Adapun ketiga program itu adalah sebagai berikut:

- 1 Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)**
- 2 Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)**
- 3 Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri**

**Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)** adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja lainnya.

**Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)** adalah layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan melalui program pendidik dan kecakapan hidup untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola diri dan lingkungannya sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan

berwirausaha. Selain itu, Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan salah satu **Major Project (MP)** yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

**Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri** adalah layanan yang mewadahi lembaga kursus dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan penyesuaian atas kebutuhan dunia industri yang berperan sebagai pengguna dari kompetensi lulusan kursus dan pelatihan. Layanan ini terdiri dari berbagai macam program yang berorientasi dalam peningkatan kualitas kelembagaan satuan pendidikan kursus dan pelatihan diantaranya,

- a. SKL, Kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja;
- b. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja *Project Based Learning/PJBL*;
- c. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring;
- d. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai *teaching factory*;
- e. Jumlah LKP yang dinilai kinerja Lembaga;
- f. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di DUDIKA;
- g. Penguji uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya;
- h. Pengelola uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya;
- i. LKP yang memfasilitasi lulusan, pengelola dan instruktur melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi melalui jalur RPL ;
- j. LKP yang melaksanakan fungsi-fungsi atau memiliki unit pusat pengembangan karier;
- k. LKP yang siap bertransformasi menjadi akademi komunitas (AK);
- l. Pemberian bantuan uji kompetensi.





# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

# SASARAN STRATEGIS

## *Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang*

Untuk mendukung kinerja Kemendikbudristek, khususnya terkait sasaran strategis meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang, Ditjen Pendidikan Vokasi mengemban tugas untuk memastikan tingkat keberkerjaan lulusan pendidikan vokasi setelah 1 tahun kelulusan dengan upah minimum 1x UMP semakin meningkat.

Sebagai bagian dari Ditjen Pendidikan Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan berkontribusi untuk mendukung pencapaian sasaran program Ditjen Pendidikan Vokasi terkait peningkatan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya lulusan kursus dan pelatihan. Tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah menetapkan tiga sasaran kegiatan yang akan dicapai, sesuai Renstra Direktorat Kursus dan Pelatihan, dengan capaian sebagai berikut:

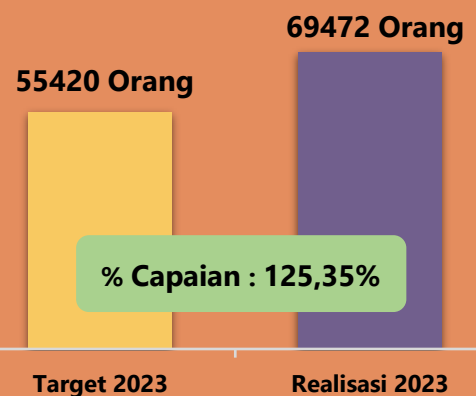
### 1

#### SASARAN KEGIATAN

**Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja**

#### IKK 1.1

**Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha**

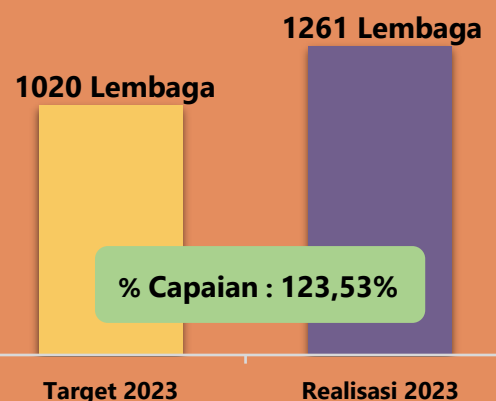


### 2

**Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja**

#### IKK 2.1

**Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja**



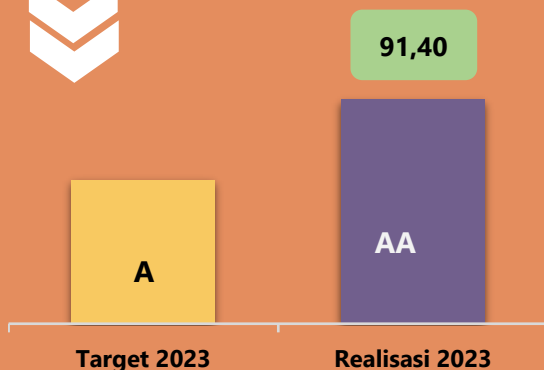


3

## Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

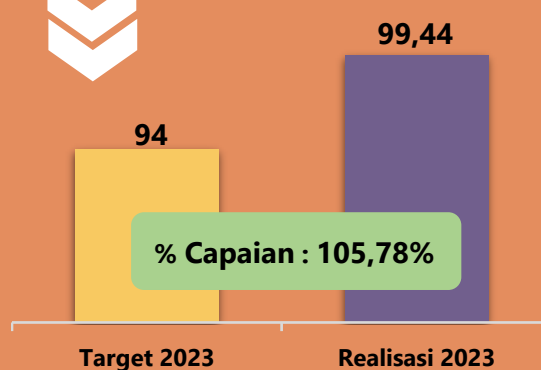
## IKK 3.1

Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan



## IKK 3.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus & Pelatihan



Pada tahun 2023, terdapat realokasi anggaran yang bersumber dari dana BA BUN. Anggaran tersebut dipergunakan untuk perealisasi program prioritas nasional PKK dan PKW serta bantuan uji kompetensi. Adanya realokasi anggaran tersebut menyebabkan terjadinya perubahan target pada perjanjian kinerja di Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Dengan adanya realokasi anggaran tersebut, capaian realisasi jumlah peserta didik yang mengikuti Program PKK dan PKW meningkat seiring dengan penambahan target sasaran dari yang sebelumnya 19.700 orang menjadi 55.420 orang dengan capaian di tahun 2023 ini sebesar 69.472 orang.

Selain itu, adanya penambahan anggaran ini juga mempengaruhi target pada Sasaran Kegiatan 2 yang dimanfaatkan untuk memberikan bantuan uji kompetensi kepada lembaga sehingga targetnya yang sebelumnya 1.000 lembaga direvisi menjadi 1.020 lembaga dengan capaian di tahun 2023 sebesar 1.261 lembaga. Capaian dari masing-masing sasaran kegiatan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.





## SASARAN KEGIATAN 1

### Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Sasaran Kegiatan meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja adalah untuk memberikan kesempatan bagi anak usia sekolah tidak sekolah mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan sehingga anak usia sekolah tidak sekolah tersebut memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke dunia kerja atau berwirausaha.

Pada tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan dapat menjangkau 38.842 anak usia sekolah tidak sekolah untuk mengikuti Pendidikan Kecakapan Kerja, dan 26.135 anak usia sekolah tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Selain itu, melalui skema padanan anggaran, Direktorat Kursus dan Pelatihan juga berhasil menjalin kerjasama dengan lembaga kursus dan pelatihan untuk memberikan bantuan dana uji kompetensi kepada 4.495 anak usia sekolah tidak sekolah yang telah menyelesaikan pembelajaran di lembaga tersebut baik dengan biaya mandiri atau mendapatkan dana kursus dari sponsor yang berasal dari instansi pemerintah maupun swasta. Sehingga total capaian pada sasaran kegiatan ini adalah sebesar **69.472 orang**. Angka capaian tahun 2023 ini mengalami **peningkatan sebanyak 5.678** jika dibandingkan capaian tahun 2022 sebanyak 63.785 orang.

Pada program PKK, dari **38.842** orang yang mendapatkan bantuan pendidikan tersebut, ada **22.277** orang yang telah bekerja (data per 25 Januari 2024) atau persentase serapan lulusan ke dunia kerja adalah sebesar **57,35%**. Sedangkan dari **26.135** orang yang mendapatkan bantuan dalam program PKW, **21.764** orang memulai wirausaha (data per 25 Januari 2024) atau presentase serapan lulusan yang berwirausaha adalah sebesar **83.28%**. Angka presentase serapan lulusan PKK dan PKW ini terus berkembang seiring dengan

terserapnya lulusan program PKK dan PKW di DUDIKA. Data serapan akan terus bertambah setiap harinya dan akan dihitung serta ditelusuri sampai 1 tahun setelah kelulusan.

Sasaran Kegiatan (SK) ini didukung oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yakni jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha yang dijabarkan dengan informasi lebih detail dibawah ini.

## Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1

### Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha



Capaian Indikator Kinerja Kegiatan - Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha pada tahun 2023 didukung oleh beberapa output yakni,

1. Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK);
2. Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) mendapatkan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW); dan
3. Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) yang mendapatkan bantuan uji kompetensi setelah mengikuti kursus atau pelatihan di lembaga kursus dan pelatihan dengan biaya mandiri atau dari sponsor baik dari instansi pemerintah maupun swasta.

Kriteria ATS yang layak mendapatkan PKK adalah ATS usia antara 17 s.d. 25 tahun yang masih menganggur, diutamakan dari keluarga tidak mampu atau pernah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sedangkan kriteria ATS yang layak mendapatkan PKW adalah ATS usia antara 15 s.d. 25 tahun yang masih menganggur, diutamakan dari keluarga tidak mampu atau pernah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, pada IKK ini juga dihitung capaian peserta didik ATS non program PKK yang mendapatkan bantuan uji kompetensi setelah mengikuti

pendidikan atau pelatihan di lembaga kursus dan pelatihan yang sama seperti kriteria peserta didik pada program PKK.

## METODE PERHITUNGAN

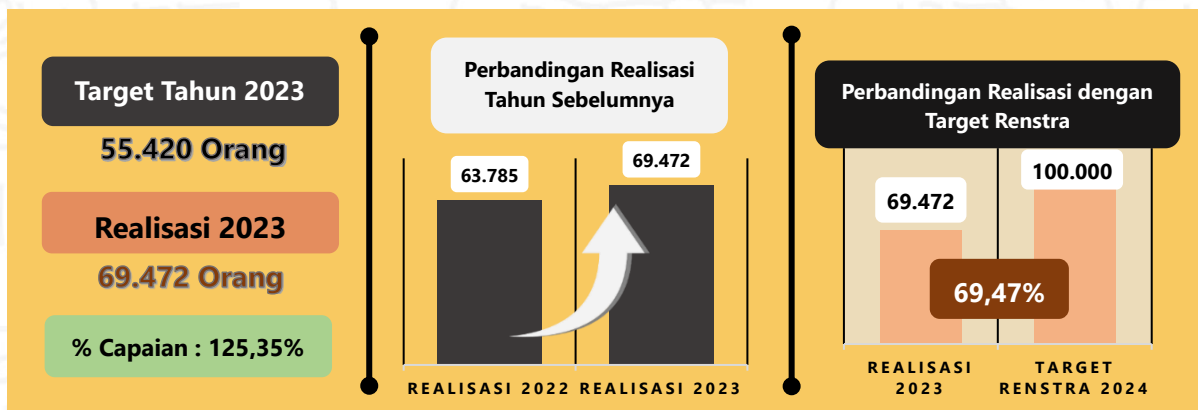
$$I = A + B$$

Keterangan

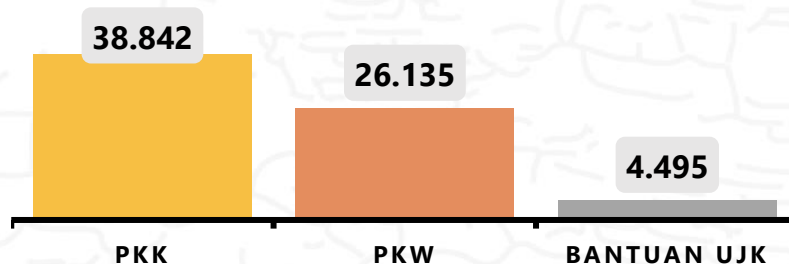
- **I** : Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha
- **A** : Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan mendapatkan program bantuan uji kompetensi untuk bekerja melalui skema padanan anggaran
- **B** : Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan wirausaha
- **Satuan** : Orang
- **Tipe Penghitungan** : Nonkumulatif
- **Unit Pelaksana** : Direktorat Kursus dan Pelatihan
- **Sumber Data** : Dapodik, <http://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id>, laporan pelaksanaan PKK dan PKW
- **Periode Pengumpulan Data** : Tahunan



## Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023



## CAPAIAN IKK 1.1 TAHUN 2023



Tingkat capaian pada IKK 1.1 ini didukung oleh output dari beberapa program yaitu program PKK, program PKW, dan program pemberian uji kompetensi bagi peserta didik yang telah mengikuti kursus dan pelatihan secara mandiri (non PKK).

Bantuan uji kompetensi diberikan lewat skema padanan anggaran kepada peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat setelah menuntaskan pembelajaran secara mandiri atau mendapatkan sponsor dari instansi pemerintah/swasta/DUDIKA di lembaga kursus dan pelatihan yang telah mengakses program. Tujuannya adalah untuk memperluas akses layanan kursus dan pelatihan bagi ATS dalam mengikuti uji kompetensi, menstimulus peningkatan jumlah peserta didik kursus dan pelatihan selain melalui program PKK dan/atau PKW, serta meningkatkan kualitas dan penjaminan mutu hasil pendidikan kursus dan pelatihan melalui uji kompetensi. Adapun capaian peserta didik ATS penerima bantuan uji kompetensi yang dipertimbangkan untuk masuk menjadi capaian pada IKK ini adalah yang sesuai dengan kriteria pada program PKK yaitu usia 17 s.d. 25 tahun.

Pada tahun 2023, telah terealisasi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha sebanyak **69.472** orang. Hasil ini melampaui target awal pada Perjanjian Kinerja yaitu 55.420 orang atau persentase capaian pada IKK ini di tahun 2023 adalah **125,35%**.

Melihat capaian di tahun 2022, terjadi peningkatan capaian sebanyak **5.687** orang dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2024 yakni sebanyak 100.000 orang maka realisasi tahun 2023 adalah sebesar **69,47% dari target renstra tersebut**. Realisasi IKK yang melebihi dari target disebabkan oleh beberapa faktor yaitu,

1. Adanya penambahan dana BA-BUN yang digunakan untuk realisasi program bantuan pemerintah PKK, PKW, dan bantuan uji kompetensi;
2. Dilakukan efisiensi anggaran karena satuan biaya per jenis keterampilan berbeda. Ada beberapa jenis keterampilan yang satuan biayanya cenderung lebih rendah dibandingkan jenis keterampilan yang lain sehingga mampu menjangkau lebih banyak sasaran;
3. Kebijakan skema padanan anggaran lewat penyaluran bantuan uji kompetensi. Beberapa lembaga kursus dan pelatihan yang telah mengakses program baik PKK dan PKW juga menerima peserta didik secara mandiri. Untuk mendorong lebih banyak partisipasi anak usia sekolah tidak sekolah dalam mengikuti kursus dan

pelatihan, Direktorat Kursus dan Pelatihan memberikan alternatif layanan berupa pemberian dana untuk uji kompetensi kepada lembaga-lembaga kursus yang sudah memenuhi standar dan ketentuan dan dianggap mampu melaksanakan program dengan baik sehingga lulusannya dapat bekerja di DUDIKA; dan

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan pengelolaan bantuan pemerintah.



## Kendala/ Masalah

**1**

**Lembaga sempat mengalami kesulitan dalam mengajukan proposal pada aplikasi terkait dengan data kependudukan dikarenakan operasional pada aplikasi milik Ditjen Dukcapil dibatasi di waktu tertentu**

**2**

**Masih terdapat lembaga yang belum memahami pengadministrasian dan penyelenggaraan program melalui aplikasi**

**3**

**Terdapat lembaga kursus dan pelatihan di beberapa kabupaten/kota yang belum mengetahui program PKK & PKW**

**4**

**Terdapat lembaga yang belum memenuhi indikator keberhasilan program PKK, baik dari aspek uji kompetensi maupun penyerapan lulusan**

**5**

**Beberapa lembaga belum melakukan pendampingan rintisan usaha kepada lulusan peserta didik PKW**

# Langkah Strategi

**1**

Melakukan koordinasi dengan tim pengembang sistem & menginformasikan kepada lembaga untuk untuk mengantisipasi penginputan proposal sesuai dengan waktu operasional yang telah direkomendasikan melalui media sosial

**2**

Mengikutsertakan operator dalam bimbingan teknis yang sudah difasilitasi oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan melalui media sosial

**3**

Mengundang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Mitra Usaha pada saat acara peluncuran/sosialisasi program PKK dan PKW

**4**

Mendorong lembaga penyelenggara program PKK untuk melakukan *assesment/evaluasi* secara mandiri, aspek mana yang menjadi kelemahan dan diharapkan untuk diperbaiki

**5**

Mendorong lembaga untuk berpartisipasi dalam program Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka dan mengarahkan lembaga untuk bekerjasama dengan UMKM untuk melaksanakan pendampingan rintisan usaha

# 1

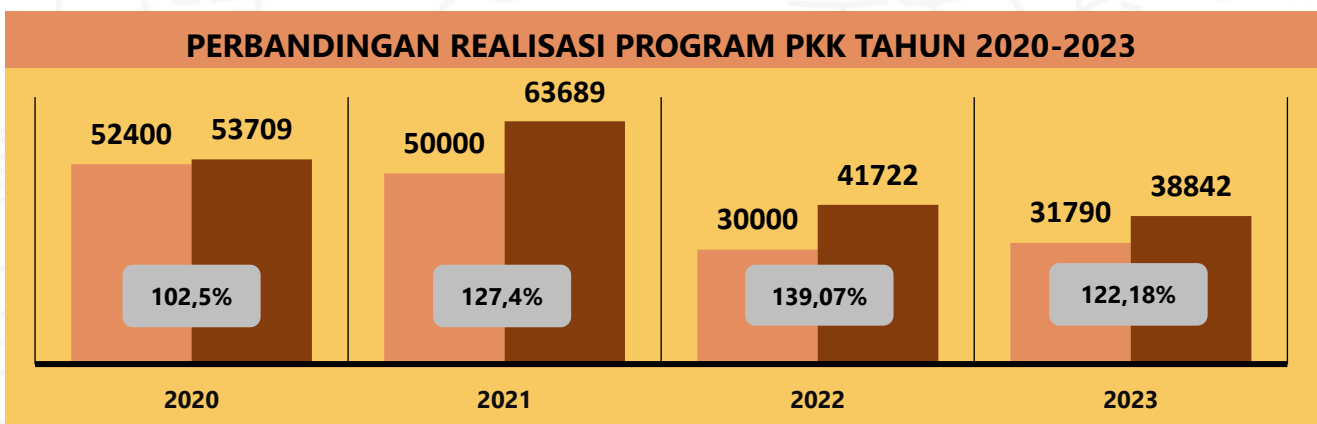
## Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

<b>Target 2023</b>
<b>31.790 Orang</b>
<b>Realisasi 2023</b>
<b>38.842 Orang</b>
<b>% Capaian : 122,18%</b>

Tujuan program PKK adalah mendidik dan melatih peserta didik dengan keterampilan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; memastikan peserta didik mengikuti uji kompetensi; dan peserta terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

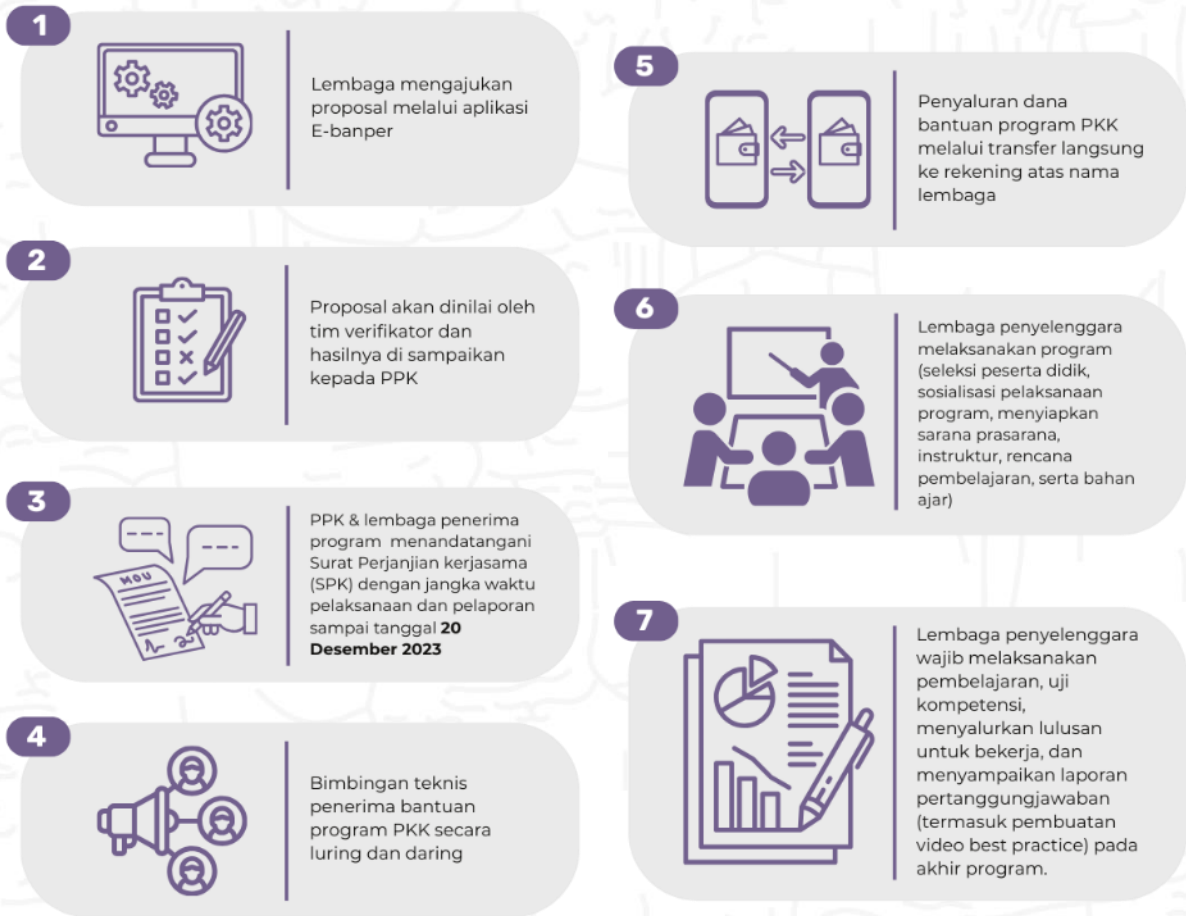
Pada tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah memberikan bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja kepada total **38.842 orang** atau persentase capaiannya sebesar **122,18%** yang artinya capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 31.790 orang. Adapun perbandingan realisasi program PKK sejak tahun 2020-2023 dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:



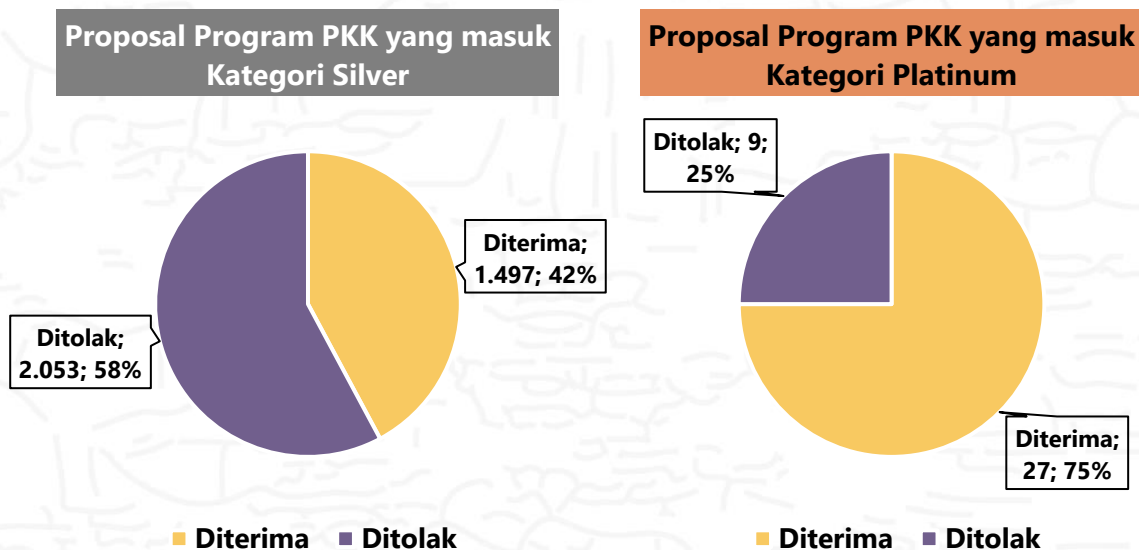
Perbandingan Realisasi PKK Tahun 2020-2023



Tahapan proses yang harus dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara dalam program ini adalah sebagai berikut:



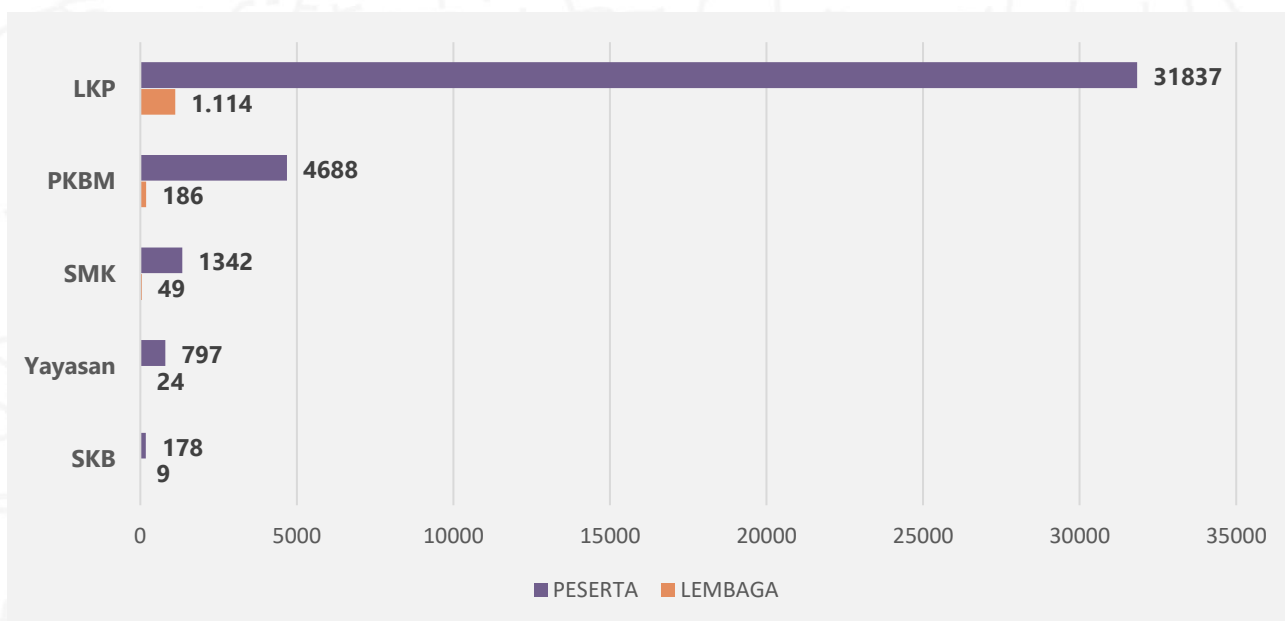
Pada tahun 2023 terdapat total 3.586 usulan proposal yang masuk ke aplikasi program PKK, dari jumlah tersebut terdapat 1.524 proposal yang lolos penilaian dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:



### Lembaga Penyelenggara Program PKK

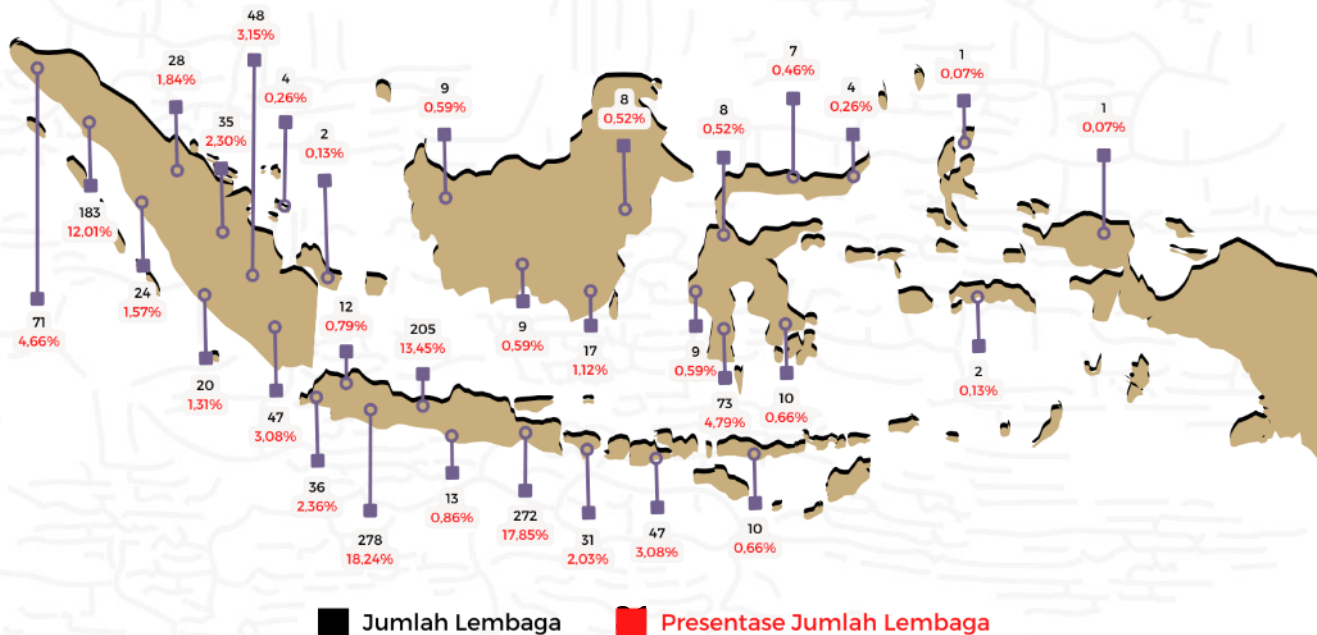
Dari total 1.524 proposal yang telah diterima, penyelenggaraan program PKK berhasil dilaksanakan oleh sebanyak 1.382 lembaga penyelenggara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika melihat berdasarkan kategori lembaga penyelenggara, program ini paling banyak diakses oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan total 1.114 lembaga. Adapun informasi lebih lanjut mengenai detail kategori lembaga pengakses program dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.

Kategori Lembaga Pengakses Program PKK



Adapun sebaran lembaga penyelenggara program PKK di masing-masing provinsi dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.

Peta Sebaran Lembaga Penyelenggara PKK Berdasarkan Provinsi

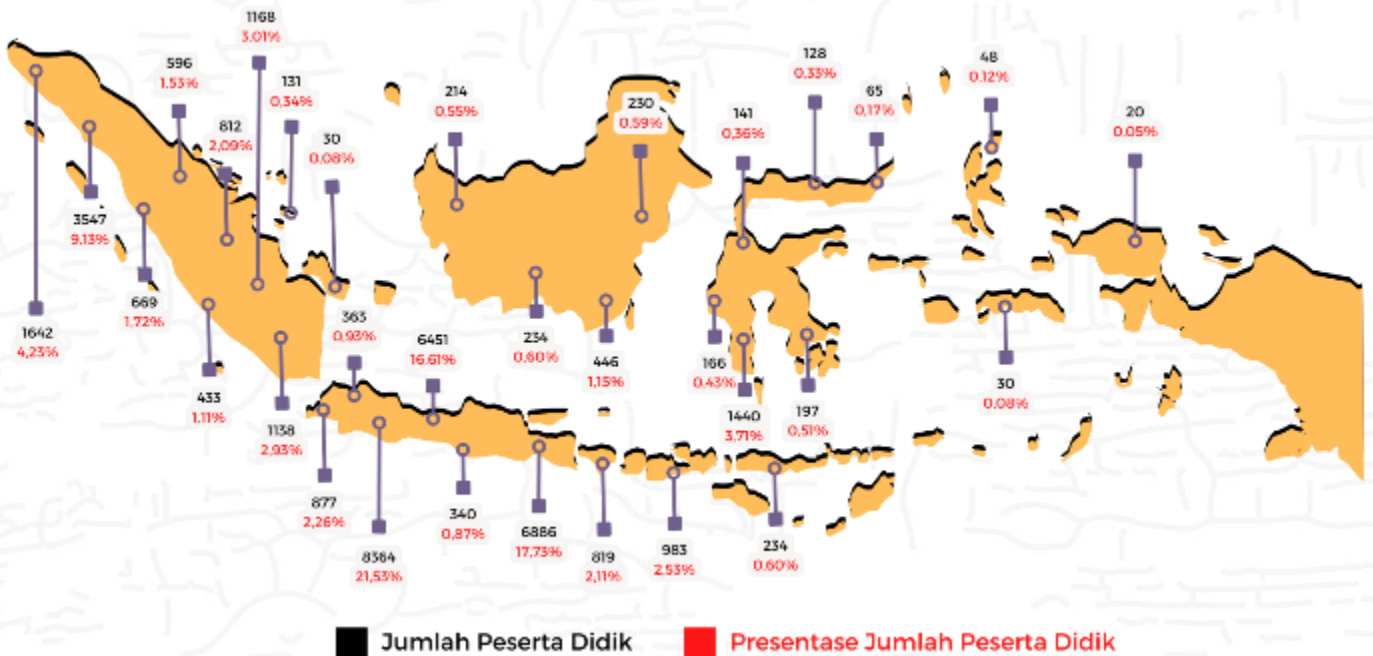


Berdasarkan gambar di atas, terlihat jumlah dan presentase Lembaga Penyelenggara terbanyak pertama berasal yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 18,24%, kedua adalah Provinsi Jawa Timur sebanyak 17,85%, dan ketiga adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,45%.

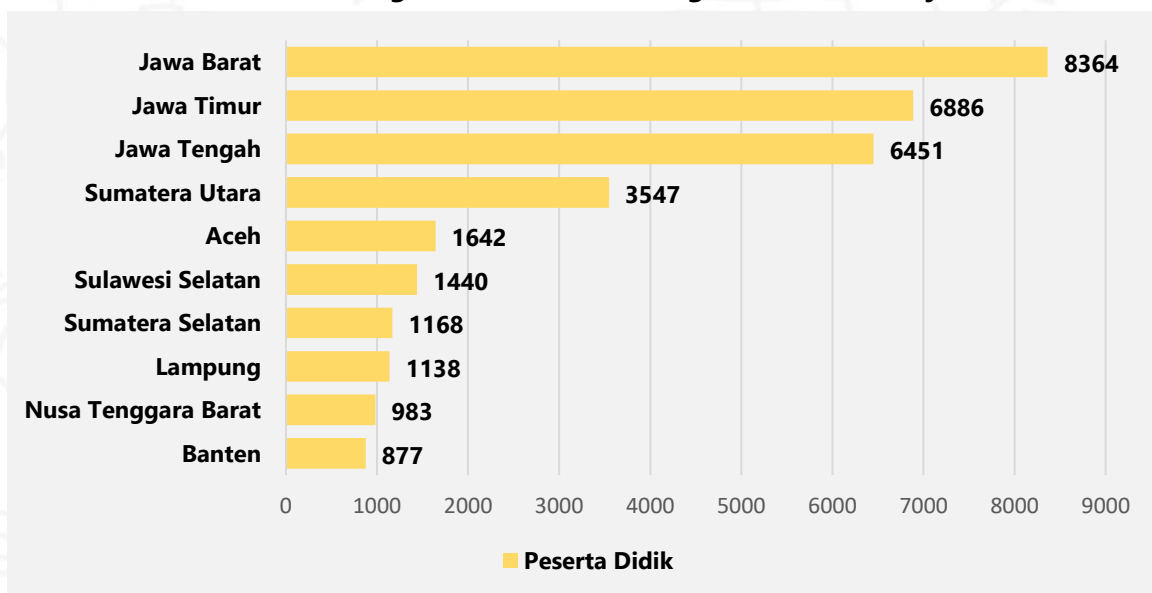
### Peserta Didik Program PKK

Peserta didik program PKK tahun 2023 berjumlah 38.842 orang (sesuai dengan SK) yang sebaran berdasarkan provinsi dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

**Peta Sebaran Peserta Didik PKK Berdasarkan Provinsi**

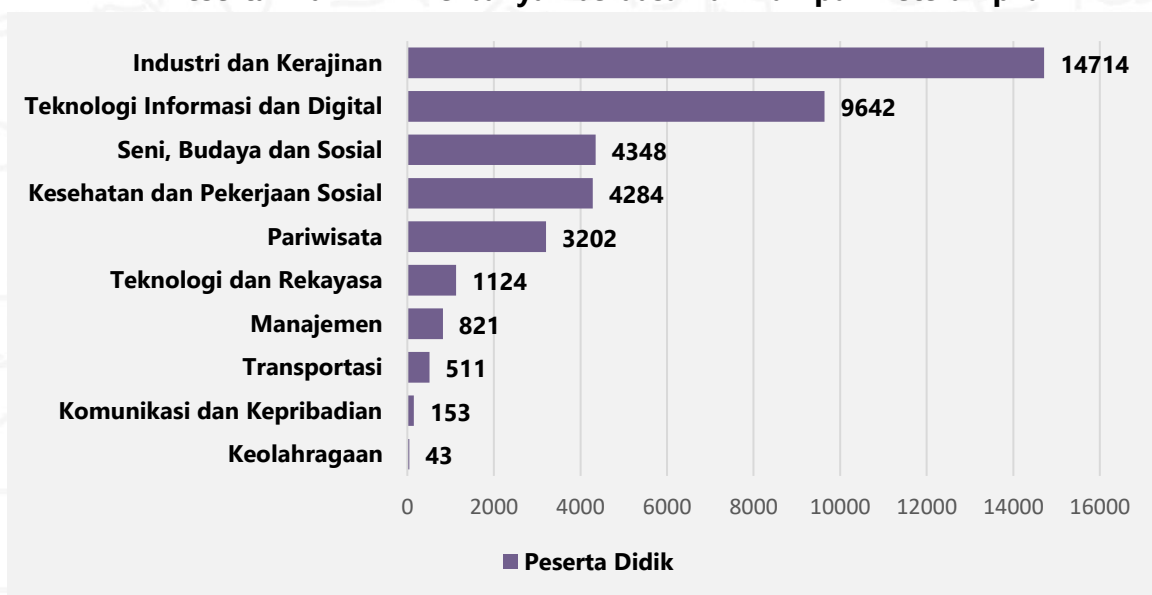


**10 Provinsi dengan Peserta Didik Program PKK Terbanyak**

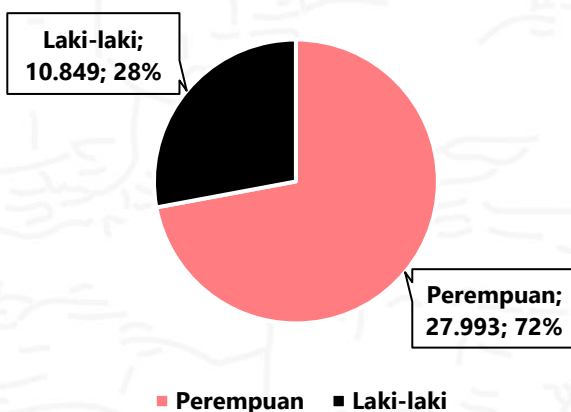


Berdasarkan gambar dan grafik di atas, terlihat jumlah dan presentase peserta didik terbanyak pertama yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 21,53% dengan peserta didik sebanyak 8.634 orang, kedua Provinsi Jawa Timur sebanyak 17,73% dengan peserta didik sebanyak 6.886 orang, ketiga Provinsi Jawa Tengah 16,61% dengan peserta didik sebanyak 6.451 orang, selanjutnya diikuti oleh Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Lampung, NTB, dan Banten. Data ini mencerminkan bahwa peserta didik yang mendapatkan bantuan program PKK masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

### Peserta Didik PKK Terbanyak berdasarkan Rumpun Keterampilan



### Peserta Didik berdasarkan Jenis Kelamin



Dari 38.842 orang peserta didik yang mengikuti program PKK tahun 2023, sebagian besar adalah perempuan yaitu mencapai 72,06% atau sebanyak **27.993** orang. Sedangkan peserta didik laki-laki hanya sebesar 27,93% atau **10.849** orang. Data ini memperlihatkan program PKK tahun 2023 cenderung diminati perempuan dibanding laki-laki.

Selain itu, dari total 12 rumpun keterampilan yang ada dalam program PKK dapat dilihat bahwa industri dan kerajinan menjadi rumpun keterampilan yang paling diminati dengan peserta didik mencapai 37,88% atau 14.714 orang.

Jenis-jenis keterampilan pada rumpun industri dan kerajinan ini diantaranya tata boga jasa usaha makanan, membatik, tata boga pastry dan bakeri, tata busana, bordir, sulam, kerajinan kayu, meubeler.

Di posisi kedua rumpun keterampilan yang diminati adalah teknologi informasi dan digital dengan peserta didik sebesar 24,82% atau sejumlah 9.642 orang. Rumpun keterampilan teknologi informasi dan digital mencakup pemasaran digital, animasi, *Computer Aided Design (CAD)*, desain grafis, jaringan komputer sistem administrasi, komputer aplikasi perkantoran, mobile aplikasi programming, multimedia pemula, teknik komputer, *video editing*, *web programming*, desain web.

### Hasil Program PKK Tahun 2023

Tujuan penyelenggaraan program pendidikan kecakapan kerja adalah lulusan peserta didik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat ditempatkan bekerja baik secara langsung ataupun melalui proses magang setelah mengikuti uji kompetensi.

NO	RUMPUN KETERAMPILAN	JUMLAH PD	KOMPETEN		TIDAK KOMPETEN	
			PD	%	PD	%
1	Industri dan Kerajinan	14.714	12807	87%	1907	13%
2	Keolahragaan	43	35	81%	8	19%
3	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.265	4048	95%	217	5%
4	Komunikasi dan Kepribadian	153	86	56%	67	44%
5	Manajemen	821	606	74%	215	26%
6	Pariwisata	2.290	2098	92%	192	8%
7	Seni, Budaya dan Sosial	4.323	4167	96%	156	4%
8	Teknologi dan Rekayasa	856	727	85%	129	15%
9	Teknologi Informasi dan Digital	9.591	4079	43%	5512	57%
10	Transportasi	463	399	86%	64	14%
<b>Jumlah Total</b>		<b>37.519</b>	<b>29.052</b>	<b>78%</b>	<b>8432</b>	<b>22%</b>

\*PD = Peserta Didik

### Hasil Uji Kompetensi Peserta Didik PKK dari Lembaga Kategori Silver

Angka dalam tabel diatas menunjukkan bahwa 78% dari 37.519 peserta didik dari lembaga dengan kategori silver dinyatakan kompeten atau lulus uji kompetensi, sehingga

salah satu indikator keberhasilan program PKK yaitu "70% peserta didik kategori silver memperoleh sertifikat dan/atau hasil kelulusan uji kompetensi", sudah terpenuhi.

NO	RUMPUN KETERAMPILAN	JUMLAH PD	KOMPETEN		TIDAK KOMPETEN	
			PD	%	PD	%
1	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	20	20	100%	0	0%
2	Pariwisata	912	894	98%	18	2%
3	Teknologi dan Rekayasa	268	268	100%	0	0%
4	Teknologi Informasi dan Digital	75	66	88%	9	12%
5	Transportasi	48	48	100%	0	0%
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.323</b>	<b>1.296</b>	<b>97%</b>	<b>16</b>	<b>3%</b>

\*PD = Peserta Didik

### Hasil Uji Kompetensi Peserta Didik PKK dari Lembaga Kategori Platinum

Data di tabel diatas menunjukkan bahwa 97% dari 1.323 peserta didik dari lembaga dengan kategori platinum dinyatakan kompeten atau lulus uji kompetensi, sehingga salah satu indikator keberhasilan program PKK yaitu "90% peserta didik memperoleh sertifikat dan/atau hasil kelulusan uji kompetensi", dapat dinyatakan sudah terpenuhi.

NO.	PROVINSI	JUMLAH PD	BEKERJA		BELUM BEKERJA		MAGANG	
			PD	%	PD	%	PD	%
1	BALI	819	325	40%	149	18%	345	42%
2	BANGKA BELITUNG	30	15	50%	-	0%	15	50%
3	BANTEN	877	617	70%	162	18%	98	11%
4	BENGKULU	393	242	62%	136	35%	15	4%
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	340	132	39%	125	37%	83	24%
6	DI. ACEH	1642	1228	75%	154	9%	260	16%
7	DKI JAKARTA	363	153	42%	93	26%	117	32%
8	GORONTALO	128	18	14%	76	59%	34	27%
9	JAMBI	812	591	73%	23	3%	198	24%
10	JAWA BARAT	8364	4628	55%	2349	28%	1387	17%
11	JAWA TENGAH	6451	4934	76%	838	13%	679	11%
12	JAWA TIMUR	6926	3638	53%	1723	25%	1565	23%
13	KALIMANTAN BARAT	214	129	60%	79	37%	6	3%
14	KALIMANTAN SELATAN	446	130	29%	210	47%	106	24%
15	KALIMANTAN TENGAH	234	66	28%	125	53%	43	18%
16	KALIMANTAN TIMUR	230	62	27%	102	44%	66	29%

NO.	PROVINSI	JUMLAH PD	BEKERJA		BELUM BEKERJA		MAGANG	
			PD	%	PD	%	PD	%
17	KEPULAUAN RIAU	131	84	64%	47	36%	-	0%
18	LAMPUNG	1138	462	41%	347	30%	329	29%
19	MALUKU	30	16	53%	14	47%	-	0%
20	MALUKU UTARA	48	5	10%	42	88%	1	2%
21	NUSA TENGGARA TIMUR	234	113	48%	32	14%	89	38%
22	NUSA TENGGARA BARAT	983	408	42%	191	19%	384	39%
23	PAPUA BARAT	20	-	0%	-	0%	20	100%
24	RIAU	596	286	48%	123	21%	187	31%
25	SULAWESI BARAT	166	95	57%	64	39%	7	4%
26	SULAWESI SELATAN	1440	861	60%	204	14%	375	26%
27	SULAWESI TENGAH	141	99	70%	4	3%	38	27%
28	SULAWESI TENGGARA	197	85	43%	30	15%	82	42%
29	SULAWESI UTARA	65	39	60%	6	9%	20	31%
30	SUMATERA BARAT	669	332	50%	42	6%	295	44%
31	SUMATERA SELATAN	1168	663	57%	158	14%	347	30%
32	SUMATERA UTARA	3547	1821	51%	686	19%	1040	29%
<b>Grand Total</b>		<b>38842</b>	<b>22277</b>	<b>57%</b>	<b>8334</b>	<b>21%</b>	<b>8231</b>	<b>22%</b>

\*PD = Peserta Didik

### Penyerapan Peserta Didik PKK di Dunia Kerja berdasarkan Provinsi (Data Per 25/01/24)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lulusan program PKK yang sudah bekerja paling banyak terdapat di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur dan lulusan yang magang paling banyak terdapat di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Data serapan ini akan terus bertambah setiap harinya dan akan dihitung serta ditelusuri sampai 1 tahun setelah kelulusan.

### Dokumentasi Program PKK Tahun 2023



# Hambatan/Kendala

1

Terjadi pergantian peserta didik dalam proses pembelajaran

2

Sebagian lembaga tidak memahami pengadministrasian penyelenggaraan program PKK melalui aplikasi

3

Sebagian tidak memenuhi indikator keberhasilan program PKK, baik dari aspek uji kompetensi maupun penyerapan lulusan

4

Rendahnya hasil UJK untuk jenis keterampilan tertentu

# Strategi/Tindak Lanjut

1

Dalam proses rekrutmen peserta didik, ada kriteria tambahan yang harus dinilai, yaitu minat peserta didik, baik minat dalam mengikuti program PKK dan minat terhadap jenis keterampilan yang diambil

2

Mengikutsertakan operator dalam bimbingan teknis yang difasilitasi oleh Direktorat

3

Mendorong lembaga penyelenggara program PKK untuk melakukan *assesment/evaluasi* secara mandiri, aspek mana yang menjadi kelemahan dan diharapkan untuk diperbaiki

4

Meningkatkan integrasi kurikulum berbasis Dunia Kerja yang digunakan dalam program PKK dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) untuk memperkecil kemungkinan ketidaksesuaian materi pembelajaran dengan proses evaluasi di uji kompetensi





# Inovasi

1

Inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi

2

Integrasi dengan aplikasi SiKompeten dalam pelaksanaan uji kompetensi sehingga diharapkan hasil UJK validitasnya terjaga

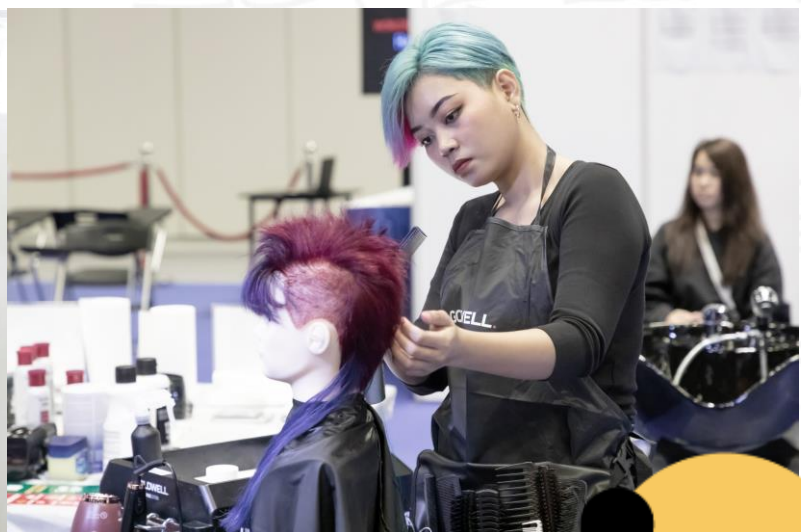
3

Administrasi keuangan sudah dibuat skema sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempermudah lembaga untuk mengadministrasikan keuangan

4

Melibatkan KADIN dalam upaya penguatan kerjasama dengan DUDIKA terutama dalam penyerapan lulusan

## Dokumentasi Peserta Didik Program PKK Tahun 2023



## 2

## Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)

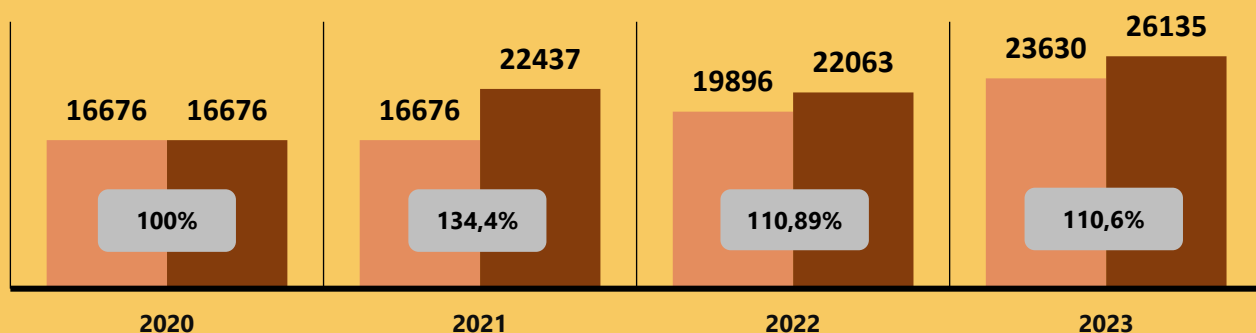
Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal berwirausaha.

<b>Target 2023</b>
<b>23.630 Orang</b>
<b>Realisasi 2023</b>
<b>26.135 Orang</b>
<b>% Capaian : 110,6%</b>

Tujuan program PKW adalah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan pola pikir berwirausaha bagi anak usia sekolah tidak sekolah melalui kursus dan pelatihan untuk menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengembangkan kemampuan potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha dan

menciptakan anak usia sekolah tidak sekolah banyak yang dapat merintis usaha mandiri yang dibimbing oleh mitra usaha. Pada tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah memberikan bantuan Pendidikan Kecakapan Wirausaha kepada 26.135 orang atau perentase capaiannya sebesar 110,6% yang artinya capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 23.630 orang.

### PERBANDINGAN REALISASI PROGRAM PKW TAHUN 2020-2023

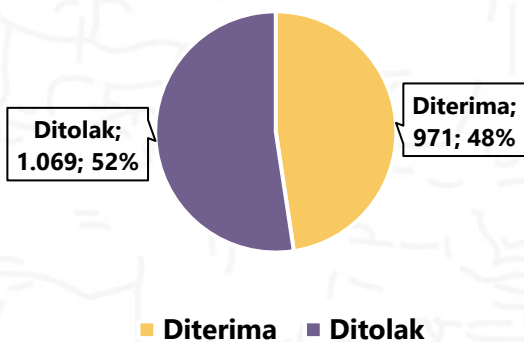


Tahapan proses yang harus dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara dalam program ini adalah sebagai berikut:

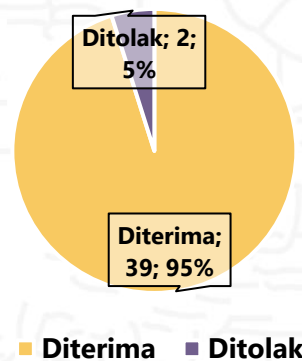


Pada tahun 2023, terdapat total 2.081 usulan proposal yang masuk ke aplikasi program PKW, dari jumlah tersebut terdapat 1.010 proposal yang lolos penilaian dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.

**Proposal Program PKW yang masuk Kategori Silver**



**Proposal Program PKW yang masuk Kategori Platinum**

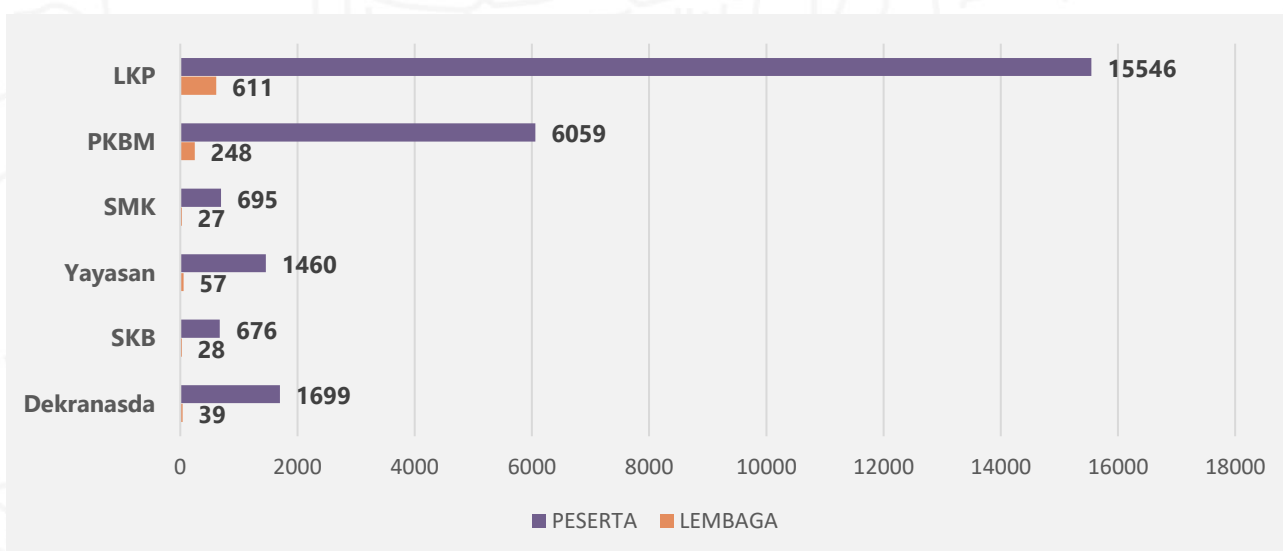


**Lembaga Penyelenggara Program PKW**

Dari total 1.010 proposal yang telah diterima, penyelenggaraan program PKW berhasil dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika

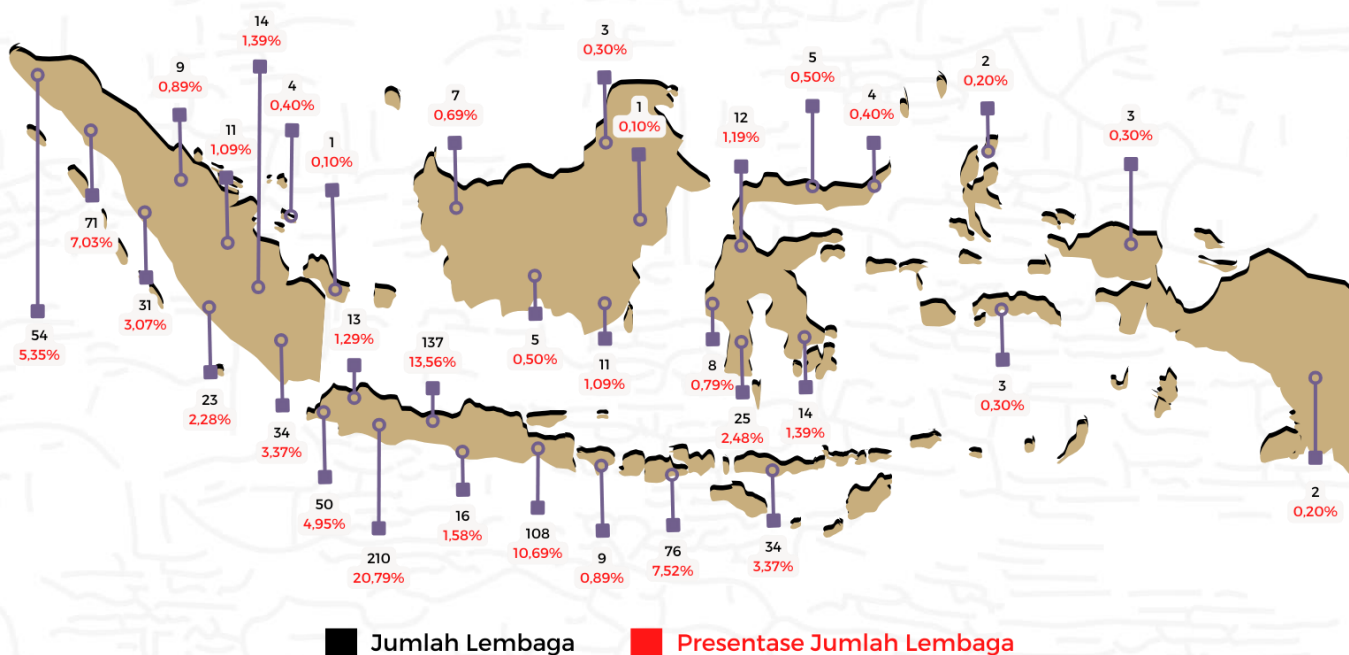
melihat berdasarkan kategori lembaga penyelenggara, program ini paling banyak diakses oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan total 611 lembaga. Urutan kedua yang paling banyak mengakses program adalah PKBM dengan total 248 lembaga. Informasi lebih lanjut mengenai detail kategori lembaga pengakses program dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.

**Kategori Lembaga Pengakses Program PKW**



Sedangkan informasi mengenai sebaran lembaga penyelenggara program PKW di masing-masing provinsi dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.

**Peta Sebaran Lembaga Pengakses PKW Berdasarkan Provinsi**

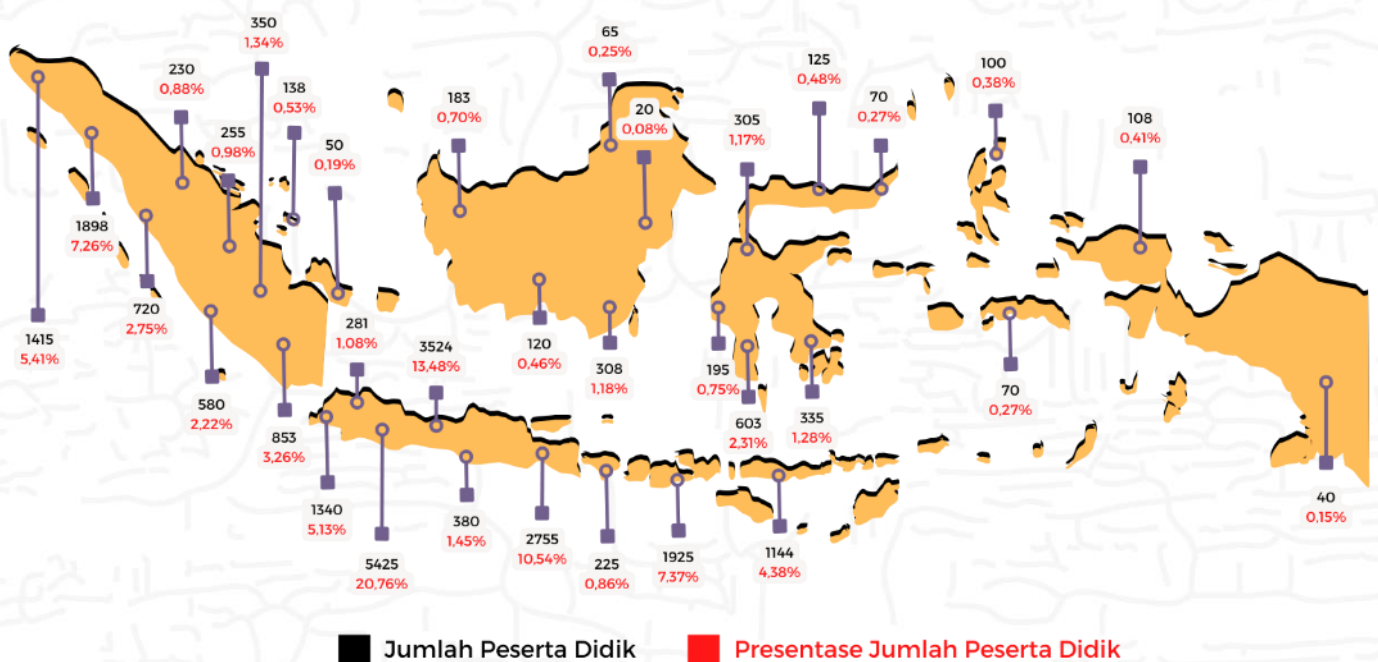


Berdasarkan gambar di atas, terlihat jumlah dan presentase lembaga penyelenggara terbanyak pertama berasal yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 20,79%, kedua adalah Provinsi Jawa Timur sebanyak 13,56%, dan ketiga adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,69%.

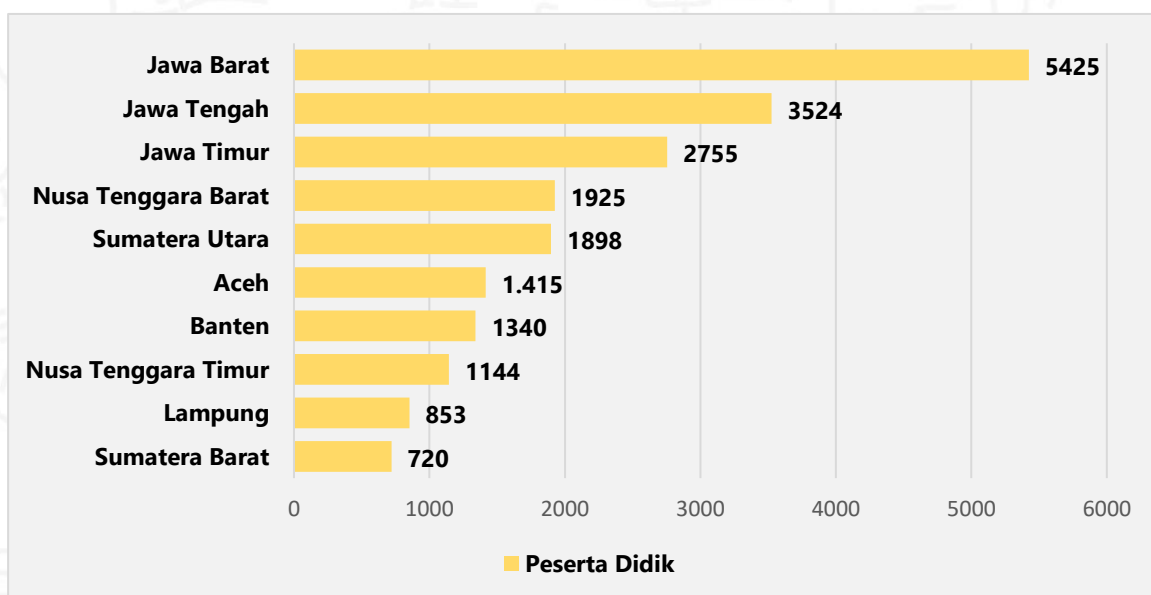
### Peserta Didik Program PKW

Peserta didik program PKW tahun 2023 berjumlah 26.135 orang (sesuai dengan SK) yang sebaran berdasarkan provinsi dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.

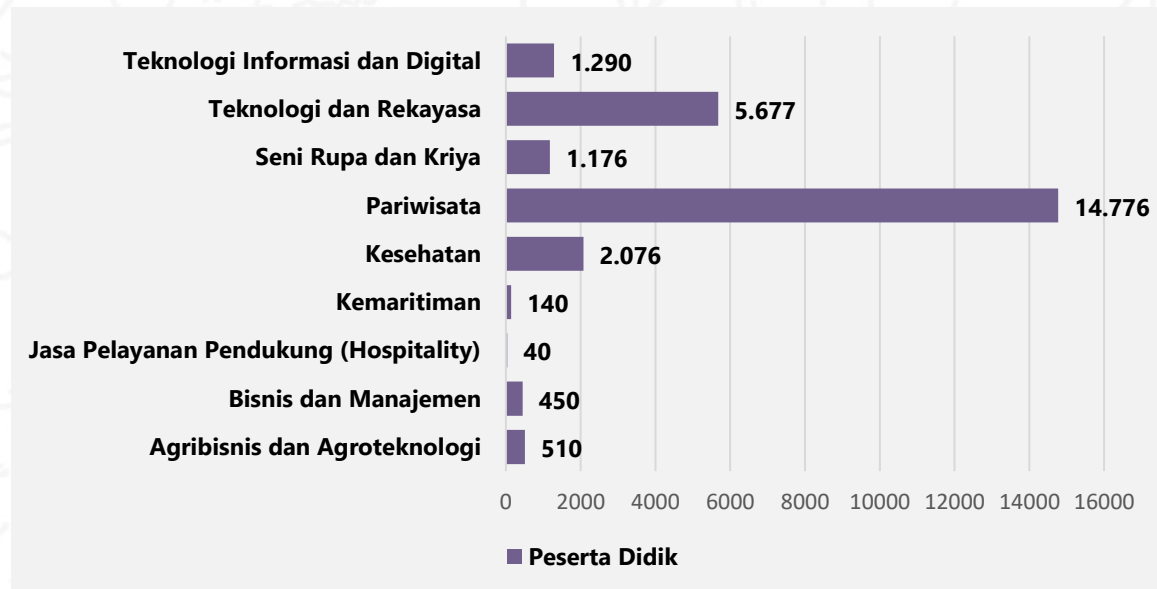
**Peta Sebaran Peserta Didik PKW Berdasarkan Provinsi**



**10 Provinsi dengan Peserta Didik Program PKW Terbanyak**

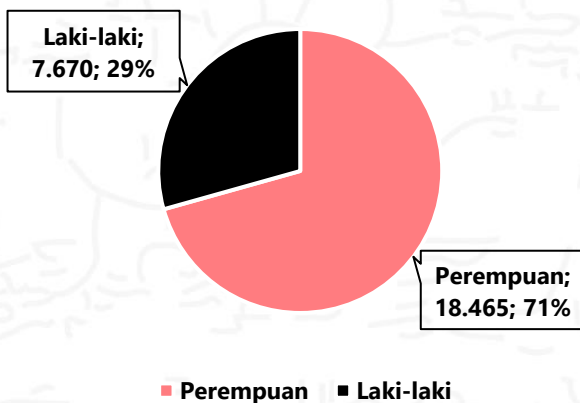


Berdasarkan gambar dan grafik di atas, terlihat jumlah dan presentase peserta didik terbanyak pertama yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 20,76% dengan peserta didik sebanyak 5.425 orang, kedua Provinsi Jawa Tengah sebanyak 13,48% dengan peserta didik sebanyak 3.524 orang, ketiga Provinsi Jawa Timur 10,54% dengan peserta didik sebanyak 2.755 orang, selanjutnya diikuti oleh NTB, Sumatera Utara, Aceh, Banten, NTT, Lampung, dan Sumatera Barat. Data ini mencerminkan bahwa peserta didik yang mendapatkan bantuan program PKW masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.



**Peserta Didik PKW Terbanyak berdasarkan Rumpun Keterampilan**

**Peserta Didik berdasarkan Jenis Kelamin**



Dari 26.135 orang peserta didik yang mengikuti program PKW tahun 2023, sebagian besar adalah perempuan yaitu mencapai 70,65% atau sebanyak **18.465** orang. Sedangkan peserta didik laki-laki hanya sebesar 29,35% atau **7.670** orang. Data ini memperlihatkan program PKW tahun 2023 cenderung diminati perempuan dibanding laki-laki. Selain itu, dari total 9

rumpun keterampilan yang ada dalam program PKW dapat dilihat melalui grafik di atas, bahwa pariwisata menjadi rumpun keterampilan yang paling diminati dengan peserta didik mencapai 56,54% atau 14.776 orang. Jenis-jenis keterampilan pada rumpun pariwisata ini

diantaranya jasa usaha makanan, pastry dan bakeri, tata busana, tata rias pengantin, barista, tenun, dan batik.

Di posisi kedua rumpun keterampilan yang diminati adalah teknologi dan rekayasa dengan peserta didik sebesar 21.72% atau sejumlah 5.677 orang. Rumpun keterampilan teknologi dan rekayasa mencakup jenis keterampilan seperti desain grafis, mekanik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, perbaikan pendingin dan tata udara, perbaikan telepon seluler, elektronika dasar (servis komputer, tv, kipas angin), mengelas dengan las busur manual, meubeler, car body painting, car body repair/ perbaikan bodi kendaraan. dan sablon.

### Hasil Program PKW Tahun 2023

Tujuan penyelenggaraan program pendidikan kecakapan wirausaha adalah peserta didik yang telah mengikuti pelatihan selanjutnya akan merintis usaha yang sesuai dengan minat dan keterampilan yang diajarkan selama mengikuti program pelatihan PKW.

NO.	PROVINSI	JUMLAH PESERTA DIDIK	MERINTIS USAHA	% PESERTA MERINTIS USAHA	BELUM MERINTIS USAHA	% PESERTA BELUM MERINTIS USAHA
1	Aceh	1,415	1261	89.12%	154	10.88%
2	Bali	225	225	100.00%	0	0.00%
3	Banten	1,340	1169	87.24%	171	12.76%
4	Bengkulu	580	541	93.28%	39	6.72%
5	D.I. Yogyakarta	380	380	100.00%	0	0.00%
6	D.K.I. Jakarta	281	256	91.10%	25	8.90%
7	Gorontalo	125	102	81.60%	23	18.40%
8	Jambi	255	195	76.47%	60	23.53%
9	Jawa Barat	5,425	4037	74.41%	1388	25.59%
10	Jawa Tengah	3,524	3298	93.59%	226	6.41%
11	Jawa Timur	2,755	2344	85.08%	411	14.92%
12	Kalimantan Barat	183	166	90.71%	17	9.29%
13	Kalimantan Selatan	308	277	89.94%	31	10.06%
14	Kalimantan Tengah	120	56	46.67%	64	53.33%
15	Kalimantan Timur	20	0	0.00%	20	100.00%
16	Kalimantan Utara	65	45	69.23%	20	30.77%
17	Kepulauan Bangka Belitung	50	0	0.00%	50	100.00%
18	Kepulauan Riau	138	35	25.36%	103	74.64%
19	Lampung	853	805	94.37%	48	5.63%
20	Maluku	70	45	64.29%	25	35.71%

NO.	PROVINSI	JUMLAH PESERTA DIDIK	MERINTIS USAHA	% PESERTA MERINTIS USAHA	BELUM MERINTIS USAHA	% PESERTA BELUM MERINTIS USAHA
21	Maluku Utara	100	0	0.00%	100	100.00%
22	Nusa Tenggara Barat	1,925	1746	90.70%	179	9.30%
23	Nusa Tenggara Timur	1,144	542	47.38%	602	52.62%
24	Papua	40	32	80.00%	8	20.00%
25	Papua Barat	108	12	11.11%	96	88.89%
26	Riau	230	224	97.39%	6	2.61%
27	Sulawesi Barat	195	177	90.77%	18	9.23%
28	Sulawesi Selatan	603	575	95.36%	28	4.64%
29	Sulawesi Tengah	305	284	93.11%	21	6.89%
30	Sulawesi Tenggara	335	290	86.57%	45	13.43%
31	Sulawesi Utara	70	63	90.00%	7	10.00%
32	Sumatera Barat	720	550	76.39%	170	23.61%
33	Sumatera Selatan	350	324	92.57%	26	7.43%
34	Sumatera Utara	1,898	1708	89.99%	190	10.01%
	<b>Grand Total</b>	<b>26,135</b>	<b>21,764</b>	<b>83.28%</b>	<b>4,371</b>	<b>16.72%</b>

### Lulusan PKW yang Sudah Merintis Usaha (Data Per 25/01/24)

Angka dalam tabel diatas menunjukkan bahwa 83,28% atau 21.764 peserta didik yang telah menyelesaikan pembelajaran dan menerima alat dan bahan rintisan usaha dinyatakan sudah memulai rintisan usaha, sehingga salah satu indikator keberhasilan program PKW yaitu "Minimal 60% lulusan dapat merintis usaha dalam waktu 12 bulan setelah mengikuti Program PKW", sudah terpenuhi. Data lulusan yang merintis usaha ini akan terus bertambah setiap harinya dan akan dihitung serta ditelusuri sampai 1 tahun setelah kelulusan.

### Dokumentasi Program PKW Tahun 2023





# Hambatan/Kendala

1

Terdapat lembaga kursus dan pelatihan di beberapa kabupaten/kota yang belum mengetahui program PKW

2

Peserta didik usia 15 s.d. 25 tahun masih berstatus mengikuti pendidikan formal, meskipun sudah lulus dari pendidikan formal

3

Dalam pelaksanaan, pimpinan lembaga menyerahkan tanggung jawab pelaporan pembelajaran dan administrasi keuangan kepada operator aplikasi

4

Masih adanya instruktur yang belum memiliki sertifikat kompetensi

5

Lembaga tidak melakukan *up skilling* terhadap instruktur yang dimiliki

6

Lembaga tidak melakukan pendampingan kepada lulusan peserta didik pada saat pelaksanaan rintisan usaha

# Strategi/Tindak Lanjut

1

Mengundang Dinas Pendidikan Kab/Kota, Mitra Usaha pada saat acara launching/sosialisasi program PKW

2

Melapor kepada pihak sekolah untuk segera mengupdate data lulusan

3

Mengikutsertakan operator pada saat pelaksanaan bimbingan teknis

4

Menginformasikan kepada lembaga untuk mengikuti pelatihan kepada instruktur untuk memperoleh sertifikat kompetensi

5

Bekerjasama dengan DUDIKA dalam hal pelatihan pengembangan up skilling

6

Mengikuti program magang mahasiswa dan mengarahkan kepada lembaga untuk bekerjasama dengan UMKM untuk melaksanakan pendampingan

# Inovasi

1

Melakukan pendampingan rintisan usaha melalui program magang mahasiswa

2

Ditsuslat melakukan kerjasama dengan Kemenkop dengan tujuan lembaga - lembaga kursus dan pelatihan di Kab/Kota dapat menggunakan fasilitas PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) yang di miliki oleh Kemenkop di daerah untuk tempat pelatihan dan juga pendampingan rintisan usaha

## Dokumentasi Peserta Didik PKW Tahun 2023



# 3

## Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah yang mendapatkan Bantuan UJK

Pada tahun 2023 melalui skema padanan anggaran. Direktorat Kursus dan Pelatihan memberikan Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Uji Kompetensi (UJK) kepada 4.495 peserta didik anak usia sekolah tidak sekolah. Bantuan UJK ini adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk

<b>Target 2023</b>
<b>4.495 Orang</b>
<b>Realisasi 2023</b>
<b>4.495 Orang</b>

mengikuti uji kompetensi setelah menuntaskan pembelajaran di lembaga kursus dan pelatihan dengan biaya mandiri atau dari sponsor baik dari instansi pemerintah maupun swasta.

Dana bantuan penyelenggaraan uji kompetensi seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Beberapa dari lembaga kursus dan pelatihan yang telah mengakses program baik PKK maupun PKW juga menerima peserta didik secara mandiri. Hal inilah yang ingin didorong oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam rangka menstimulus lebih banyak partisipasi ATS untuk mengikuti kursus dan pelatihan di lembaga yang sudah terbukti menghasilkan output baik sehingga lulusannya dapat bekerja di DUDIKA.

Realisasi bantuan UJK yang mendukung ketercapaian pada IKK 1.1 ini dihitung berdasarkan beberapa kriteria tertentu yang selaras dengan kriteria pada program PKK yaitu usia ATS 17 s.d. 25 tahun. Adapun rincian capaiannya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

NO	JENIS KETERAMPILAN	JUMLAH PESERTA (17-25 THN)
1	Baby Sitter	15
2	Barista	85
3	Bordir Manual	103

NO	JENIS KETERAMPILAN	JUMLAH PESERTA (17-25 THN)
4	Jasa Usaha Makanan	31
5	Kamerawan TV	149
6	Membatik : Pembuatan Batik dengan Pewarna Sintesis	20
7	Membatik : Pembuatan Batik Tulis dan Cap dengan Pewarna Sintesis/Pewarna Lingkungan	155
8	Otomotif Teknik Sepeda Motor	42
9	Pastry & Bakery : Cake Decoration	25
10	Pastry & Bakery : Pastry Continental	22
11	Pekarya Kesehatan	129
12	Penyiar Berita Televisi	254
13	Perhotelan	2679
14	Pijat Pengobatan Refleksi	42
15	Pijat Urut Tradisional Indonesia : Pemijat tradisional kebugaran	18
16	Sekretaris	95
17	Sulam	74
18	Tata Rias Pengantin	96
19	Teknik Akuntansi	73
20	Video Editing	388
	<b>TOTAL</b>	<b>4495</b>

### Penerima Bantuan UJK Usia 17-25 Tahun berdasarkan Jenis Keterampilan

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa perhotelan menjadi jenis keterampilan yang paling banyak diminati peserta uji kompetensi dengan total peserta penerima bantuan sebanyak 2.679 orang.





## SASARAN KEGIATAN 2

### Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Sasaran Kegiatan meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lewat pendidikan kursus dan pelatihan yang memenuhi kualifikasi dan juga tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.

Pada tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan dapat menjangkau 1.261 lembaga kursus dan pelatihan dalam berpartisipasi melalui program-program Direktorat Kursus dan Pelatihan yang bertujuan untuk menyelaraskan pendidikan kursus dan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan yakni jumlah satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

### Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1

**Jumlah satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja**



Pada Indikator Kinerja Kegiatan - Jumlah satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lembaga Kursus dan

Pelatihan dikatakan sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja apabila memenuhi antara lain,

1. Menyusun dan menerapkan SKL dan kurikulum berbasis dunia kerja di lembaga kursus dan pelatihan;
2. Menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan *Project Based Learning* (PjBL);
3. Menyusun dan menggunakan bahan ajar (luring dan daring) mengacu pada SKL dan kurikulum yang dikembangkan berbasis dunia kerja untuk mendukung pembelajaran daring;
4. Memiliki unit usaha sebagai *teaching factory*;
5. Telah mengikuti penilaian kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan;
6. Instruktur dan Pengelola LKP magang di dunia kerja;
7. Penguji dan Pengelola UJK kursus dan pelatihan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan uji kompetensi;
8. Memfasilitasi lulusan, instruktur, dan pengelola melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
9. Melaksanakan fungsi-fungsi atau memiliki unit pusat pengembangan karier;
10. Siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/Perguruan Tinggi Vokasi; dan
11. Menerima bantuan uji kompetensi

## METODE PERHITUNGAN

$$L = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K$$

Keterangan

- **L** : Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja
- **A** : Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menyelenggarakan *Project Based Learning* (PjBL) yaitu model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk yang diselenggarakan oleh LKP
- **B** : Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring, yaitu sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung namun dilakukan secara *online* menggunakan internet yang diselenggarakan oleh LKP
- **C** : Jumlah LKP yang memiliki unit usaha sebagai *teaching factory*. Ini bertujuan untuk mendapatkan model pembelajaran praktek kerja lapangan di LKP yang dapat memastikan kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik yang nantinya akan bekerja atau berwirausaha agar selaras dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja



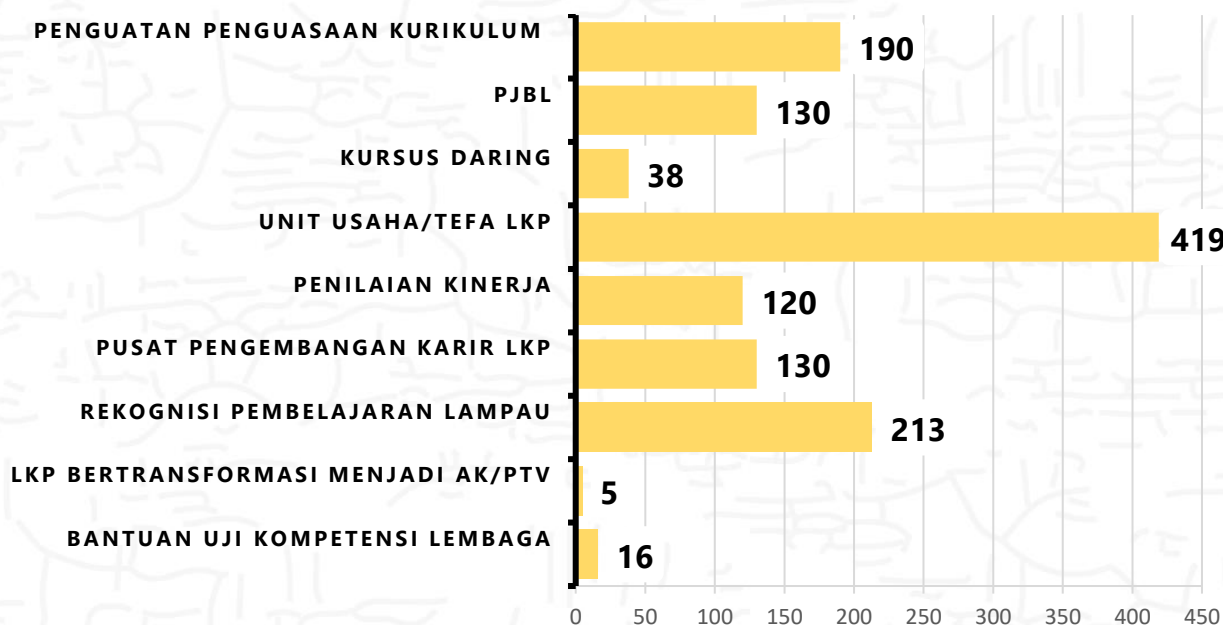
- **D** : Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga, yaitu kegiatan untuk mengukur dan menetapkan tingkat capaian kinerja satuan LKP yang meliputi aspek kinerja pemasaran, aspek kinerja SDM, aspek kinerja operasional dan pelaksanaan pembelajaran, serta aspek kinerja keuangan dalam menerapkan prinsip *Link and Match 8+i* Satuan Pendidikan dengan Dunia Kerja serta manajemen pengelolaan program kursusnya. Prinsip *Link and Match 8+i* meliputi aspek: (a) kurikulum berbasis dunia kerja, (b) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dunia kerja, (c) sarana pembelajaran pembelajaran berstandar dunia kerja, (d) pembelajaran berbasis proyek, (e) peserta didik magang di dunia kerja, (f) pengelolaan unit usaha sebagai *teaching factory*, (g) evaluasi peserta didik sesuai kecakapan kerja yang dibutuhkan dunia kerja, (h) komitmen penyerapan lulusan oleh dunia kerja, (i) kerja sama lainnya antara LKP dengan lembaga dunia kerja mitranya dalam meningkatkan mutu pengelolaan program kursus
- **E** : Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja, yaitu instruktur dan pengelola LKP lembaga kursus dan pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya di dunia kerja dalam menggunakan teknologi dan inovasi terbaru
- **F** : Jumlah pengujian kompetensi kursus dan pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya
- **G** : Jumlah pengelola uji kompetensi kursus dan pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya
- **H** : Jumlah LKP yang menyelenggarakan rintisan program Pengakuan Pembelajaran Lampau (PPL) kerjasama dengan perguruan tinggi
- **I** : Jumlah LKP yang mempunyai Pusat Pengembangan Karier, yaitu unit pelaksana di LKP yang melakukan kegiatan/memberikan layanan bagi peserta didik dan lulusan berupa informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyaluran dan penempatan kerja. Selain itu juga berfungsi meningkatkan pemahaman dunia kerja terhadap kemampuan/kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang sesuai jenis pekerjaan/posisi jabatan yang tersedia di dunia kerja, serta untuk pencapaian target persentase lulusan yang bekerja pada tahun kelulusan
- **J** : Jumlah LKP yang bertransformasi menjadi Akademi Komunitas (AK)/ Perguruan Tinggi Vokasi (PTV), yaitu jumlah minimal LKP diberikan pendampingan untuk dapat mengajukan usulan pendirian AK/PTV. LKP calon pengusul yang akan diberikan pendampingan dikurasi terlebih dahulu berdasarkan kriteria tertentu melalui survei elektronik dari LKP: - Alumni Program Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia LKP Berbasis Industri (PPKSDM LKP BI), - Sasaran Penilaian Kinerja LKP berbasis industri, pengakses bantuan pemerintah PKK ,PKW, dan Teaching Factory - LKP yang dianggap unggul dan memenuhi kriteria.
- **K** : Jumlah LSK yang menerima bantuan uji kompetensi.
- **Satuan** : Lembaga
- **Tipe Penghitungan** : Nonkumulatif
- **Unit Kerja** : Direktorat Kursus dan Pelatihan
- **Sumber Data** : Direktorat Kursus dan Pelatihan (SIMANTAP), DAPODIK
- **Periode Pengumpulan Data** : Tahunan



### Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023



### CAPAIAN IKK 2.1 TAHUN 2023



Pada tahun 2023 telah terealisasi jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebanyak **1.261 lembaga**. Hasil ini melampaui target awal yaitu 1.020 lembaga atau persentase capaian pada IKK ini di tahun 2023 adalah **123,62%**.

Melihat berdasarkan capaian di tahun 2022, terjadi penurunan capaian sebanyak **12 lembaga**. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2024 sebanyak **2.430 lembaga** maka realisasi tahun 2023 adalah sebesar **51,89% dari target renstra tersebut**. Realisasi IKK yang melebihi dari target dikarenakan dalam pelaksanaannya didukung oleh sembilan output utama dan empat output pendukung dari beberapa program yaitu:

- a) Penyusunan SKL, Kurikulum dan Bahan Ajar sesuai dengan kebutuhan IDUKA terealisasi sebanyak 20 dokumen (pendukung);
- b) Penguatan penguasaan Kurikulum dalam Penerapan Pembelajaran Kursus dan Pelatihan terealisasi sebanyak 190 lembaga (utama);
- c) Satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menyelenggarakan Project Based Learning (PJBL) terealisasi sebanyak 130 lembaga (utama);
- d) LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring terealisasi sebanyak 38 lembaga (utama);
- e) LKP yang menyelenggarakan unit usaha/TEFA terealisasi sebanyak 419 lembaga (utama);
- f) Penilaian Kinerja Lembaga terealisasi sebanyak 120 lembaga (utama);
- g) Permagangan Instruktur dan Pengelola LKP di Dunia Kerja terealisasi sebanyak 30 orang (pendukung);
- h) Peningkatan Kompetensi Penguji Uji Kompetensi terealisasi sebanyak 55 orang (pendukung);
- i) Peningkatan Kompetensi Pengelola Uji Kompetensi terealisasi sebanyak 40 orang (pendukung);
- j) Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Karier di LKP terealisasi sebanyak 130 lembaga (utama);
- k) LKP yang Menyelenggarakan Program RPL dengan Perguruan Tinggi terealisasi sebanyak 213 lembaga (utama);
- l) LKP yang siap bertransformasi menjad Akademi Komunitas/Perguruan Tinggi Vokasi terealisasi sebanyak 5 lembaga (utama); dan
- m) Bantuan Uji Kompetensi lembaga terealisasi sebanyak 16 lembaga (utama).

Adapun sebaran lembaga kursus dan pelatihan yang telah berhasil diintervensi melalui program yang ada di Direktorat Kursus dan Pelatihan sampai tahun 2023 jika dilihat berdasarkan provinsi di Indonesia secara lebih rinci dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Provinsi	Total Lembaga	PK-LKP	Lulusan Berwirausaha	Lulusan Magang	Lulusan Bekerja	Kurikulum disusun bersama dunia kerja	PJBL	Magang Instruktur	Instruktur Dunia Kerja Mengajar di LKP	Magang Pengelola	TEFA
Prop. Aceh	269	1	3079	1654	3657	314	51	11	166	15	102
Prop. Bali	61	11	630	557	1468	72	30	3	76	3	18
Prop. Bangka Belitung	7	1	28	52	41	9	0	0	15	0	0
Prop. Banten	179	3	2879	667	1887	221	18	15	154	8	98
Prop. Bengkulu	100	2	1512	276	1077	134	20	18	118	12	53
Prop. D.I. Yogyakarta	57	2	1271	383	472	78	23	12	68	7	30
Prop. D.K.I. Jakarta	47	2	713	199	521	56	12	5	36	8	18
Prop. Gorontalo	19	0	137	107	141	25	4	1	29	1	1
Prop. Jambi	71	1	566	320	1497	80	16	5	69	6	16
Prop. Jawa Barat	916	93	12291	4762	12899	1124	128	281	821	52	233
Prop. Jawa Tengah	503	41	9422	2237	13447	646	145	54	608	66	241
Prop. Jawa Timur	689	63	6526	4108	12028	910	119	69	657	53	127
Prop. Kalimantan Barat	39	1	454	207	492	48	8	6	33	9	6
Prop. Kalimantan Selatan	88	3	1203	595	624	111	8	6	43	9	21
Prop. Kalimantan Tengah	31	2	289	117	311	40	6	2	31	0	12
Prop. Kalimantan Timur	27	0	73	222	325	34	0	0	9	0	1
Prop. Kalimantan Utara	7	0	120	61	6	9	2	0	11	0	21
Prop. Kepulauan Riau	14	1	109	74	191	16	2	0	25	0	1
Prop. Lampung	164	5	2438	846	1477	201	35	7	139	3	50
Prop. Maluku	8	0	102	78	45	14	1	0	19	0	1
Prop. Maluku Utara	5	0	0	9	9	6	0	1	5	0	0
Prop. Nusa Tenggara Barat	231	4	4654	966	1494	291	30	10	299	11	103
Prop. Nusa Tenggara Timur	57	1	1951	237	380	66	7	7	134	3	33
Prop. Papua	4	0	72	23	38	4	1	1	2	0	1
Prop. Papua Barat	6	0	47	20	0	7	1	1	14	1	4
Prop. Riau	61	1	604	728	967	80	8	0	39	2	28
Prop. Sulawesi Barat	56	0	545	164	319	67	7	2	32	17	9
Prop. Sulawesi Selatan	204	15	1860	1325	2643	242	40	12	89	7	27
Prop. Sulawesi Tengah	40	0	554	151	239	46	2	1	38	1	26
Prop. Sulawesi Tenggara	41	0	604	230	358	53	1	4	44	7	4
Prop. Sulawesi Utara	23	0	185	139	121	29	1	1	11	1	3
Prop. Sumatera Barat	88	6	1399	991	1225	117	20	16	164	3	20
Prop. Sumatera Selatan	105	4	1232	906	2087	141	24	12	186	5	49
Prop. Sumatera Utara	448	34	3877	2680	5499	530	49	20	274	16	78

**Sebaran Lembaga berdasarkan Provinsi yang Berhasil di Intervensi melalui Program-Program Direktorat Kursus dan Pelatihan**



# Kendala/ Masalah

**1**

Belum semua SKL, Kurikulum, dan Bahan Ajar direviu sesuai dengan kebutuhan industri sedangkan alokasi anggaran sangat terbatas untuk melakukan revisi terhadap perubahan tersebut

**2**

Rendahnya motivasi lembaga kursus dan pelatihan untuk menjadi penyelenggara kursus daring

**3**

Kurangnya pemahaman tentang konsep unit usaha/TEFA dan cara mengelola unit usaha/TEFA di LKP

**4**

Terbatasnya kualitas dan kuantitas verifikator dan validator yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan penilaian kinerja LKP

**5**

Terbatasnya jumlah program studi yang selaras dengan bidang keterampilan di LKP, serta biaya kuliah jalur RPL masih belum terjangkau

**6**

Luas lahan 5.000m<sup>2</sup> dan pendidik yang memenuhi kriteria sebagai syarat pendirian Akademi Komunitas/PTV masih sulit untuk dipenuhi

# Langkah Strategi

**1**

**Mendorong organisasi mitra untuk menginisiasi reviu SKL dan kurikulum di bidangnya masing-masing**

**2**

**Memberikan insentif bagi lembaga yang aktif menjadi penyelenggara kursus daring, salah satunya dengan memberikan prioritas untuk mengakses program-program Direktorat Kursus dan Pelatihan**

**3**

**Melakukan penyusunan pedoman unit usaha/TEFA, mensosialisasikan pedoman unit usaha/TEFA bagi LKP, melakukan pendataan terhadap LKP yang memiliki rintisan unit usaha/TEFA, dan melakukan penguatan manajemen unit usaha/TEFA**

**4**

**Peningkatan kualitas dan kuantitas verifikator dan validator melalui bimbingan teknis**

**5**

**Untuk memperluas dan memperbanyak mitra perguruan tinggi penyelenggara program RPL maka perlu dilakukan kegiatan sinkronisasi dengan Perguruan Tinggi yang terdaftar di Sierra khususnya Politeknik Negeri dan LLDIKTI serta untuk pembiayaan dengan menjajaki ketersediaan beasiswa dari LPDP**

**6**

**Mengusulkan revisi Permendikbud No.7 Tahun 2020 khususnya berkaitan dengan luas lahan dan pendidik**

# 1

## Jumlah SKL, Kurikulum dan Bahan Ajar yang Disusun Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja

### A. PENYUSUNAN SKL DAN KURIKULUM



Penyusunan SKL dan Kurikulum dilakukan dalam memenuhi standar materi pembelajaran, pedoman pembelajaran dan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan atau bagi yang belajar mandiri. Penyusunan SKL dan Kurikulum ini dilakukan untuk 10 jenis bidang keterampilan. Bidang tersebut antara lain:



Desain dan  
Teknologi  
Fesyen



Tata Rias  
Pengantin  
Tradisional



Mengemudi  
Angkutan  
Penumpang Bus  
Umum dan Masal



Pijat  
Akupresur



Teknik  
Perbaikan  
Telepon Seluler



Aplikasi  
Perkantoran



Otomotif Teknik  
Kendaraan  
Ringan



Instalasi  
Pemanfaatan  
Tenaga Listrik



Sinshe



Tata Operasi  
Darat

Kegiatan penyusunan SKL dan Kurikulum ini dilakukan dalam tahapan berikut:

## 1. Penetapan Bidang Keterampilan SKL dan Kurikulum

Identifikasi Bidang Keterampilan, dengan pertimbangan sesuai kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, kajian banding (*bench mark*), ilmu atau teknologi baru, dan penjenjangan serta deskripsi KKNl. Identifikasi Tim Penyusun yang merupakan unsur dari:

- 1) Pengurus asosiasi penyelenggara atau organisasi profesi.
- 2) Akademisi.
- 3) Praktisi.
- 4) Dunia Usaha dan Dunia Industri
- 5) Kementerian/Lembaga teknis bidang terkait.
- 6) Direktorat Kursus dan Pelatihan

## 2. Penyusunan dokumen SKL dan Kurikulum

### a) Penyusunan draf SKL dan Kurikulum;

Tim yang sudah ditetapkan menyusun draf SKL sesuai dengan sistematika dan format penyusunan SKL.

### b) Penelaahan (Reviu) draf SKL;

Draf SKL ditelaah oleh tim pembahas yang terdiri atas penyusun dan penelaah. Penelaah SKL dari Dunia Kerja dan penelaah kurikulum dari instruktur LKP dan/atau akademisi bidang keterampilan terkait.

### c) Validasi Draft SKL

Perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan kementerian teknis terkait memvalidasi keterampilan yang dibutuhkan Dunia Kerja.

### d) Uji Publik draf SKL dan Kurikulum

Uji publik bertujuan untuk menguji keterbacaan, keselerasan kompetensi yang dibutuhkan Dunia Kerja, dan tingkat pemahaman pihak terkait terhadap SKL yang disusun. Uji publik dilakukan secara luring dan daring kepada responden yang memenuhi kriteria.

- 1) Uji publik daring dilakukan melalui penyebaran instrumen di berbagai platform media sosial. Sasarannya adalah instruktur dan pengelola LKP, praktisi, dan akademisi.
- 2) Uji publik luring dilakukan di 3 Provinsi (Jawa Barat, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan pertimbangan banyaknya jumlah LKP yang menyelenggarakan bidang terkait.

**e) Finalisasi draf SKL dan Kurikulum**

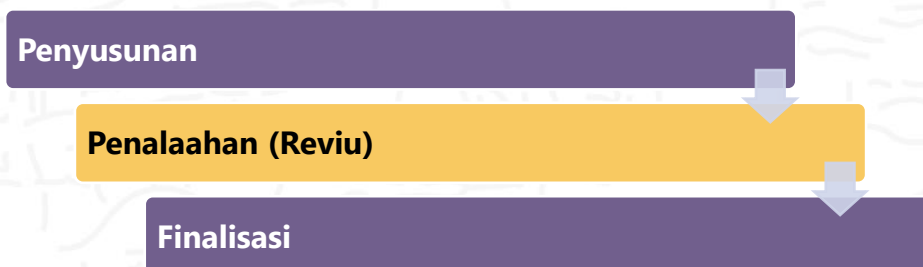
Penyusun melakukan revisi terhadap draf SKL dan kurikulum sesuai masukan dari responden uji publik untuk kemudian difinalkan.

**f) Tindak Lanjut:**

- 1) Penetapan SKL dan Kurikulum oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan;
- 2) Sosialisasi dan Penerapan SKL dan Kurikulum kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan.

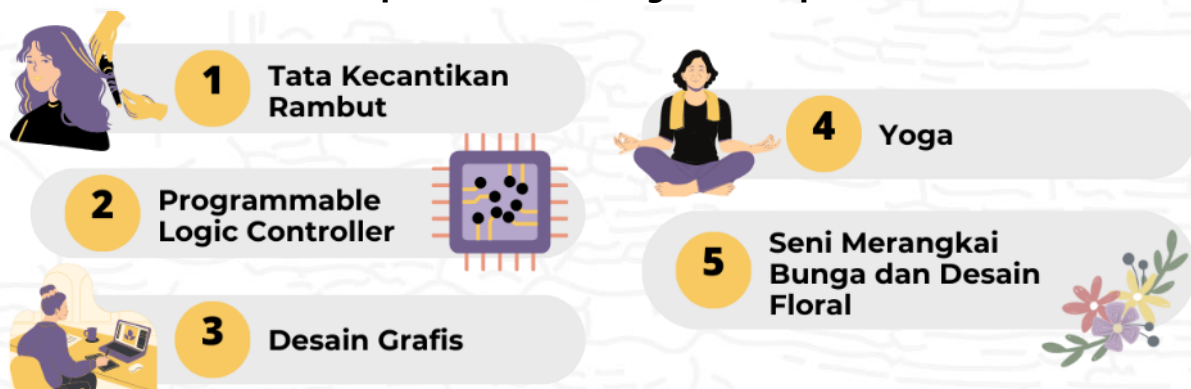
**B. PENYUSUNAN BAHAN AJAR E-MODUL BERDASARKAN SKL**

Kegiatan penyusunan bahan ajar e-modul sesuai SKL dilaksanakan dalam 3 tahapan kegiatan:



Kegiatan penyusunan dimulai dengan pengarahan teknis tentang proses penyusunan e-modul tersebut. E-Modul yang akan disusun terdiri dari 25 bidang keterampilan terbagi menjadi 3 tahap yaitu:

**Tahap 1 untuk 5 bidang keterampilan**





### Tahap 2 untuk 10 bidang keterampilan



### Tahap 3 untuk 10 bidang keterampilan



Kegiatan penyusunan e-modul ini mengundang pihak SEAMOLEC sebagai narasumber untuk mengisi materi pembuatan e-modul. Peserta diberikan pengetahuan dasar tentang struktur e-modul dan teknologi-teknologi untuk membuat e-modul. Selanjutnya, peserta diarahkan untuk mengeksplorasi terlebih dahulu aplikasi yang dipakai dalam penyusunan e-modul. Setelah melakukan eksplorasi peserta menyiapkan aset materi dan pendukung lainnya. Sebelum melakukan penyusunan, peserta membuat kerangka e-modul terlebih dahulu.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan ini adalah karakteristik dari e-modul, tidak hanya mengandalkan teknologi tapi isi dan alur e-modul jelas dan bisa mengukur kemampuan peserta didik. Adapun teknis pengerjaan e-modul ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan terlebih dahulu kerangka e-modulnya. Setelah kerangka e-modul telah tersusun langkah selanjutnya adalah penyusun melakukan kompilasi materi dan aset pendukung lainnya untuk disusun ke dalam halaman e-modul. Dari seluruh rangkaian kegiatan, output dari penyusunan bahan ajar e-modul ini yaitu:



- Tersusunnya bahan ajar e-modul 25 bidang keterampilan

### C. PENYUSUNAN BAHAN AJAR AUDIO VISUAL

Kegiatan penyusunan bahan ajar audio dilakukan dalam 4 tahapan kegiatan yang dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

#### 1. Penyusunan Bahan Ajar (*scripting*)



disampaikan antara lain tentang:

- Orientasi bahan ajar audio visual dan bagaimana spesifikasi bahan ajar audio visual yang ingin dihasilkan
- Teknik pembuatan *script* dan bagaimana menerjemahkan isi SKL kursus dan pelatihan ke dalam bahasa *script* sehingga dimengerti oleh tim produksi. Dalam penyusunan *script* ini tim penyusun didampingi satu per satu untuk mendapatkan detail dari setiap elemen kompetensi yang ingin divisualkan.

## 2. Reviu Hasil Penyusunan Bahan Ajar Audio Visual

Kegiatan ini untuk menelaah script bahan ajar dari sisi pengambilan visual oleh narasumber dan tim. Bahan ajar yang telah disusun oleh penyusun diberikan saran dan masukan oleh narasumber. Kemudian narasumber memberikan pengetahuan dasar dan simulasi pengambilan video berdasarkan script. Narasumber



membimbing para penyusun untuk langsung mengeksekusi scriptnya ke dalam bentuk visual untuk mengetahui kekurangan dan memprediksi kendala-kendala yang muncul pada saat pengambilan gambar yang sesungguhnya. Selanjutnya, penyusun menayangkan draf video ajar dan dicermati oleh narasumber.

## 3. Pendampingan Produksi Bahan Ajar Audio Visual

Pendampingan produksi bahan ajar untuk mengontrol proses produksi bahan ajar berjalan sesuai kesepakatan dan alur yang telah disepakati antara penyusun dan tim produksi.

## 4. Finalisasi Produksi Bahan Ajar Audio Visual

Kegiatan ini diagendakan untuk presentasi dari masing-masing bidang dengan menayangkan satu kesatuan video utuh, disaksikan dan diberikan masukan oleh narasumber bersama tim pokja pembelajaran dan uji kompetensi.

### **D. Penguatan Penguasaan Kurikulum dalam Penerapan Pembelajaran Kursus dan Pelatihan**

**Target 2023**

**132 Lembaga**

**Realisasi 2023**

**190 Lembaga**

Penguatan Penguasaan Kurikulum merupakan rangkaian dari penyusunan Kurikulum Kursus dan Pelatihan dalam pengembangan kurikulum kursus dan pelatihan, dengan harapan lulusan kursus dan pelatihan memiliki pengetahuan, pemahaman

dan keterampilan atau kompetensi dalam bidang keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Adapun tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman kurikulum, terkait dengan isi kurikulum kursus dan pelatihan, mencakup kompetensi, capaian pembelajaran dan materi ajar kurikulum tersebut,
2. Pengembangan kemampuan instruksional: memberikan dukungan dan panduan kepada instruktur kurikulum dan pelatihan dalam merencanakan, mendesain dan memberikan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kurikulum yang ada,
3. Penerapan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kurikulum termasuk dalam penggunaan metode pengajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai,
4. Peningkatan kualitas pembelajaran, membantu peserta didik dalam meningkatkan relevansi dan kualitas pembelajaran, sehingga lulusan kursus dan pelatihan dapat mencapai kompetensi sesuai dengan kebutuhan,
5. Pengukuran hasil belajar peserta kursus dan pelatihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan,
6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran, mendorong penggunaan metode, alat dan teknis yang sesuai
7. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran khususnya dalam menerapkan kurikulum di satuan pendidikan.



Pada tahun 2023, kegiatan penguatan penguasaan kurikulum dalam penerapan pembelajaran kursus dan pelatihan ini telah dilaksanakan dan berhasil melibatkan partisipasi sebanyak 190 lembaga. Dalam mencapai capaian tersebut, pelaksanaan

kegiatan ini dilakukan di 2 lokasi yaitu di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

## Hambatan/Kendala

1

Penyusun butuh waktu dalam penyesuaian pemahaman terkait penambahan dan perubahan format SKL dan kurikulum

2

Perbedaan pemahaman antara reviewer dan penyusun terkait dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri terkini

3

Belum selarasnya kecepatan kebutuhan dunia kerja dengan penyiapan kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan

4

Kemampuan literasi digital penyusun bahan ajar audio visual dan e-modul yang beragam

## Strategi/Tindak Lanjut

1

Melakukan pendampingan untuk memastikan kesesuaian dengan pedoman terbaru

2

Melakukan *workshop online* sebelum penyusunan bahan ajar dan melibatkan tim IT dari masing-masing lembaga sebagai *supporting* dalam penyusunan bahan ajar

# Inovasi



1

Melibatkan penelaah (*Reviewer*) dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan memperbanyak dari perguruan tinggi dan Kementerian Teknis terkait, seperti:

- PPSDM Kemenhub (bidang mengemudi angkutan umum)
- PPSDM ESDM (bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik)
- Kemenparekraf (bidang desain fesyen dan tata rias pengantin)
- Kemenkes (bidang akupresur dan sinthe)

2

Bahan ajar audio visual dibuat dengan gaya penyajian yang lebih detail, pengambilan sudut gambar yang tidak hanya pada 1-2 sisi, *voice over* dan deskripsi pada komponen yang ringkas dan jelas, dengan tatanan suasana yang disesuaikan dengan atmosfer dari masing-masing bidang keterampilan

2

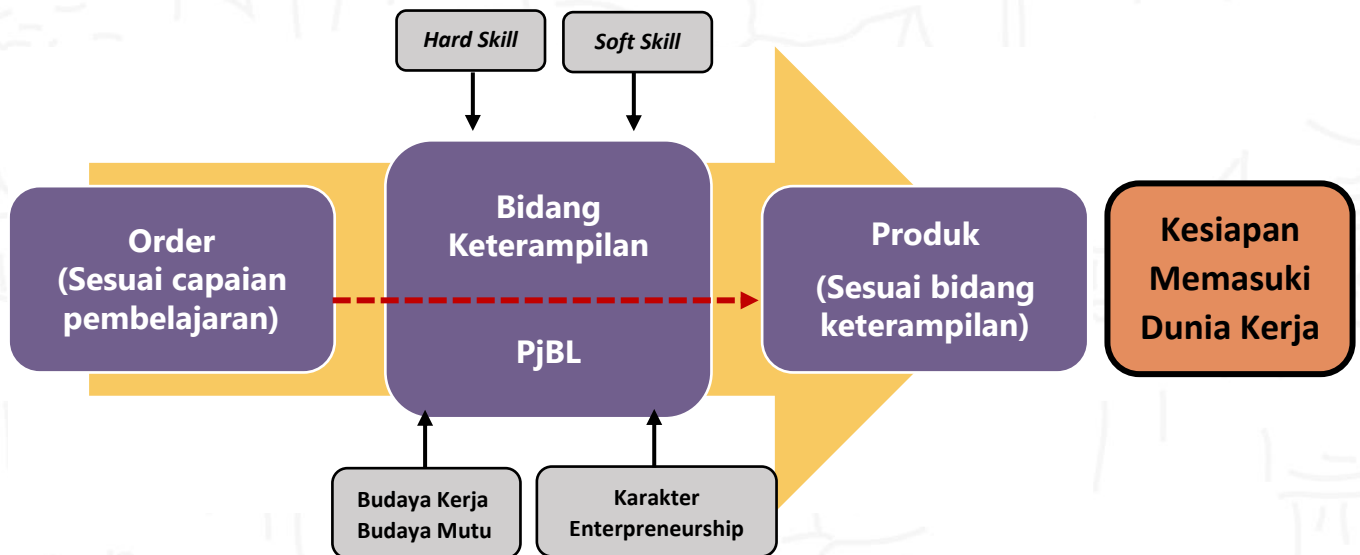
## Jumlah LKP yang menerapkan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL)

Salah satu pemenuhan standar penjaminan mutu pendidikan di LKP yang mengacu pada paradigma 8+i *Link and Match* adalah melalui penerepan pembelajaran berbasis proyek supaya peserta didik terbiasa dengan dinamika yang terjadi di dunia kerja, dari mulai penyiapan produksi, proses produksi, sampai dengan evaluasi mutu produk dan kepuasan pelanggan.

**Target 2023**
**130 Lembaga**
**Realisasi 2023**
**130 Lembaga**

Pada tahun 2023, telah disusun Pedoman Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) pada Lembaga Kursus dan Pelatihan serta sebanyak 30 LKP berpartisipasi untuk menjadi pelaksana dalam program ini yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Selain itu, telah dilakukan pengimbasan

program PjBL kepada 100 LKP yang memiliki potensi untuk menyelenggarakan PjBL di lembaganya. Adapun sasaran di tahun 2023 diutamakan adalah LKP yang melaksanakan Bantuan Pemerintah Program Kecakapan Wirausaha (PKW). Skema penerapan pembelajaran berbasis proyek di LKP dapat dipahami pada diagram berikut.



Penerapan pembelajaran berbasis proyek di LKP dimulai dengan terperolehnya order produk/jasa dari dunia kerja yang sesuai dengan bidang keterampilan di LKP. Order tersebut kemudian dijadikan sebagai penugasan untuk dilakukan oleh peserta didik secara kolaborasi di bawah dampingan dan monitoring dari instruktur dengan melibatkan pemberi order/konsumen dari dunia kerja untuk menjaga mutu produk/jasa yang akan dikreasikan.

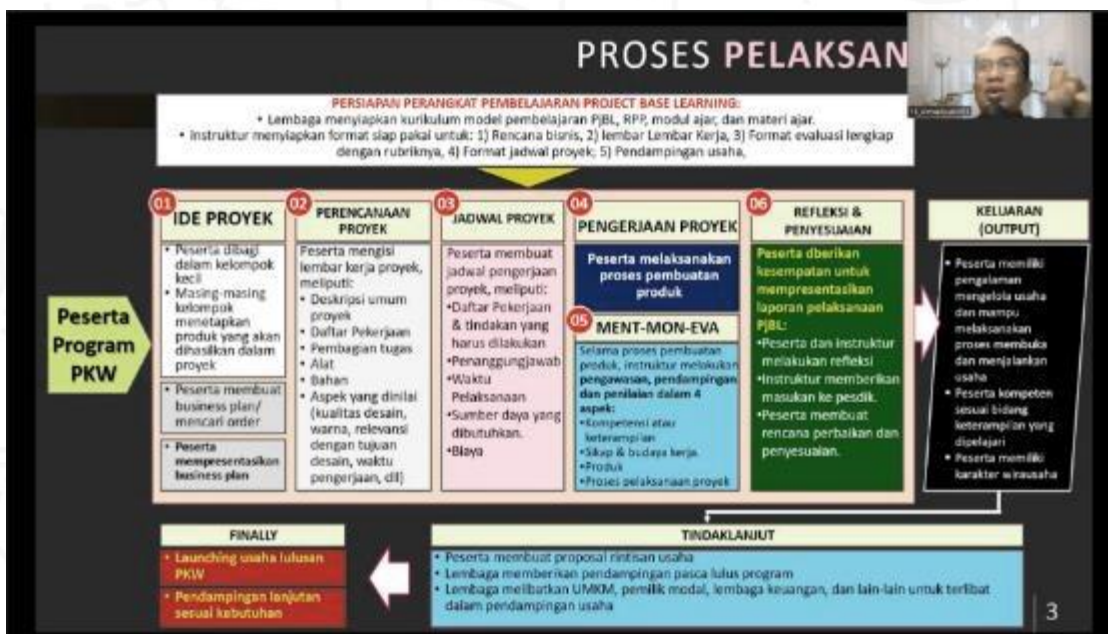
Pada saat pelaksanaan pembuatan produk/jasa instruktur dan peserta didik terlibat interaksi dan kerja sama untuk mengoptimalkan bahan dan peralatan, serta praktik penguasaan teknis yang bersifat hard skill. Selain itu, dari awal pengerjaan proyek peserta didik dilibatkan dalam proses berpikir kritis dan kreatif untuk menuangkan ide/gagasan mendesain produk/jasa, serta mengomunikasikan permasalahan dan solusi untuk meningkatkan mutu proses atau hasil akhir dari produk/jasa yang dikerjakan. Melalui penerapan pembelajaran berbasis proyek juga peserta didik di LKP mulai dikenalkan dengan dinamika keprofesian dan standar di dunia kerja, sehingga mereka sudah mulai, mengenal dan memahami budaya kerja sehingga terjadi pengembangan karakter pada diri peserta didik. Diharapkan melalui penerapan PjBL ini peserta didik akan mempunyai kesiapan untuk berprofesi di dunia kerja atau berwirausaha.

Adapun beberapa syarat penerapan PjBL di LKP adalah sebagai berikut:

- LKP**
- Memiliki sarana pendukung penyelenggaraan PJBL (milik atau kerjasama)
  - Memiliki mitra dari dunia kerja untuk menyelenggarakan PJBL

- Instruktur**
- Memiliki kompetensi yang mendukung sesuai jenis proyek yang dilaksanakan
  - Mampu menyiapkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahapan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek
  - Mampu menyediakan bahan belajar (teks, video, audio) untuk mendukung capaian pembelajaran yang ditetapkan
  - Peserta didik memiliki kemampuan dasar untuk melaksanakan setiap proyek yang disepakati

### Dokumentasi Pelaksanaan Program PjBL





# Hambatan/Kendala

1

Sebagian besar pengelola dan instruktur LKP belum memahami PjBL

2

Pendampingan PjBL masih terbatas pada penyelenggaraan program PKW platinum

3

Terbatasnya durasi pembelajaran kursus dan pelatihan, sehingga PjBL tidak bisa diterapkan

4

Keterbatasan anggaran sehingga Sebagian besar LKP sasaran masih terpusat di pulau jawa

# Strategi/Tindak Lanjut

1

Melakukan bimbingan teknis kepada pengelola dan instruktur mengenai pendekatan PjBL

2

Memperluas sasaran pendampingan tidak terbatas pada LKP penyelenggara program PKW platinum

3

Menyusun daftar LKP sasaran prioritas pendampingan pendekatan PjBL

# Inovasi



1

Database Lembaga yang dijadikan sebagai piloting/percontohan pada aplikasi SIMANTAP agar dapat dilakukan evaluasi dan pendampingan secara berkesinambungan

2

Membuat video tutorial/*best practices* dari beberapa LKP yang sudah dapat melaksanakan PjBL secara baik sesuai dengan 6 sintak pada pedoman dan disebarakan ke media sosial dan kanal resmi Kemdikburistek

3

## Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring

Pelaksanaan program pendidikan vokasi pada lembaga kursus dan pelatihan telah menjadi bagian utama dalam program dan kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Berbeda dengan pendidikan vokasi pada jalur formal, pendidikan vokasi pada jalur nonformal di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) diselenggarakan dengan prinsip antara lain:

Fleksibel	Praktis	Fungsional
lebih leluasa dalam aspek penggunaan waktu, tempat, dan program pembelajaran	ditujukan untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat, industri dan dunia kerja dalam jangka pendek	peserta didik merasakan langsung manfaat dari hasil kegiatan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan

Penyelenggaraan pendidikan vokasi di LKP harus juga memperhatikan dan menerapkan perkembangan teknologi apalagi di era disrupsi digital (*digital disruption*) sekarang ini. Pada era ini terjadi perubahan yang sangat cepat dan fundamental termasuk perubahan di bidang pendidikan. Era ini menuntut para pelaku bisnis di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan untuk segera melakukan perubahan jika tidak mau tergerus fenomena disrupsi. Inovasi pembelajaran pada LKP melalui kursus daring sudah merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan diselenggarakannya kursus daring ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh baik untuk peserta didik maupun bagi LKP.

LKP	Peserta Didik
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperluas pasar</li> <li>• Dapat dilakukan secara massal</li> <li>• Meningkatkan citra lembaga</li> <li>• Memperkecil biaya operasional</li> <li>• Memperluas jaringan kemitraan</li> <li>• Pengembangan diri instruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleksibel</li> <li>• Hemat biaya</li> <li>• Media pembelajaran lebih bervariasi</li> <li>• Banyak sumber referensi</li> <li>• Memudahkan komunikasi</li> <li>• Informasi cepat</li> </ul>

Dengan berbagai keuntungan penyelenggaraan kursus daring tersebut maka diharapkan LKP dapat menyajikan alternatif penyelenggaraan kursus, tidak hanya bertumpu pada pembelajaran konvensional tetapi mulai beralih untuk menyelenggarakan kursus secara daring.

<b>Target 2023</b>
<b>38 Lembaga</b>
<b>Realisasi 2023</b>
<b>38 Lembaga</b>

Pada tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan pendampingan untuk penyelenggaraan kursus daring di LKP lewat kegiatan bimbingan teknis dengan jumlah lembaga yang berpartisipasi sebagai peserta sebanyak 384 lembaga yang terdiri dari 38 peserta mengikuti

secara luring, dan 346 peserta mengikuti secara daring. Agar pelaksanaan program penyelenggaraan kursus daring ini dapat berjalan sesuai harapan, telah dilaksanakan rangkaian kegiatan pendukung yang meliputi:



## 1. Reviu Pedoman Penyelenggaraan Kursus Daring

### Tujuan

- Mereviu pedoman penyelenggaraan kursus daring dari yang paling sederhana sampai dengan penggunaan LMS (*Learning Management System*)
- Memfinalkan pedoman penyelenggaraan kursus daring dari yang paling sederhana sampai dengan penggunaan LMS (*Learning Management System*)
- Memfinalkan pemetaan LKP yang akan dijadikan sasaran bimbingan teknis penyelenggaraan kursus daring.

### Hasil

- Adanya pedoman penyelenggaraan kursus daring yang sudah direviu
- Sudah terpetakan lembaga penyelenggara kursus daring tahun 2023

### Unsur dan Peserta

- Direktorat Kursus dan Pelatihan
- SEAMEO SEAMOLEC
- Tim Pengembang Aplikasi

## 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kursus Daring

### Tujuan

- Mensosialisasikan sekaligus memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep penyelenggaraan kursus daring kepada LKP
- Memberikan pembekalan teknis dan workshop penyelenggaraan kursus daring kepada pengelola, instruktur, dan admin LKP

### Hasil

- Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang konsep penyelenggaraan kursus daring
- Penyelenggara mendapatkan pembekalan teknis dan workshop penyelenggaraan kursus daring

### Unsur dan Peserta

- Direktorat Kursus dan Pelatihan
- LKP Calon Penyelenggara Kursus Daring
- SEAMEO SEAMOLEC
- DPP Gradasi

## 3. Pengimbasan Praktik Baik Penyelenggaraan Kursus Daring

### Tujuan

- Mensosialisasikan sekaligus memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep penyelenggaraan kursus daring kepada LKP
- Mempermudah lembaga yang sudah menyelenggarakan kursus daring dapat menularkan praktik baik penyelenggaraan kursus daring kepada lembaga lain, yang belum menyelenggarakan kursus daring

### Hasil

- Telah dilaksanakan kegiatan pengimbasan praktik di masing-masing area

- Kegiatan ini diikuti oleh 104 lembaga calon penyelenggara kursus daring, dengan rincian di Yogyakarta ada 30 lembaga, Blitar 29 lembaga, Garut 30 lembaga, dan Lampung 15 lembaga.
- Dalam kegiatan ini, didapatkan beberapa kendala yang dialami oleh calon lembaga penyelenggara kursus daring, diantaranya,
  - a Banyak lembaga belum mengetahui mekanisme penyelenggaraan kursus daring;
  - b Banyak lembaga yang belum memiliki sarana yang memadai untuk membuat konten yang berkualitas yang dapat diunggah dalam materi pembelajaran; dan
  - c Banyak lembaga yang kedepannya berharap ada pendampingan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan sebagai tindak lanjut kegiatan ini.
- Terhadap permasalahan dan kendala tersebut sudah diberikan solusi dan saran agar kedepannya penyelenggaraan kursus daring menjadi efektif dan dapat menjadi salah satu opsi pembelajaran bagi peserta didik

#### **Unsur dan Peserta**

- Direktorat Kursus dan Pelatihan
- SEAMEO SEAMOLEC
- Lembaga pengimbas yang sudah menjadi penyelenggara kursus daring
- LKP yang menjadi sasaran calon penyelenggara kursus daring

### **4. Penyusunan Naskah Skenario Video Bahan Ajar Program PKK**

#### **Tujuan**

- Memberikan pembekalan secara teknis terhadap penyusunan naskah skenario video bahan ajar kursus daring
- Melakukan *workshop* penyusunan naskah skenario video bahan ajar kursus daring
- Mendapatkan naskah skenario video bahan ajar kursus daring bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Aplikasi Perkantoran), *Broadcasting (Video Editing)*, dan Tata Rias Pengantin

## Hasil

- Tim penyusun naskah bahan ajar audio visual pendukung kursus daring untuk 4 jenis keterampilan, sudah mendapat pembekalan teknis dan sudah meningkat wawasannya untuk melaksanakan penyusunan naskah skenario bahan ajar kursus daring
- Sudah tersusun 30 judul naskah bahan ajar audio visual pendukung kursus daring dari empat jenis keterampilan, dengan rincian:
  - a Aplikasi perkantoran 9 judul
  - b Video editing 7 judul
  - c TRP tradisional 7 judul
  - d TRP inovasi 7 judul

## Unsur dan Peserta

- Direktorat Kursus dan Pelatihan
- Reviuer dari unsur akademisi (UNS)
- Tim Multimedia
- Tim Penyusun Naskah Video Bahan Ajar Kursus Daring

## 5. Produksi Video Bahan Ajar Program PKK

### Tujuan

- Membuat video bahan ajar kursus dalam jaringan untuk jenis keterampilan: 1) Aplikasi Perkantoran, 2) Video Editing, 3) Tata Rias Pengantin Tradisional, dan 4) Tata Rias Pengantin Inovasi.

### Hasil

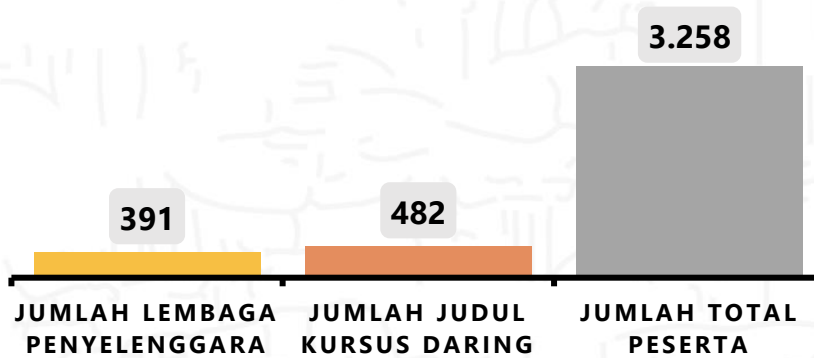
- Tersedianya video bahan ajar kursus dalam jaringan untuk jenis keterampilan: 1) Aplikasi Perkantoran, 2) Video Editing, 3) Tata Rias Pengantin Tradisional, dan 4) Tata Rias Pengantin Inovasi.

### Unsur dan Peserta

- Reviewer dari unsur akademisi (UNS)
- Tim Reviewer
- Tim Multimedia Pichos
- Direktorat Kursus dan Pelatihan

## Pelaksanaan Pembelajaran Daring LKP

### STATISTIK CAPAIAN KURSUS DARING



\*Sumber data: [kursusdaring.kemdikbud.go.id](https://kursusdaring.kemdikbud.go.id)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jumlah lembaga penyelenggara yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pembelajaran daring masih sangat minim yaitu baru sebesar 391 lembaga dari total 11.809 lembaga kursus dan pelatihan yang ada di Indonesia (Dapodik, Desember 2023). Peserta yang berpartisipasi pun cukup minim di angka 3.258 orang yang telah mengakses dan mengikuti pembelajaran daring.

### Dokumentasi Penyelenggaraan Kursus Daring (Koordinasi, Pengimbasan Praktik Baik, dan Produksi Video Bahan Ajar)





## Hambatan/Kendala

1

Lembaga belum memahami mekanisme pembuatan konten yang menarik

2

Rendahnya motivasi lembaga kursus dan pelatihan untuk menjadi penyelenggara kursus daring

3

*Mindset* Lembaga Kursus dan Pelatihan yang mempertahankan pembelajaran konvensional karena kursus daring belum memberikan profit yang pasti (belum menguntungkan dari aspek ekonomi).

## Strategi/Tindak Lanjut

1

Memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kursus daring, untuk meningkatkan pemahaman lembaga dan potensi perkembangannya di era digital

2

Memberikan bimbingan teknis yang secara khusus mengulas konten bahan ajar yang interaktif

3

Memberikan insentif bagi lembaga yang aktif menjadi penyelenggara kursus daring, contoh: prioritas untuk mengakses program-program Direktorat Kursus dan Pelatihan



# Inovasi



1

Penyederhanaan penggunaan aplikasi kursus daring dari sistem LMS yang kompleks, disederhanakan menjadi sistem kursus daring yang berbasis kebutuhan lembaga

4

## Jumlah LKP yang Menyelenggarakan Unit Produksi Sebagai *Teaching Factory*



*Teaching Factory* (Tefa) atau disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 sebagai pabrik dalam sekolah adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata

industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Tefa di LKP didefinisikan sebagai suatu konsep pembelajaran di LKP berbasis produksi/jasa yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri.

Tefa di LKP merupakan pengembangan unit produksi barang dan/atau jasa yang dimiliki LKP sebagai sebuah konsep pembelajaran yang berorientasi pada produksi dan bisnis yang berbasis dunia kerja dan dunia industri untuk menjawab tantangan perkembangan dunia industri saat ini dan yang akan datang. Dengan adanya Tefa, peserta didik dapat belajar dan menguasai keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja industri sesungguhnya. Bukan hanya itu, produk-produk yang dihasilkan para

peserta didik dari proses belajar bisa dipasarkan kepada masyarakat sehingga hasil dari penjualan produk/jasa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional lembaga dan juga sebagai salah satu sumber pendapatan.

<b>Target 2023</b>
<b>315 Lembaga</b>
<b>Realisasi 2023</b>
<b>419 Lembaga</b>

Pada tahun 2023, telah dilakukan reviu pedoman Teaching Factory (Tefa) bagi LKP yang mengundang praktisi dan beberapa pimpinan LKP. Selain mereviu pedoman Tefa, Direktorat Kursus dan Pelatihan juga melakukan sosialisasi (pembinaan, pengimbasan, workshop dan pendampingan)

dimana tempat pelaksanaannya dilakukan di LKP yang sudah memiliki Tefa dan mengundang narasumber dari pimpinan LKP yang sudah sukses melaksanakan Tefa untuk melakukan *best practice* yang harapannya bisa menjadi percontohan bagi LKP yang akan mendirikan Tefa atau sedang merintis Tefa. Adapun LKP yang menjadi peserta pengimbasan dan pembinaan Tefa di tahun 2023 totalnya sebanyak 419 lembaga.



## Hambatan/Kendala

- 1 • Belum tersampainya pedoman penyelenggaraan Tefa keseluruh LKP
- 2 • LKP tidak mengetahui bahwa unit usaha yang dimiliki termasuk Tefa
- 3 • Manajemen pengelolaan LKP dengan Tefa masih menyatu dengan lembaga, termasuk sarana prasarana
- 4 • Tefa yang dimiliki oleh LKP tidak linear dengan jenis keterampilan di LKP itu sendiri
- 5 • Tidak tersedia anggaran untuk bantuan penyelenggaraan Tefa bagi LKP selama 2 tahun (2022-2023)



# Strategi/Tindak Lanjut

1

Melaksanakan sosialisasi pedoman penyelenggaraan Tefa bagi LKP dan dilaksanakan pengimbasan, pendampingan, pembinaan, dan workshop Tefa

2

Melaksanakan *best practice* dengan mengundang narasumber dari LKP yang sudah sukses dalam penyelenggaraan Tefa

3

Mengusulkan ke dalam anggaran tahun 2024 untuk bantuan program penyelenggaraan TeFa bagi LKP

## Inovasi

1

Mengarahkan kepada LKP yang akan mendirikan atau sedang merintis penyelenggaraan Tefa untuk melakukan kerjasama terhadap LKP yang sudah sukses dalam penyelenggaraan Tefa

2

Mengikut sertakan LKP penyelenggara Tefa dalam kegiatan pameran - pameran yang diadakan pemerintah Kab/Kota atau Kementerian/lembaga untuk menjual produk - produk yang dihasilkan LKP

## 5

## Jumlah LKP yang Dinilai Kinerja Lembaga

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mendorong Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mengembangkan suatu pendekatan dalam rangka penjaminan mutu layanan pendidikan vokasi di LKP. Penjaminan mutu ini dilaksanakan melalui program penilaian kinerja LKP (PK-LKP) berbasis dunia kerja dan menjadi manifestasi dari tugas dan fungsi Direktorat untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pendidikan vokasi yang bermutu di LKP.

Program PKLKP ini berbasis digital dengan menggunakan sistem aplikasi penilaian kinerja yang dapat diakses oleh LKP sasaran, verifikator, validator, dan admin pusat melalui tautan <https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pklkp/>.

Dari hasil PKLKP ini dapat diperoleh pemetaan data tentang kapasitas dan kapabilitas LKP yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan perumusan langkah pembinaan LKP, baik oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Kursus dan Pelatihan) maupun Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota).



**Target 2023**

**100 Lembaga**

**Realisasi 2023**

**120 Lembaga**

Pada tahun 2022 sasaran PKLKP hanya meliputi 7 provinsi, dengan adanya fasilitasi verifikasi secara daring dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 23 provinsi menjadi sasaran PK LKP dengan realisasi total di tahun 2023 sebanyak 120 LKP. Agar pelaksanaan program penilaian kinerja

ini dapat berjalan sesuai harapan, telah dilaksanakan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

### Tahapan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahun 2023

- 1** Reviu Redoman dan Instrumen PKLKP 2023
- 2** Uji Publik Pedoman dan Instrumen PKLKP 2023
- 3** Finalisasi Pedoman PKLKP 2023
- 4** Penetapan Sasaran PKLKP 2023
- 5** Sosialisasi Pelaksanaan PKLKP 2023
- 6** Pengisian instrumen PKLKP oleh LKP Sasaran
- 7** Orientasi Teknis Verifikator PKLKP 2023
- 8** Pembekalan Verifikasi PKLKP 2023 bagi Verifikator
- 9** Persiapan Verifikasi PKLKP 2023 bagi LKP
- 10** Verifikasi atas isian instrumen oleh LKP
- 11** Validasi atas hasil verifikasi
- 12** Penetapan Hasil Penilaian Kinerja LKP 2023
- 13** Analisis dan Evaluasi Hasil PKLKP 2023
- 14** Tindak Lanjut Hasil PKLKP 2023
- 15** Diseminasi Hasil Penilaian Kinerja LKP 2023

## 1. Reviu Redoman dan Instrumen PKLKP Tahun 2023

Reviu Redoman dan Instrumen PKLKP Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 8-10 Februari 2023. Dalam kegiatan ini, selain praktisi dan akademisi, dilibatkan pula Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terutama untuk mendapatkan masukan tentang mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2023.

## 2. Uji Publik Pedoman dan Instrumen PKLKP Tahun 2023

Uji Publik Pedoman dan Instrumen PKLKP Tahun 2023 ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan tentang pedoman dan instrumen PKLKP yang akan digunakan pada tahun 2023 dan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan secara luring, pada tanggal 8-10 Maret 2023 dan tahap kedua dilakukan secara daring, pada tanggal 11 April 2023.

## 3. Finalisasi Pedoman PKLKP Tahun 2023

Finalisasi Pedoman PKLKP Tahun 2023 ini dilaksanakan pada tanggal 15-17 Maret 2023. Masukan yang diperoleh dari hasil uji publik yang dilakukan secara luring maupun daring digunakan untuk memperbaiki instrumen PKLKP yang digunakan pada penilaian kinerja LKP tahun 2023. Dalam kegiatan ini, selain praktisi dan akademisi di bidang kursus dan pelatihan, dilibatkan pula praktisi di bidang statistika untuk menguji reliabilitas dan validitas instrumen PKLKP yang akan digunakan, sehingga menghasilkan pedoman dan instrumen PKLKP 2023.

## 4. Penetapan Sasaran PKLKP Tahun 2023

Penetapan sasaran PKLKP Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 10-12 Mei 2023. Pada kegiatan ini bertujuan untuk menyeleksi LKP calon sasaran PKLKP dengan melibatkan kelompok kerja di Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk memberikan rekomendasi mengenai

LKP yang menjadi calon sasaran penilaian kinerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. LKP yang dipilih menjadi calon sasaran akan diminta untuk mengikuti sosialisasi, untuk kemudian ditetapkan menjadi sasaran penilaian kinerja sesuai kuota yang tersedia.

### **5. Sosialisasi Pelaksanaan PKLKP Tahun 2023**

Sosialisasi Pelaksanaan PKLKP Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 16-17 Mei 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan, instrumen, dan aplikasi yang digunakan dalam penilaian kinerja LKP tahun 2023. LKP yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah LKP yang menjadi calon sasaran penilaian kinerja, dan kemudian LKP yang berminat untuk menjadi sasaran diminta untuk membuat surat kesanggupan menjadi sasaran PKLKP tahun 2023.

### **6. Pengisian instrumen PKLKP oleh LKP Sasaran**

Pada pengisian instrumen PKLKP oleh LKP sasaran terdapat 120 LKP yang sudah menyatakan berminat dan sanggup untuk menjadi sasaran PKLKP kemudian ditetapkan menjadi sasaran PKLKP dan diminta untuk melakukan pengisian instrumen PKLKP. Pengisian instrumen ini dilakukan oleh LKP sebelum dilaksanakan verifikasi oleh Tim Verifikator.

### **7. Orientasi Teknis Verifikator PKLKP Tahun 2023**

Orientasi Teknis Verifikator PKLKP Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 23-26 Mei 2023. Calon verifikator berasal dari unsur UPT Ditjen Pendidikan Vokasi, yaitu 7 B/BB-PPMPV, dan kebanyakan belum mengetahui tentang lembaga kursus dan pelatihan, karena sebelum reorganisasi di Kemdikbudristek hanya menangani satuan pendidikan formal. Jadi pada kegiatan ini diberikan gambaran tentang karakteristik LKP kepada calon verifikator. Selain itu dilakukan pendalaman mengenai mekanisme pelaksanaan, instrumen, dan aplikasi PKLKP tahun 2023. Dari kegiatan ini terpilih 17 orang verifikator PKLKP tahun 2023 sesuai dengan jumlah kuota yang tersedia.



## 8. Pembekalan Verifikasi PKLKP Tahun 2023 bagi Verifikator

Pembekalan Verifikasi PKLKP Tahun 2023 bagi Verifikator, dilaksanakan secara daring pada tanggal 5 Juli 2023. Sebelum pelaksanaan verifikasi, tim verifikator diberi pembekalan mengenai mekanisme pelaksanaan verifikasi, instrumen, aplikasi, dan mekanisme pelaporan agar tahap verifikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## 9. Persiapan Verifikasi PKLKP Tahun 2023 bagi LKP

Persiapan Verifikasi PKLKP Tahun 2023 bagi LKP, dilaksanakan secara daring pada tanggal 6 Juli 2023. LKP yang menjadi sasaran diberikan informasi mengenai pelaksanaan verifikasi dan verifikator yang akan bertugas di lembaga masing-masing.

## 10. Verifikasi atas isian instrumen oleh LKP

Verifikasi atas isian instrumen oleh LKP, yang dilaksanakan secara luring (melalui kunjungan ke LKP) maupun daring (melalui aplikasi pertemuan jarak jauh), tanggal 10 Juli s.d. 13 Agustus 2023. Pada kegiatan ini tim verifikator bertugas untuk melakukan verifikasi atas kinerja LKP yang terdokumentasikan dalam aplikasi berdasarkan isian instrumen oleh LKP serta hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan. Verifikasi terhadap 21 LKP yang dilakukan secara daring difasilitasi dan didampingi oleh staf Direktorat Kursus dan Pelatihan.

## 11. Validasi atas Hasil Verifikasi

Validasi atas hasil verifikasi, dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus s.d. 10 September 2023. Proses validasi ini dilaksanakan di UPT dengan melibatkan tim verifikator dan tim validator. Hasil isian validator ini akan menjadi bahan pada rapat pleno penetapan hasil PKLKP tahun 2023.

## 12. Penetapan Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2023

Penetapan Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 25-27 September 2023. Pada kegiatan ini dilaksanakan rapat pleno yang menghasilkan rekomendasi penetapan hasil PKLKP tahun 2023 dari tim PKLKP kepada Direktur Kursus dan Pelatihan untuk ditetapkan dalam bentuk SK dan kemudian diterbitkan sertifikatnya.

## 13. Analisis dan Evaluasi Hasil PKLKP Tahun 2023

Analisis dan Evaluasi Hasil PKLKP Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 6-8 November 2023. Kegiatan ini selain melibatkan tim verifikator dan tim validator yang terlibat langsung dalam proses penilaian kinerja, juga melibatkan LKP, akademisi, praktisi, dan ormit. Dari hasil analisis PKLKP tahun 2023 diketahui bahwa secara rata-rata capaian kinerja LKP yang masih perlu ditingkatkan adalah:

- a. Kesadaran mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. Kerja sama dengan perguruan tinggi; dan
- c. Program peningkatan kompetensi instruktur, terutama melalui magang di DUDIKA

Hasil analisis ini perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dalam rangka pembinaan lembaga kursus dan pelatihan.

## 14. Tindak Lanjut Hasil PKLKP Tahun 2023

Tindak Lanjut Hasil PKLKP Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 13-14 November 2023. Kegiatan ini melibatkan seluruh kelompok kerja pada Direktorat Kursus dan Pelatihan, karena diperlukan masukan untuk menetapkan rumusan rekomendasi kebijakan Direktorat Kursus dan Pelatihan di masa mendatang yang didasarkan pada hasil PKLKP tahun 2023, seperti:

- a. Menyusun pedoman tentang penyelenggaraan kursus dan pelatihan, pendirian, penjaminan mutu, sertifikasi;
- b. Menyusun modul/pedoman untuk menetapkan standar ideal LKP;
- c. Menyusun pedoman *reskilling/upskilling* untuk pengelola LKP;
- d. Memberikan fasilitasi bagi LKP untuk bekerja sama dengan dunia kerja dan perguruan tinggi dalam berbagai proses pembelajaran;
- e. Memberikan bimbingan mengenai HKI; dan
- f. Melakukan sosialisasi tentang penilaian kinerja LKP.

## 15. Diseminasi Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2023

Diseminasi Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2023, dilaksanakan secara daring pada tanggal 27 November 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan penetapan hasil PKLKP tahun 2023 kepada LKP sasaran dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Sebagai antisipasi pelaksanaan PKLKP yang memakan waktu cukup lama, maka persiapan PKLKP tahun 2024 sudah dimulai, yaitu melalui kegiatan berikut,

1. **Reviu Pedoman dan Instrumen PKLKP Tahun 2024**, dilaksanakan pada tanggal 2-4 November 2023  
Pada kegiatan ini dilibatkan unsur verifikator, validator, akademisi, dan praktisi kursus dan pelatihan, untuk merumuskan draf pedoman dan instrumen PKLKP yang akan digunakan dalam penilaian kinerja tahun 2024. Penelaahan kembali pedoman dan instrumen ini perlu dilakukan karena perlu perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan dan instrumen PKLKP.
2. **Uji Publik Instrumen PKLKP Tahun 2024**, dilaksanakan pada tanggal 7-10 Des 2023  
Setelah melakukan penelaahan kembali atas instrumen PKLKP, perlu dilakukan uji publik untuk mengetahui keterbacaan, keterukuran, dan keterpakaian indikator-indikator di dalamnya. Uji publik ini dilaksanakan di 50 LKP yang tersebar di 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

3. **Finalisasi Pedoman dan Instrumen Tahun 2024**, dilaksanakan pada tanggal 18-20 Des 2023

Hasil dari uji publik diperoleh masukan tentang perbaikan instrumen PKLKP dan pedoman PKLKP tahun 2024.



## Hambatan/Kendala

1

Terbatasnya kualitas dan kuantitas verifikator dan validator yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan penilaian kinerja LKP

2

Terbatasnya SDM dan anggaran sehingga tidak semua LKP yang berminat mengikuti PKLKP dapat dinilai kinerianva

## Strategi/Tindak Lanjut

1

Melakukan orientasi teknis bagi verifikator tentang mekanisme, pelaksanaan, dan instrumen PKLKP

2

Memfasilitasi verifikasi dan validasi secara daring menggunakan aplikasi pertemuan jarak jauh

# Inovasi



1

Untuk mengatasi masalah jarak, waktu, dan biaya, verifikasi kegiatan dilaksanakan secara daring maupun luring, sehingga LKP yang berada di wilayah yang jauh dapat menjadi sasaran PKLKP meskipun anggaran terbatas

2

Menjajaki kemitraan dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk terlibat dalam pelaksanaan program PKLKP di daerah masing-masing agar dapat menjangkau wilayah yang lebih luas

6

## Jumlah Instruktur dan Pengelola LKP Magang di Dunia Kerja

<b>Target 2023</b>
<b>30 Orang</b>
<b>Realisasi 2023</b>
<b>30 Orang</b>

Program Magang pada kursus dan pelatihan merupakan bagian penyelarasan antara keterampilan yang dimiliki saat ini dengan kompetensi di dunia kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan instruktur terkait kompetensi terbaru, teknologi termutakhir, budaya kerja, dan karakter yang diterapkan di dunia kerja/industri; memberikan pengalaman kepada instruktur untuk memadukan kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi terbaru di dunia kerja/industri; memfasilitasi instruktur terkait proses produksi dan kemampuan teknis serta memfasilitasi kerja sama antara LKP dengan dunia kerja/industri.

Pada tahun 2023, telah direalisasikan magang untuk instruktur kepada 30 orang. Sasaran dari program magang instruktur kursus dan pelatihan ini adalah para instruktur yang terdiri dari 15 instruktur Tata Kecantikan Rambut dan 15 instruktur Tata Busana.

### Dokumentasi Magang Instruktur Tahun 2023



Adapun mitra yang dipilih terdiri perwakilan jenis keterampilan yang dipilih yaitu tata busana dan tata kecantikan rambut.

#### MITRA MAGANG

1

**Tata Busana: ESMOD Jakarta (Mitra Industri)**

2

**Tata Kecantikan Rambut: Makarizo Professional (Mitra Industri)**

Untuk dapat mengikuti program magang instruktur terdapat kriteria khusus dan kriteria umum yang perlu dipenuhi peserta yang dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.

## KRITERIA UMUM CALON PESERTA

- 01** Berusia antara 25 s.d. 45 tahun dibuktikan dengan fotocopy KTP
- 02** Pendidikan formal minimal SLTA sederajat dibuktikan dengan fotocopy ijazah pendidikan formal
- 03** Memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya minimal jenjang 3 KKNl
- 04** Memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan dan foto NPSN lembaga tempat mengajar
- 05** Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter
- 06** Belum pernah mengikuti program yang sama 3 tahun terakhir

## KRITERIA KHUSUS

### Tata Busana

- Menguasai materi teori dan praktik tentang: Pola busana, Teknik jahit, dan Teknik draping

### Tata Kecantikan Rambut

- Menguasai materi teori dan praktik tentang: Cutting, Colouring, Perming, dan Hair styling
- Tidak sedang dalam kondisi hamil

Setelah terpilih untuk mengikuti program magang, instruktur terpilih akan menerima beberapa materi magang yang terdiri dari:

- Hardskill**
- Soft skill (Karakter instruktur)**
- Metode Pembelajaran**
- Kompetensi bidang keterampilan Belajar di kelas**
- Mengamati Instruktur Lain (Observasi mengajar)**
- Mengamati di Dunia Industri (Observasi produksi)**
- Praktik Kerja**


### Dokumentasi Magang Instruktur








## Hambatan/Kendala



1. Minimnya instruktur yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi seleksi magang
2. Minimnya instruktur yang mengakses informasi melalui sosial media


## Strategi/Tindak Lanjut



1. Memperbanyak pelibatan stakeholder dalam sosialisasi magang instruktur
2. Peserta magang membuat rencana tindak lanjut pengimbasan



## Inovasi



1. Pelaksanaan seleksi dilakukan secara daring
2. Peningkatan kompetensi dari jenjang 3 ke 4
3. Mitra industri yang digunakan sebagai tempat magang berskala internasional

## 7

## Jumlah Penguji Uji Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya

Pelaksanaan pelatihan penguji uji kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon penguji. Materi pada Bimbingan Teknis Penguji Uji Kompetensi antara lain:

Materi Umum	Materi Khusus
1. Pelatihan Penguji Uji Kompetensi	1. SKL dan Rubrik Penilaian
2. Kebijakan Uji Kompetensi	2. Simulasi Pengiriman Laporan kepada LSK
3. Tata Kelola Uji Kompetensi	3. Formulir Skor dan Simulasi Praktik
4. Etika Profesi Penguji	Penilaian serta Pengisian Formulir Skor

**Target 2023**

**55 Orang**

**Realisasi 2023**

**55 Orang**

Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya penguji uji kompetensi yang kompeten pada 4 bidang keterampilan antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), fotografi, penyehatan tradisional (hattra) ramuan Indonesia, dan yoga.

Pada tahun 2023, sebanyak 55 penguji uji kompetensi telah mengikuti pelatihan ini.

### Dokumentasi Pelatihan Penguji Uji Kompetensi



## Hambatan/Kendala

1

Proses seleksi calon peserta pengujian kompetensi yang diusulkan oleh organisasi profesi tidak sesuai tepat waktu karena pengajuan calon dari organisasi profesi tidak bersamaan

## Strategi/Tindak Lanjut

1

Membangun kemitraan organisasi profesi dengan dunia kerja

## Inovasi

1

Pengujian yang dinyatakan kompeten terdaftar langsung di aplikasi SiKompeten.

8

### Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya

Target 2023

40 Orang

Realisasi 2023

40 Orang

Penguatan kepada para pengelola uji kompetensi pada masing-masing LSK tentang pengelolaan penyelenggaraan uji kompetensi melalui Aplikasi "**SiKompeten**" (Sistem Informasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi). Pada tahun 2023, sebanyak 40 pengelola uji kompetensi telah mengikuti kegiatan ini.

## Dokumentasi Penguatan Pengelola Uji Kompetensi



## Hambatan/Kendala

- 1 ● Pemahaman tentang proses penerbitan TTE untuk sertifikat kompetensi masih kurang
- 2 ● Banyaknya pergantian admin dari lama ke yang baru sehingga mengganggu proses penerbitan TTE
- 3 ● Tahapan penerbitan TTE yang melibatkan banyak instansi

## Strategi/Tindak Lanjut

- 1 ● Dilakukannya pendampingan ke pengelola dan admin
- 2 ● Meningkatkan koordinasi dengan instansi Pusdatin dan BSRE



# Inovasi



1

Perlibatan KADIN untuk membuka peluang kerjasama antara Pengelola LSK dengan Dunia Kerja

9

## Jumlah LKP yang Mempunyai Pusat Pengembangan Karier

**Target 2023**

**130 Lembaga**

**Realisasi 2023**

**130 Lembaga**

Pusat Pengembangan Karier (PPK-LKP) adalah unit kerja/divisi/departemen/tim kerja yang memiliki peran untuk menyiapkan dan mempertemukan peserta didik dan lulusan LKP dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan) atau peluang usaha (berwirausaha), maupun dengan perguruan tinggi.

Secara umum program ini bertujuan agar LKP memahami pentingnya membentuk unit khusus pengembangan karier atau minimal memiliki fungsi pengembangan karier bagi peserta didik di LKP. Di tahun 2023, terealisasi 130 LKP (30 LKP ditetapkan melalui SK dan 100 LKP melalui pengimbasan PPK) yang telah berpartisipasi dalam program LKP yang mempunyai Pusat Pengembangan Karier. Secara spesifik PPK LKP bertujuan untuk,

1. Menyediakan data dan informasi tentang status alumni setelah lulus (bekerja/berwirausaha/menganggur/studi lanjut, dll) yang sistematis dan terstruktur, sehingga memiliki data yang komprehensif mengenai karier peserta didik dan lulusan LKP;
2. Menyediakan informasi lowongan kerja, proses/mekanisme rekrutmen tenaga kerja di perusahaan kepada peserta didik dan lulusan LKP;

3. Memberikan pelayanan kepada peserta didik dan lulusan LKP dalam merencanakan dan mengembangkan karier melalui kegiatan *upskilling*, *reskilling*, serta penguatan mental/karakter bagi peserta didik dan lulusan LKP;
4. Melakukan promosi dan fasilitasi penempatan lulusan LKP ke perusahaan, pengembangan dan kemitraan usaha, serta fasilitasi bagi lulusan LKP yang melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi.

Adapun rangkaian kegiatan pada Program Pusat Pengembangan Karier adalah sebagai berikut:



Adapun serangkaian kegiatan di atas dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

### 1. Reviu Pedoman PPK bagi LKP

Reviu pedoman penyelenggaraan Pusat Pengembangan Karier bagi LKP dilakukan dengan melibatkan praktisi, akademisi, serta LKP sebagai sasaran program. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas kembali pedoman penyelenggaraan Pusat Pengembangan Karier dengan menyesuaikan yang selama ini telah dilakukan di lembaga kursus dan mengarah pada

tujuan dari Program Keterampilan Kerja yakni menjadikan peserta didik LKP yang memiliki pekerjaan dengan bidang yang sesuai kompetensi bersertifikasi dan terserap pada dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

## 2. Finalisasi Pedoman PPK bagi LKP

Finalisasi pedoman penyelenggaraan Pusat Pengembangan Karier bagi LKP dilakukan dengan melibatkan praktisi, akademisi, serta LKP sebagai sasaran program. Tujuan dari kegiatan ini adalah menerbitkan panduan dalam pelaksanaan unit Pusat pengembangan Karier LKP dan mengaktualisasi segala bentuk perencanaan yang telah disusun.

## 3. Koordinasi Penyelenggaraan PPK

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyepakati beberapa hal diantaranya mengenai metode pemilihan LKP yang akan menjadi sasaran PPK Tahun 2023, menetapkan kriteria LKP yang akan menjadi sasaran program PPK, menetapkan teknis penyebaran instrumen kurasi PPK serta teknis dan bentuk pendampingan dan pengimbasan PPK yang akan dilakukan pada tahun 2023.

## 4. Sosialisasi Pedoman PPK kepada LKP

Sosialisasi pedoman PPK dilakukan kepada seluruh LKP yang sudah mengisi form peminatan menjadi LKP piloting pelaksanaan Pusat Pengembangan Karier di LKP. Tujuan kegiatan ini adalah memberi pengarahan dan pendampingan secara luas kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) mengenai pedoman yang telah disesuaikan dan diReviu melalui metode *hybrid* dengan mengundang secara daring LKP yang Tahun 2023 sudah diberikan keputusan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan sebagai rintisan lembaga pelaksana dan dilakukan pendampingan ke lapangan, juga mengundang secara daring kepada seluruh LKP secara nasional.

## 5. Kurasi LKP Piloting Pelaksanaan PPK

Dilakukan kurasi untuk mendapatkan 30 LKP yang akan ditetapkan sebagai LKP yang akan menjadi *piloting* pelaksanaan program PPK berdasarkan hasil inputan data form peminatan.

Tujuan kegiatan ini untuk menyeleksi dan menetapkan 30 LKP *piloting* pelaksana PPK melalui penilaian instrumen kurasi yang sudah disebar ke LKP.

Penetapan sasaran *piloting* pelaksanaan PPK dilakukan melalui pengesahan Surat Keputusan (SK) kepada 30 lembaga *piloting* pelaksanaan PPK. Adapun daftar 30 LKP *piloting* Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Karier adalah sebagai berikut:

Daftar Lembaga Piloting PPK 2023			
1	LKP Mulia Sakti, Aceh Besar Provinsi Aceh	16	LKP Yant Ayu, Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan
2	LKP Bali Cltra International, Denpasar, Provinsi Bali	17	LKP Celebes International School, Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
3	LPPK Gentala Hospitality, Kota Jambi, Provinsi Jambi	18	LKP Dynasti Computer, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat
4	LKP Abdi Bangsa Institute, Cianjur, Provinsi Jawa Barat	19	LKP Sari Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
5	LKP Putri Ayu, Depok, provinsi Jawa Barat	20	LKP Intermedia Training Center. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
6	LKP LP2K Kania Indah, Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	21	LKP Patriot Bangsa, Bantul, Provinsi Yogyakarta
7	LKP Belva, Demak, provinsi Jawa Tengah	22	LKP Dian Nusantara, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
8	LKP Terra Computer, Kediri, Provinsi Jawa Timur	23	LKP International Hotel School, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
9	LKP Erlangga, Blitar, Provinsi Jawa Timur	24	LKP Panghegar, Bandung, Provinsi Jawa Barat
10	LKP Politeknik Indonesia, Madiun, Provinsi Jawa Timur	25	LKP Puspita Martha, Jakarta Pusat, Provinsi Jakarta
11	LKP Angkasa Nusantara, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	26	LKP Mutiara Kasih, Jakarta Timur, Provinsi Jakarta
12	LKP STKOM Sapta Computer, Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan	27	LKP Duta Persada, Yogyakarta, DI Yogyakarta
13	LKP Prisma, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	28	LKP Dress Making, Cimahi, Provinsi Jawa Barat
14	LKP Smart Plus, Pringsewu, Provinsi Lampung	29	LKP Betarin, Madiun Provinsi Jawa Timur
15	LKP Arsyfa Multicom, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	30	LKP NCL Madiun, Madiun Provinsi Jawa Timur

## 7. Orientasi Teknis Pelaksanaan PPK

Setelah SK ditandatangani Direktur Kursus dan Pelatihan, maka dilaksanakan kegiatan Orientasi Teknis Pelaksanaan Pusat Pengembangan Karier kepada 30 LKP *piloting*. Sebelum



pelaksanaan uji coba Pusat Pengembangan Karier LKP sesuai dengan Pedoman PPK 2023, akan dilakukan orientasi teknis terhadap sasaran program PPK LKP Tahun 2023 terpilih yang akan menjadi tempat uji coba pelaksanaan Pusat Pengembangan Karier LKP.

### **8. Pendampingan LKP *Piloting* PPK**

Kegiatan pendampingan LKP *piloting* PPK dilakukan kepada 30 LKP secara bertahap. Pendampingan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pimpinan/ketua, instruktur, dan unsur lain yang kompeten di LKP terhadap paradigma dan urgensi, kerangka operasional, serta maniferstasi penyelenggaraan PPK LKP; meningkatkan kemampuan pengurus PPK LKP dalam mempersiapkan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan layanan di PPK LKP; dan menyiapkan LKP untuk melakukan pengimbasan kepada LKP lainnya dalam penyelenggaraan PPK LKP.

### **9. Pengimbasan PPK LKP**

Kegiatan pengimbasan kepada 100 LKP dilakukan oleh LKP yang telah menerapkan PPK pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengimbasan dalam penerapan PPK LKP oleh beberapa lembaga terpilih untuk mengimbaskan ke beberapa LKP disekitar. Sehingga diharapkan LKP sekitar yang menjadi sasaran pengimbasan dapat menerima ilmu dan pengalaman baik mengenai penerapan Pedoman PPK.

### **10. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program PPK**

Pada tahapan terakhir dilakukan kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan program PPK di LKP tahun 2023. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian penerapan fungsi-fungsi unit PPK dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan acuan penyelenggaraan PPK 2024.



## Dokumentasi Program Pusat Pengembangan Karier



## Hambatan/Kendala

1

Masih banyak pengelola LKP yang belum memahami fungsi dan pembentukan unit PPK

2

Keterbatasan jumlah SDM di LKP sehingga tidak bisa membentuk satu unit organisasi baru yaitu unit PPK

# Strategi/Tindak Lanjut

1

Melaksanakan pendampingan penerapan fungsi dan pembentukan unit PPK secara intensif kepada pengelola LKP baik luring maupun daring

2

Untuk efektivitas keterjangkauan sasaran sebanyak 100 LKP dilakukan pengimbasan di beberapa titik (LKP Pengimbas)

## Inovasi

1

Membuatkan database LKP yang sudah melaksanakan program PPK di LKP di aplikasi Simantap

**10****Jumlah LKP yang Menyelenggarakan Program RPL dengan Perguruan Tinggi**

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan formal atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 6 yang menyatakan bahwa "Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses

penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.” Proses penyetaraan ini memperhatikan hasil capaian pembelajaran dari masing-masing jalur pendidikan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan oleh masing-masing jenjang pendidikan tinggi yang dituju.

Pada jalur pendidikan nonformal, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa hasil penyelenggaraan kursus dan pelatihan berupa sertifikat kompetensi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan program RPL. RPL hasil pembelajaran kursus dan pelatihan tentunya memperhatikan kesesuaian capaian pembelajaran kursus dan pelatihan pada suatu jenis keterampilan dan jenjang kualifikasi tertentu dengan program studi yang akan ditempuh pada suatu Perguruan Tinggi. Hasil capaian pembelajaran lulusan kursus dan pelatihan dapat diakui sebagai capaian pembelajaran dalam bentuk perolehan SKS untuk menempuh pendidikan jenjang sarjana (S1) atau pascasarjana (S2).

Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan RPL ini, sejak tahun 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta agar Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dapat mengambil peluang meningkatkan kualifikasi lulusannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi melalui program RPL. Selain itu, tahun 2022 dan 2023 ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan juga telah menetapkan beberapa LKP yang memenuhi kriteria

<b>Target 2023</b>
<b>200 Lembaga</b>
<b>Realisasi 2023</b>
<b>213 Lembaga</b>

melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi tersebut diantaranya untuk penerapan RPL pada lulusan kursus dan pelatihan. Pada tahun 2023 sebanyak 213 lembaga telah berpartisipasi untuk menyelenggarakan program RPL dengan perguruan tinggi yang tersebar di beberapa wilayah.

Program kerjasama ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk penjaminan kualitas lulusan kursus dan pelatihan dengan target indikator tahun 2024 berupa 3.500 lulusan Kursus dan Pelatihan melanjutkan pendidikan formal melalui jalur RPL.

Media pemenuhan pencapaian target tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:



Adapun serangkaian kegiatan di atas dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

### **1. Reviu Pedoman RPL dengan PT bagi LKP**

Tujuan dilakukan Kegiatan Reviu Pedoman RPL dengan Perguruan Tinggi (PT) bagi LKP adalah untuk melakukan penyempurnaan Pedoman Kerja Sama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Perguruan Tinggi (PT) dalam penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi peserta didik dan lulusan LKP, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Konsep kerja sama RPL lulusan LKP di perguruan tinggi;
2. Pedoman pelaksanaan kerja sama RPL bagi peserta didik dan lulusan LKP di PT;
3. Mekanisme pelaksanaan RPL bagi peserta didik dan lulusan LKP di PT;
4. Mekanisme kerja sama RPL dan asesmen kurikulum LKP oleh PT

Unsur dan peserta kegiatan Reviu Pedoman RPL dengan Perguruan Tinggi (PT) bagi LKP adalah sebagai berikut:

1. Universitas Indonesia (UI);
2. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI);
3. Universitas Terbuka (UT);
4. Universitas Negeri Surabaya (UNESA);
5. Politeknik Negeri Jakarta;
6. LKP Bentani Collage of Hospitality;
7. LKP New Media Collage;
8. BBPMP Provinsi Jawa Barat;
9. Praktisi Kursus.

## 2. Koordinasi Penyelenggaraan RPL

Tujuan dilakukan Koordinasi Penyelenggaraan RPL adalah untuk, mengkoordinasikan dan menyepakati naskah kerja sama penyelenggaraan RPL bagi lulusan LKP di PT di bawah binaan Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemdikbudristek, membuat rencana kerja Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PT dan Ditjen Pendidikan Vokasi, memvalidasi 200 LKP yang akan di fasilitasi untuk kerja sama program penyelenggaraan RPL LKP dengan PT tahun 2023. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Naskah kerja sama penyelenggaraan RPL bagi lulusan LKP di PT;
2. Rencana kerja PKS;
3. 200 LKP yang akan di fasilitasi untuk kerja sama program penyelenggaraan RPL LKP dengan PT tahun 2023

Unsur dan peserta kegiatan koordinasi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah sebagai berikut:

1. Universitas Negeri Semarang (UNNES);

2. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI);
3. Universitas Negeri Padang;
4. Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Pancasila;
5. Sesditjen Pendidikan Vokasi;
6. BBPMP Provinsi Jawa Barat;
7. Praktisi Kursus.

### 3. Finalisasi Pedoman RPL dengan PT bagi LKP

Tujuan dilakukan kegiatan Finalisasi Pedoman RPL dengan PT bagi LKP adalah untuk, Menyempurnakan pedoman kerjasama LKP dengan PT dalam penyelenggaraan RPL bagi lulusan LKP, instruktur dan pengelola, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang relevan. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Konsep kerja sama RPL lulusan LKP di PT;
2. Pedoman pelaksanaan kerja sama RPL bagi peserta didik dan lulusan LKP di PT;
3. Mekanisme pelaksanaan RPL bagi peserta didik dan lulusan LKP di PT;
4. Mekanisme kerja sama RPL dan asesmen kurikulum LKP oleh PT;
5. Memvalidasi 20 calon PT yang akan bekerja sama dalam program RPL LKP;
6. Memvalidasi 200 calon LKP untuk difasilitasi bekerja sama dalam program RPL LKP dengan PT.

Unsur dan peserta kegiatan Finalisasi Pedoman RPL dengan PT bagi LKP adalah sebagai berikut:

1. UPMA Vokasi UI
2. Kantor Pendidikan Vokasi Universitas Padjadjaran, Bandung
3. Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
4. Institut Pertanian Bogor (IPB)
5. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
6. Universitas Negeri Semarang
7. Sekolah Vokasi UNP

8. Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan (LP3), Universitas Pancasila
9. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang
10. Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (UNAIR)
11. Pengelola RPL Universitas Negeri Gorontalo
12. Universitas Negeri Manado
13. Universitas Negeri Makassar
14. Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Malang
15. Universitas Sebelas Maret Surakarta
16. Universitas Swadaya Gunung Jati, Jawa Barat
17. Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung
18. Universitas Riau
19. Institut Teknologi Indonesia, Banten
20. UPN Veteran Jakarta
21. BBPMP Provinsi Jawa Barat
22. Praktisi

#### **4. Sosialisasi Penyelenggaraan RPL dengan PT bagi LKP**

Tujuan dilakukan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan RPL dengan PT bagi LKP adalah untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme RPL di PT bagi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan LKP. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah LKP memahami terkait dengan mekanisme RPL di PT sehingga terjadi kerja sama yang sesuai dengan benar, sesuai aturan, terjamin mutunya, dan lebih banyak lagi LKP yang dapat bekerja sama dengan PT lainnya baik negeri/swasta.

Unsur dan peserta kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan RPL dengan PT bagi LKP adalah sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Padang, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Manado, Universitas



Negeri Makassar, Universitas Brawijaya, Universitas Riau, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, IPB University, Universitas Budi Luhur, Universitas Pancasila, Institut Teknologi Indonesia, Universitas Swadaya Gunung Jati., Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan Universitas Wahid Hasyim, Semarang

2. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP): 146 LKP yang sudah mengisi google form program RPL Tahun 2023, 200 LKP yang sudah mengikuti pelatihan PPKSDM Tahun 2020, 100 LKP yang sudah mengikuti Pelatihan PPKSDM Tahun 2021, 25 instruktur memiliki pengalaman/dilatih industri yang mengikuti kegiatan magang Tahun 2022, dan 100 LKP penerima sarpras 2020.

### 5. Orientasi Teknis Kerjasama LKP dengan PT

Tujuan dilakukan kegiatan Orientasi Teknis Kerjasama LKP dengan PT adalah untuk menyepakati dan menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama/MoU penyelenggaraan RPL) bagi lulusan LKP di PT Tahun 2023 di bawah binaan Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep pelaksanaan kerja sama rekognisi pembelajaran lampau bagi LKP dan PT;
2. Konsep asesmen capaian pembelajaran LKP oleh perguruan tinggi penyelenggara RPL;
3. Mekanisme pelaksanaan RPL peserta LKP di PT;
4. Naskah kerja sama antara 213 LKP + 54 LKP dengan 20 PT penyelenggara RPL;
5. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Pasca Penandatanganan Mou RPL Bagi Lulusan LKP di PT

Unsur dan peserta kegiatan Orientasi Teknis Kerjasama LKP dengan PT adalah sebagai berikut:

1. Dirjen Pendidikan Vokasi.
2. Direktur Ditsuslat.
3. Koordinator Kelompok Kerja Kelembagaan, Ditsuslat.

4. Koordinator kelompok kerja PKW, Ditsuslat
5. Koordinator Kelompok Kerja Pembelajaran dan Uji Kompetensi, Ditsuslat.
6. Koordinator Kelompok Kerja Pendidikan Kecakapan Kerja, Ditsuslat.
7. Kasubbag Tata Usaha, Ditsuslat.
8. Anggota Tim Kerja Pokja Kelembagaan.
9. 20 Rektor Perguruan Tinggi.
10. 213 LKP + 54 LKP (luring & daring).
11. Koordinator Bidang Pelayanan Umum, Kerja Sama, Humas, dan Publik, Setditjen Pendidikan Vokasi.
12. Pokja Publikasi Setditjen Pendidikan Vokasi dan Publikasi satker Ditsuslat.
13. Pokja Kerjasama Dalam Negeri Ditjen Pendidikan Vokasi.
14. Tim Teknis.
15. BKHM.

## 6. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPL LKP dengan PT



Tujuan dilakukan kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPL LKP dengan PT adalah mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan RPL LKP ke perguruan tinggi, menyusun peta kesesuaian jenis keterampilan hasil kursus dan pelatihan dengan program studi yang tersedia pada perguruan tinggi yang bekerjasama, merumuskan rekomendasi tindak lanjut pendampingan LKP dalam menerapkan program RPL.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut masing – masing perguruan tinggi yang bekerjasama memetakan jenis keterampilan kursus dan pelatihan yang relevan dengan program studi yang melaksanakan program RPL serta rekomendasi tindak lanjut pendampingan LKP dalam menerapkan program RPL.

Unsur dan peserta kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPL LKP dengan PT adalah sebagai berikut:

1. Dirjen Pendidikan Vokasi. Direktorat Kursus dan Pelatihan;
2. Perguruan Tinggi penyelenggara RPL;
3. Tim Pengembang Aplikasi;
4. Praktisi Kursus dan Pelatihan;
5. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memfasilitasi RPL untuk lulusannya

## 7. Sinkronisasi Penerapan RPL

Tujuan dilakukan kegiatan Sinkronisasi Penerapan RPL adalah menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan RPL bagi lulusan kursus dan pelatihan, mengidentifikasi bidang keterampilan yang sesuai dengan program studi



RPL di perguruan tinggi, merumuskan rencana pendampingan RPL LKP. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Informasi program RPL Kursus dan pelatihan diterima oleh peserta dari Politeknik
2. Peta bidang keterampilan yang sesuai dengan program studi RPL di Politeknik
3. Rumusan penerapan RPL LKP di Politeknik

Unsur dan peserta kegiatan Sinkronisasi Penerapan RPL adalah sebagai berikut:

1. Politeknik Negeri Batam
2. Politeknik Negeri Lampung
3. Politeknik Negeri Jakarta
4. Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta
5. Politeknik Negeri Bandung
6. Politeknik Negeri Malang
7. Politeknik Negeri Balikpapan
8. Politeknik Negeri Ujungpandang
9. DPP FP LKP
10. DPP HIPKI
11. Pichos - Tim Pengembang Aplikasi

## 12. Tim kerja Pokja Kelembagaan Direktorat Kursus dan Pelatihan

**8. Pendampingan Pelaksanaan RPL**

Tujuan dilakukan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan RPL adalah untuk:

1. Menyamakan pemahaman tentang penyelenggaraan RPL bagi lulusan kursus dan pelatihan;
2. Mengidentifikasi data lulusan, pengelola, serta instruktur kursus dan pelatihan yang potensial melanjutkan studi di perguruan tinggi melalui program RPL;
3. Mengidentifikasi bidang keterampilan yang sesuai dengan program studi RPL di Perguruan Tinggi; dan
4. Memfasilitasi LKP beraudiensi dengan Perguruan Tinggi

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. LKP menjajaki kerjasama dengan perguruan tinggi yang relevan
2. Perguruan tinggi dan LLDIKTI memahami program RPL juga bisa dilaksanakan bagi lulusan kursus dan pelatihan, tidak sebatas dari hasil pendidikan formal saja tetapi juga dari hasil pendidikan nonformal
3. Perguruan tinggi yang dikunjungi akan menyiapkan penerimaan jalur RPL bagi lulusan kursus dan pelatihan

Unsur dan peserta kegiatan Pendampingan Pelaksanaan RPL adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan ke Perguruan tinggi:
  - a. Universitas Negeri Medan
  - a. Politeknik Negeri Bali
  - a. Universitas Negeri Padang
  - b. Universitas Pendidikan Indonesia
    - a. Universitas Diponegoro
    - a. Universitas Sebelas Maret Surakarta
    - a. Universitas Brawijaya
    - a. Universitas Negeri Makassar
    - a. Universitas Negeri Gorontalo

2. Pendampingan yang difasilitasi LLDIKTI
  - a. LLDIKTI Wilayah I Medan
  - a. LLDIKTI Wilayah IV Bandung
  - a. LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta
  - a. LLDIKTI Wilayah VI Semarang
  - a. LLDIKTI Wilayah VII Surabaya
  - a. LLDIKTI Wilayah IX Makassar

### Dokumentasi Kegiatan



## Hambatan/Kendala

1

Keterbatasan program studi yang selaras dengan bidang keterampilan yang dibelajarkan di LKP dalam satu wilayah

2

Pembiayaan perkuliahan sebagian besar tidak terjangkau

3

Sistem penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL yang berbeda tiap perguruan tinggi

# Strategi/Tindak Lanjut



1

Untuk memperluas dan memperbanyak mitra perguruan tinggi penyelenggara program RPL maka perlu dilakukan kegiatan “Sinkronisasi dan Pendampingan Penyelenggaraan RPL Bagi Lulusan Kursus dan Pelatihan”. Sinkronisasi dilakukan dengan Politeknik Negeri dan LLDIKTI

2

Menjajaki ketersediaan beasiswa dari LPDP

3

Memetakan perguruan tinggi penyelenggara RPL yang sesuai untuk masing-masing bidang keterampilan kursus dan pelatihan



# Inovasi

1

Beberapa perguruan tinggi penyelenggara RPL bekerjasama sama dengan lembaga finansial untuk membantu pembiayaan kuliah mahasiswa program RPL

2

Menyusun konsep aplikasi pendataan penyelenggaraan RPL



# 11

## Jumlah LKP yang Siap Bertransformasi menjadi Akademi Komunitas

Saat ini di Indonesia berkembang berbagai jenis kursus yang menawarkan program beberapa bulan bahkan satu tahun dengan mendapatkan sertifikat dan penempatan kerja. Kursus diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang berada pada jalur pendidikan non formal sebagai pelengkap pendidikan formal. Bahkan beberapa di antara ada yang menamakan program setara diploma satu atau diploma dua walaupun bukan lembaga pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, Direktorat Kursus dan Pelatihan turut diberi mandat untuk menyelenggarakan fasilitasi pada program Transformasi LKP Menjadi Akademi Komunitas. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48 Tahun 2013 bahwa Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

**Target 2023**

**5 Lembaga**

**Realisasi 2023**

**5 Lembaga**

Konsep Akademi Komunitas menyelenggarakan program studi yang sesuai dengan potensi yang ada di suatu daerah. Selain itu, Akademi Komunitas bekerja sama dengan industri lokal yang ada di daerah untuk menghasilkan lulusan yang dapat bekerja di industri lokal. Akademi komunitas berperan aktif dalam menanggapi dan menerima setiap aspirasi yang bersifat saling membangun antara pemerintah daerah, masyarakat dan industri lokal dalam memajukan suatu daerah. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak lima LKP telah dinyatakan siap untuk bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/PTV, satu diantaranya sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) dan empat diantaranya sudah sampai ke proses verifikasi pada aplikasi Silemkerma.

Adapun rangkaian kegiatan pada Program LKP yang Siap Bertransformasi menjadi Akademi Komunitas adalah sebagai berikut:

- 1 Koordinasi Fasilitasi Transformasi LKP Menjadi AK/PTV**
- 2 Kurasi Fasilitasi Transformasi LKP Menjadi AK/PTV**
- 3 Sosialisasi Transformasi LKP Menjadi AK/PTV**
- 4 Verifikasi Teknis Transformasi LKP Menjadi AK/PTV**
- 5 Pendampingan Transformasi LKP Menjadi AK/PTV**
- 6 Bimbingan Teknis Transformasi LKP Menjadi AK/PTV**
- 7 Evaluasi Hasil Pendampingan**

### **1. Koordinasi Fasilitasi Transformasi LKP Menjadi AK/PTV**

Bertujuan merumuskan formulasi untuk penyusunan kegiatan Transformasi LKP Menjadi AK/PTV. Melibatkan tim dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya PTV, LL Dikti Wilayah 3, akademisi, praktisi, perwakilan 5 LKP (Puspita Martha, CMC, OTC, Widyagama, dan Tenshai Nihongo).

### **2. Kurasi Fasilitasi Transformasi LKP Menjadi AK/PTV**

Bertujuan mengkurasi LKP calon sasaran pendampingan tahun 2023. Pengisian data peminatan menghasilkan 209 LKP (tahap I) dan 89 LKP (tahap II). Seleksi berdasarkan persyaratan pendirian PTV menghasilkan 49 LKP. Melibatkan tim dari internal Direktorat Kursus dan Pelatihan termasuk Koordinator, perwakilan Organisasi Mitra, praktisi dan akademisi.



#### 4. Sosialisasi Transformasi LKP Menjadi AK/PTV

Bertujuan memberikan pemahaman kepada LKP terpilih mengenai pemenuhan persyaratan pendirian PTV. saat pelaksanaan, dilakukan konfirmasi ulang terkait kesanggupan LKP dalam pemenuhan persyaratan pendirian PTV dan menghasilkan 22 LKP. Melibatkan tim internal Ditsuslat, praktisi dan akademisi. Dilakukan secara daring kepada 49 LKP dan dilakukan seleksi lagi melalui wawancara.

No	Nama LKP	NPSN	Kab/Kota	Provinsi
1.	Sangkuriang Maritim Hotel Institute	K0261083	Kota Bogor	Jawa Barat
2.	LKP Budi Mulia Dua Culinary School	K0560788	Kab. Sleman	DIY
3.	P4M Mataram	K0561574	Kota Mataram	NTB
4.	LKP Bina Ilmu Ternate	K0564620	Kota Ternate	Maluku Utara
5.	LKP Itech	K5649787	Kota Metro	Lampung
6.	LKP LPP STKOM Sapta Computer	K5650183	Balangan	Kalimantan Selatan
7.	LKP Ulumul Qur'an	K5651151	Kab. Bekasi	Jawa Barat
8.	LKP Home Industri Cahaya	K5651710	Kab. Bojonegoro	Jawa Timur
9.	LKP Gen Computer	K5655013	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
10.	LKP Anugerah Lumajang	K5656195	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur
11.	LKP Diknaker Computer	K5658159	Kab. Pesisir Selatan	Sumatera Barat
12.	LKP Eka Mulya	K5658804	Kab. Semarang	Jawa Tengah
13.	LKP Yuwita	K5666714	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat
14.	LKP Hidayah	K5652136	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat
15.	LKP CMI	K5653013	Kab. Garut	Jawa Barat
16.	Hotel Academy Cianjur (HAC)	K9980810	Kab. Cianjur	Jawa Barat
17.	LKP Step Ahead Batam	K9990228	Kota Batam	Kepri
18.	LKP Duta Samudera Indonesia	K9990228	Kota Makassar	Sulawesi Selatan

No	Nama LKP	NPSN	Kab/Kota	Provinsi
19.	LKP IMDKOM Yogyakarta Cabang Bengkayang	K5651268	Kab. Bengkayang	Kalimantan Bara
20.	LKP Indobank	K5651527	Kab. Blora	Jawa Tengah
21.	LKP Abdi Bangsa	K5667474	Kab. Cianjur	Jawa Barat
22.	Excellent Hospitality	K0563281	Kab. Cilacap	Jawa Tengah

### 22 LKP yang memenuhi Persyaratan untuk bertransformasi menjadi AK/PTV

#### 4. Verifikasi Teknis Transformasi LKP Menjadi AK/PTV

Bertujuan melakukan verifikasi berkas terhadap kepemilikan lahan, legalitas badan hukum, kurikulum 1 dan 2 tahun serta MOU dengan DUDIKA, yang dimiliki oleh LKP. Melibatkan asesor dari Dit KLSD PTV dan narasumber dari LL Dikti Wilayah 3 Jakarta.

#### 5. Pendampingan Transformasi LKP Menjadi AK/PTV

Bertujuan memberikan pendampingan kepada LKP terkait pemenuhan persyaratan pendirian PTV. Dilakukan selama 3 hari dengan melibatkan tim direktorat beserta akademisi dan praktisi kursus dan pelatihan. Dilakukan dengan memeriksa kesiapan dokumen LKP untuk menuju tahapan permohonan rekomendasi dari LL Dikti kepada 16 LKP.

No	Nama LKP	Alamat	Kab/Kota	Provinsi
1.	Sangkuriang Maritim Hotel Institute	Jl. Jend. Sudirman No. 35	Jawa Barat	Kota Bogor
2.	LKP Ulumul Qur'an	Jl. Serma Achim Kp. Buaran Tambun Selatan	Jawa Barat	Kab. Bekasi
3.	LKP Yuwita	Jl. Leuwianyar No.107	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya
4.	LKP Hidayah	Jln. Pakuan No 3 Kawalimukti Kawali	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis
5.	LKP CMI	Jl. Merdeka No. 38 Rt. Kec.Tarongong Kidul	Jawa Barat	Kab. Garut
6.	Hotel Academy Cianjur (HAC)	Jl.KH. Abdullah Bin Nuh No.7	Jawa Barat	Kab. Cianjur

No	Nama LKP	Alamat	Kab/Kota	Provinsi
7.	LKP Home Industri Cahaya	Ds. katur,Kec. Gayam,Rt. 07 Rw. 02,	Jawa Timur	Kab. Bojonegoro
8.	LKP Anugerah Lumajang	Jl. Ahmad Yani Desa Sukosari Kecamatan Kunir	Jawa Timur	Kab. Lumajang
9.	LKP Eka Mulya	Gintungan kec. Ungaran barat	Jawa Tengah	Kab. Semarang
10.	LKP Indobank	Jl. Ronggolawe No.115 Balun Sawahan Cepu	Jawa Tengah	Kab. Blora
11.	LKP Budi Mulia Dua Culinary School	Jl. Raya Tajem, Wedomartani, Ngemplak	DI. Yogyakarta	Kab. Sleman
12.	LKP Step Ahead Batam	Ruko KDA Junction Blok B 8, Berlian	Kepulauan Riau	Kota Batam
13.	Paloma Academy	Komp. Nagoya City Center K 5	Kepulauan Riau	Kota Batam
14.	LKP Diknaker Computer	Jl. Simpang Lagan Kec.Linggo Sari	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan
15.	LKP Itech	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Kec. Metro Pusat	Lampung	Kota Metro
16.	LKP Gen Computer	Jl. H.M Arsyad km3	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur

### Daftar 16 LKP yang dilakukan Pendampingan Transformasi menjadi AK/PTV

#### 6. Bimbingan Teknis Transformasi LKP Menjadi AK/PTV

Bertujuan menjelaskan dan mendiskusikan aspek teknis terkait persyaratan dalam pendirian akademi komunitas dan memeriksa kelengkapan serta kebenaran dokumen usulan LKP menjadi Akademi Komunitas sebelum diajukan ke LLDikti untuk mendapatkan rekomendasi. Melibatkan tim Ditsuslat, praktisi dan akademisi, asesor dari Dit KLSD PTV, narasumber LL DIkti wilayah 3 Jakarta.

#### 9. Evaluasi Hasil Pendampingan

Bertujuan memperoleh kesimpulan sekaligus penilaian terhadap pelaksanaan program pendampingan transformasi LKP yang telah selesai dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan lembaga kursus dan pelatihan yang berkualitas dan memenuhi persyaratan pendirian AK/PTV. Adapun lima lembaga yang menjadi capaian di tahun 2023 ini yaitu LKP Puspita Martha, LKP Overseas Training Center, LKP Widyagama, LKP Cyber Media College, dan LKP LPP STKOM Saptas Computer.

## Hambatan/Kendala

1

Belum tersosialisasikannya dengan baik mengenai program Transformasi LKP Menjadi Akademi Komunitas/PTV kepada LL Dikti, LKP dan asesor Kelembagaan

2

Ketentuan pemenuhan persyaratan pendirian AK/PTV yang belum banyak diketahui oleh LKP sebagai sasaran program

3

Ketentuan persyaratan terkait luas lahan minimal dan pendidik yang harus dipenuhi dirasa memberatkan LKP

## Strategi/Tindak Lanjut

1

Memperbanyak frekuensi untuk sosialisasi program Transformasi baik daring maupun luring kepada LKP sasaran

2

Memasukkan paparan kebijakan pemenuhan persyaratan pendirian AK/PTV dalam setiap tahapan sosialisasi

3

Sedang diusulkan untuk ada keringanan terkait pemenuhan luas lahan berkoordinasi dengan Dit. KLSK dan LL Dikti melalui Bagian Hukum Seditjen Pendidikan Vokasi

4

Merancang kegiatan berkelanjutan dengan memperbanyak porsi bimbingan teknis untuk memudahkan pemahaman LKP terkait persyaratan yang harus dipenuhi

5

Melibatkan LKP yang telah mendapat SK pendirian AK/PTV dan/atau yang telah mendapatkan rekomendasi LL Dikti, sebagai narasumber dari praktik baik Transformasi Menjadi AK/PTV serta untuk memastikan partisipasi aktif LKP

# Inovasi



1

Membuat FAQ (*frequently asked question*) dan pemanfaatan WhatsApp grup untuk berkomunikasi terkait hal-hal dasar ketentuan pemenuhan persyaratan pendirian AK/PTV

12

## Program Bantuan Uji Kompetensi

Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Uji Kompetensi adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk mengikuti uji kompetensi yang dikelola oleh Lembaga Sertifikasi. Dana bantuan penyelenggaraan uji kompetensi seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



Tujuan program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Uji Kompetensi yaitu untuk memperluas akses bagi masyarakat untuk mengikuti uji kompetensi, meningkatkan kualitas dan penjaminan mutu hasil pendidikan kursus dan pelatihan melalui uji kompetensi, meningkatkan jumlah peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk memiliki sertifikat kompetensi.

**Target 2023**

**20 Lembaga**

**Realisasi 2023**

**16 Lembaga**

Sasaran program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Uji Kompetensi adalah peserta didik kursus dan pelatihan dan

warga masyarakat yang belajar mandiri dengan kriteria berusia 17 sampai dengan 30 tahun,

WNI yang berdomisili di dalam atau luar negeri, bukan penerima bantuan pemerintah program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) tahun 2024 ; dan tidak berstatus sebagai peserta didik pada pendidikan formal. Pada tahun 2023, sebanyak total 6.436 orang telah menerima bantuan uji kompetensi.

Tata cara pengajuan bantuan uji kompetensi melalui aplikasi Si-Kompeten dapat dilihat



sebagaimana sebagai berikut:

### Tahapan Pengajuan Uji Kompetensi

Setelah melalui serangkaian tahapan, pada tahun 2023 dari total target sebanyak 20 LSK hanya sebanyak 16 LSK yang mendaftar penyelenggaraan UJK dengan detail yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

No	Nama TUK	Provinsi	Kabupaten	Nama LSK
1.	TUK LKP Probest	Jawa Timur	Kota Surabaya	LSK Broadcasting
	TUK LKP Puspadata	D.I. Yogyakarta	Kab. Bantul	
	TUK LKP Smart Station	Kalimantan Barat	Kab. Landak	
	TUK LKP Yale Communication	Kalimantan Barat	Kab. Kuburaya	
	TUK PKBM Ziona	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	
	TUK SMK IT Aisyiyah	D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Selatan	
2.	Lembaga Bahasa LIA Depok	Jawa Barat	Kota Depok	LSK Bahasa Inggris
	LKP English Junction	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	

No	Nama TUK	Provinsi	Kabupaten	Nama LSK
	LA Pansy English Speakers House	Jawa Tengah	Kab. Klaten	
	Vijaya Learning Center	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	
	LKP Starlet Course	Maluku	Kota Ambon	
	LKP Widya	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	
	LKP Via English Course	Riau	Kab. Indragiri Hilir	
	Rafa's English House (ROSE)	Jawa Timur	Kab. Jember	
	BBC-ETS Rawamangun	D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Timur	
	LKP Mr. Hanz Education Centre (MEC) Bangkalan	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	
	LKP Danish Adyatma	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	
	LKP ILF (Internasional Language Foundation)	Jawa Timur	Kab. Lamongan	
	TUK BIG Casel Islamic English House	Sumatera Utara	Kota Medan	
	LKP Family Institute	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	
	Genius Education Centre	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	
3.	Lasa Padma Trawang	Jawa Timur	Kota Blitar	LSK Batik
	Alfa Group Education	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	
	M. Nur	Jawa Timur	Kab. Magetan	
	Regina	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	
	Ganesha	Jawa Timur	Kab. Malang	
	PKBM Handayani	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	
4.	PKBM Handayani	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	LSK Bordir dan Sulam
	LKP Averrous	Jawa Timur	Kota Pasuruan	
	Ganesha	Jawa Timur	Kab. Malang	
5.	Amanah Husada Probolinggo	Jawa Timur	Kota Probolinggo	LSK Pekerja Kesehatan
	Delfi	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	
	Satria Husada	Jawa Tengah	Kab. Pemasang	
	Medika Bina Husada	Jawa Tengah	Kota Tegal	
	Sukma Medika Pemasang	Jawa Tengah	Kab. Pemasang	
6.	BPLE Tiara Course Denpasar	Bali	Kota Denpasar	Lsk Otomotif Teknik Sepeda Motor
7.	TUK Pratama Mulia	Jawa Timur	Kota Probolinggo	LSK Pengasuh Anak
8.	SKB Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	LSK Pendidik PAUD
	SKB Jepara	Jawa Tengah	Kab. Jepara	

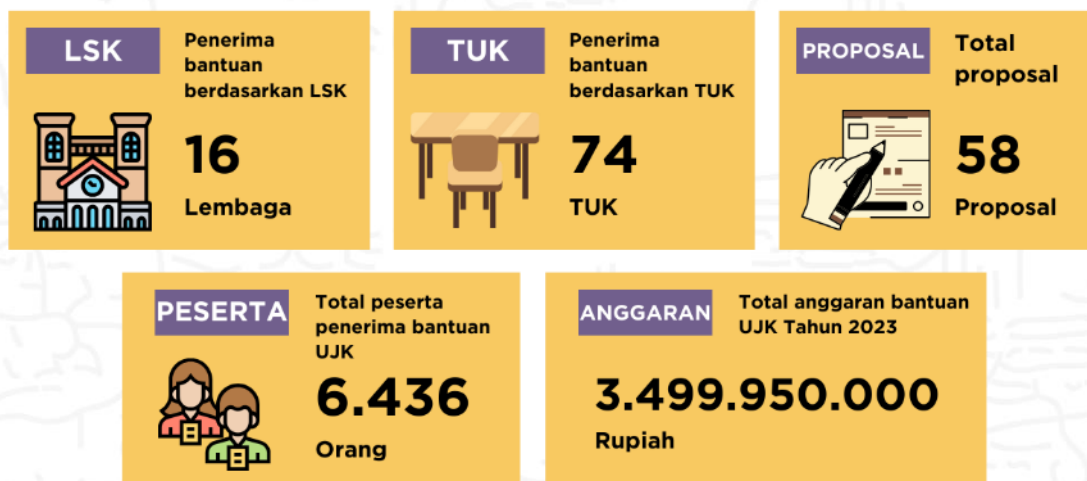
No	Nama TUK	Provinsi	Kabupaten	Nama LSK
	PAUD Islam Aidin Kota Dumai	Riau	Kota Dumai	
	TKIT Nurul Hidayah Kab. Sampang	Jawa Timur	Kab. Sampang	
9.	LKP Prisma Course and Training	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	LSK Sekretaris
	Widyaloka Palu	Sulawesi Tengah	Kota Palu	
10.	Bina Mutu Bangsa	Jawa Barat	Kota Depok	LSK Barista
	LKP Sugeng Sejahtera	Jawa Barat	Kota Bandung	
	LKP American English Course	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	
11.	TUK PKPI Bali	Bali	Kota Denpasar	LSK Perhotelan dan Kapal Pesiar Indonesia
	PHI Pekanbaru	Riau	Kota Pekanbaru	
	VOYAGER INTERNATIONAL SCHOOL	Lampung	Kota Bandar Lampung	
	Abdi Bangsa Institute	Jawa Barat	Kab. Cianjur	
	TUK Budi Mulia Dua Culinary School	D.I. Yogyakarta	Kab. Sleman	
	Bogor Hospitality Institute (BHI)	Jawa Barat	Kota Bogor	
	Duta Samudera Indonesia	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	
	Intan Pariwisata Garut	Jawa Barat	Kab. Garut	
	TUKS PKPI	Jawa Barat	Kab. Cianjur	
	BLUE OCEAN	Jawa Tengah	Kota Surakarta	
	International Hotel Management School (IHS)	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	
	Study Hotel Executive	Jawa Timur	Kota Kediri	
	P4M Mataram	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	
	Duta Persada	D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	
	OMEGA MARINE HOTEL INSTITUTE	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	
	Graha Wisata Hotel School	Jawa Tengah	Kota Semarang	
12.	TUK PRPI LP3T KOTA BEKASI	Jawa Barat	Kota Bekasi	LSK Pijat Refleksi Persatuan Indonesia
13.	TUK PITRA GRAHA KARANA	Jawa Barat	Kota Depok	LSK Pitra Indonesia
14.	AL-AMANA	Jawa Barat	Kab. Bandung	LSK Tata Boga



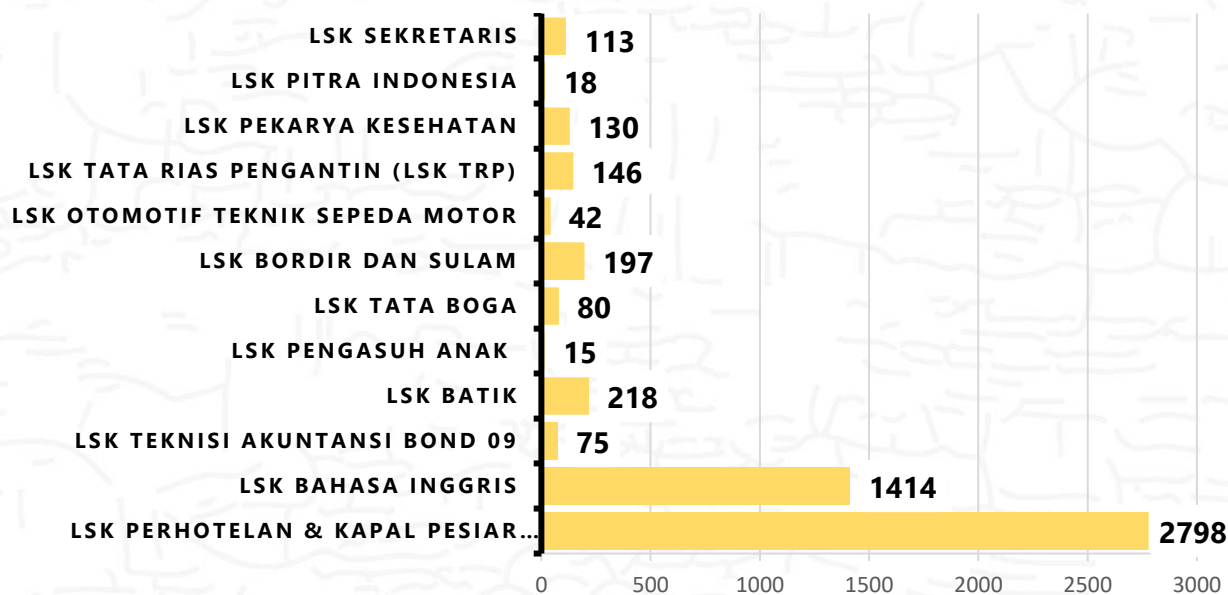
No	Nama TUK	Provinsi	Kabupaten	Nama LSK
15.	MP TATA RIAS	Aceh	Kab. Pidie	LSK Tata Rias Pengantin (LSK TRP)
	WIDYA	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	
	TUK NAN'S	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	
	TUK ANDY	Jawa Tengah	Kab. Jepara	
	HENDRIK	Jawa Tengah	Kota Surakarta	
	SANITA	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	
16.	JAKARTA SPEED ACADEMY	Jawa Barat	Kota Bekasi	LSK Teknisi Akuntansi Bond 09
	LKP KILAT	Jawa Barat	Kab. Kuningan	
	LPBM Pembina	D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Barat	

### Daftar Lembaga Penerima Bantuan Uji Kompetensi 2023

#### Penetapan Bantuan Uji Kompetensi



#### Sebaran Peserta Uji Kompetensi



Dari grafik di atas terlihat bahwa LSK Perhotelan dan Kapal Pesiar Indonesia adalah lembaga dengan peserta yang paling banyak menerima bantuan uji kompetensi. Hal ini menunjukkan kebutuhan uji kompetensi pada bidang keterampilan perhotelan dan kapal pesiar masih cukup tinggi jika dibandingkan LSK lainnya.

No.	LSK	Kompeten	Tidak Kompeten	Tidak Hadir	Total
1	LSK Perhotelan Dan Kapal Pesiar Indonesia	2688	109	1	2798
2	LSK Bahasa Inggris	543	871	0	1414
3	LSK Teknisi Akuntansi Bond 09	32	43	0	75
4	LSK Batik	216	2	0	218
5	LSK Pengasuh Anak	15	0	0	15
6	LSK Tata Boga	77	3	0	80
7	LSK Bordir Dan Sulam	196	0	1	197
8	LSK Otomotif Teknik Sepeda Motor	41	1	0	42
9	LSK Tata Rias Pengantin	137	3	6	146
10	LSK Pegawai Kesehatan	124	6	0	130
11	LSK Pitra Indonesia	17	0	1	18
12	LSK Sekretaris	43	53	17	113
13	LSK Pendidik Paud	127	81	21	229
14	LSK Broadcasting	687	133	2	822
15	LSK Barista	66	29	0	95
16	LSK Pijat Refleksi Persatuan Indonesia	44	0	0	44
<b>Grand Total</b>		<b>5053</b>	<b>1334</b>	<b>49</b>	<b>6436</b>

#### Hasil Uji Kompetensi Peserta Didik

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 6.436 peserta yang menerima bantuan uji kompetensi, sebanyak 5.053 dinyatakan sudah kompeten atau capaian kelulusannya sebesar 78,51%.

## Hambatan/Kendala

1

Sebagian Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) memiliki tingkat kelulusan dibawah 75%

2

Kurangnya SDM di LSK dalam pelaksanaan uji kompetensi

## Strategi/Tindak Lanjut

1

Direktorat Kursus dan Pelatihan dan LSK terkait melakukan evaluasi dan penguatan untuk meningkatkan persentase kelulusan

2

Mengikutsertakan operator LSK maupun pengelola TUK dalam kegiatan bimbingan teknis yang difasilitasi oleh Direktorat

## Inovasi

1

Pendaftaran peserta uji kompetensi terintegrasi dengan dukcapil

2

Penerbitan Sertifikat Kompetensi elektronik (e-sertifikom) langsung dapat diunduh setelah dinyatakan kompeten

3

Penelusuran keabsahan sertifikat kompetensi melalui aplikasi Versikom

4

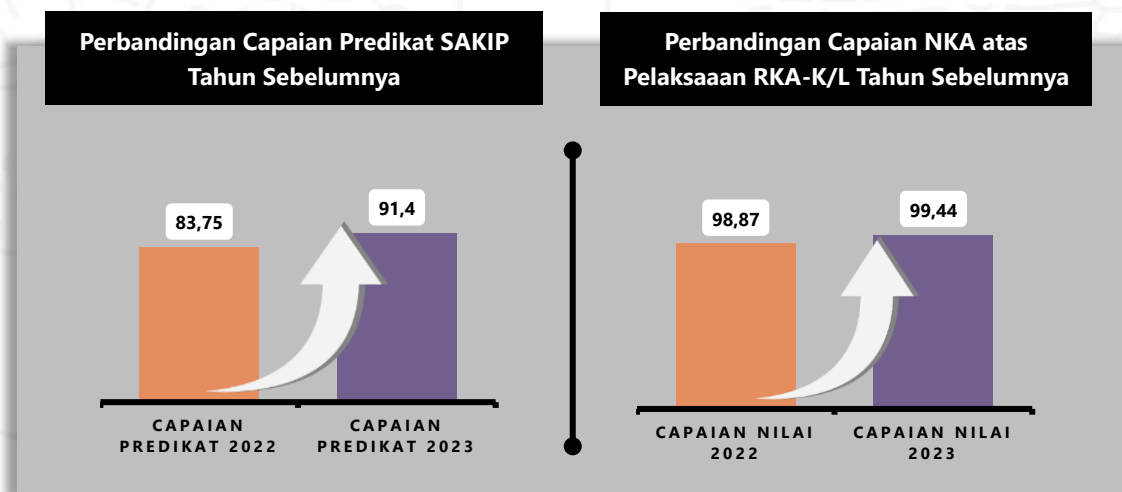
Laporan dapat diunduh secara otomatis melalui aplikasi Si Kompeten



### SASARAN KEGIATAN 3

## Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

Tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan selama tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Capaian sasaran kegiatan ini ditandai dengan peningkatan predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan yang dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.



Pada tahun 2023 Predikat SAKIP yang diperoleh Direktorat Kursus dan Pelatihan adalah **AA** dengan nilai **91,40** sementara NKA sebesar **99,44** hasil capaian tahun 2023 ini cenderung meningkat dibandingkan capaian di tahun sebelumnya. Adapun keberhasilan dari capaian pada sasaran ini diukur oleh dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu,

1. Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan; dan
2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan

## Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3.1

### Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan



SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP))

Penilaian SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berdasar pada 4 komponen penilaian yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (30%)

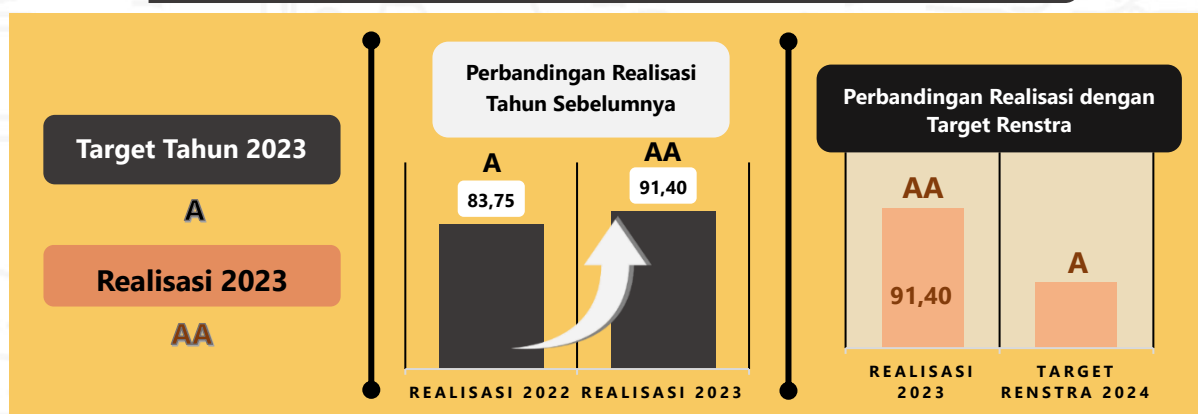
3. Pelaporan Kinerja (15%)

2. Pengukuran Kinerja (30%)

4. Evaluasi Kinerja (25%)

Direktorat Kursus dan Pelatihan menetapkan target A untuk predikat SAKIP baik di dalam Renstra maupun di Perjanjian Kinerja untuk tahun 2023. Berdasarkan realisasi di tahun 2023, hasil penilaian SAKIP dapat melampaui target yaitu dengan meraih **predikat AA** dan nilai yang didapat sebesar **91,40**. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022, terjadi peningkatan capaian sebanyak **7,65**.

### Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023



Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja kegiatan di atas, digunakan formula yang terdapat dalam definisi operasional yang ada di dalam Renstra yaitu sebagai berikut:

## METODE PERHITUNGAN

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Keterangan

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

- **Satuan** : Predikat
- **Tipe Penghitungan** : Nonkumulatif
- **Unit Pelaksana** : Direktorat Kursus dan Pelatihan
- **Sumber Data** : Laporan hasil evaluasi SAKIP



Direktorat Kursus dan Pelatihan secara berkala melakukan evaluasi internal untuk melihat faktor utama yang mendukung ataupun menghambat pencapaian target kinerja. Dalam rangka menjaga kualitas kinerja, Direktorat Kursus dan Pelatihan juga secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada seluruh *stakeholder* melalui berbagai program.

Dalam Perjanjian Kinerja Direktur Kursus dan Pelatihan Tahun 2023, ditargetkan nilai predikat satker minimal A dan telah terealisasi predikat SAKIP di tahun 2023 yaitu AA dengan total nilai sebesar **91,40**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2022 terjadi **peningkatan sebesar 7,65 poin**. Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai lingkungan Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk meningkatkan akuntabilitas. Realisasi IKK yang melampaui target ini disebabkan oleh:

1. Direktur selaku pimpinan memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, pimpinan juga memiliki komitmen untuk membawa satker berkinerja melampaui dari target yang ditentukan;
2. Pencapaian nilai komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja seluruhnya telah memenuhi standar kriteria yang telah ditetapkan;
3. Proses pengumpulan data pada aplikasi SPASIKITA dapat dilakukan sesuai dengan kriteria dan dilaksanakan tepat waktu;
4. Melakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan berbagai unsur internal secara rutin sehingga kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dicari upaya pemecahan masalahnya dengan segera; dan
5. Melakukan inovasi di berbagai program untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sasaran penerima layanan.



## Kendala/ Masalah

**1**

**Perlu ada perubahan pada Renstra karena terdapat salah satu program yaitu Program Microcredential yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterkaitan dengan program di satker lain yang belum berjalan. Di sisi lain, terdapat program baru yaitu LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/Perguruan Tinggi Vokasi yang baru diinisiasi di akhir tahun 2022 sesuai dengan perubahan arah kebijakan Ditjen. Pendidikan Vokasi sehingga belum masuk ke dalam hitungan definisi operasional yang ada di Renstra**

**2**

**Hasil pengukuran kinerja per triwulan belum menjadi perhatian seluruh pegawai di Direktorat Kursus dan Pelatihan**

# Langkah Strategi

**1**

Melakukan perubahan pada perhitungan definisi operasional Renstra untuk menurunkan Program Microcedential dan menambahkan program baru yaitu LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/Perguruan Tinggi Vokasi sebagai program utama pendukung dalam pencapaian IKK 2.1- Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

**2**

Hasil dari laporan pengukuran kinerja perlu disosialisasikan ke seluruh pegawai di internal satker agar dapat menjadi perbaikan bagi seluruh pegawai di Direktorat Kursus dan Pelatihan

## Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan



Berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Kinerja Anggaran dievaluasi berdasarkan pengukuran, penilaian, dan analisis tahun anggaran



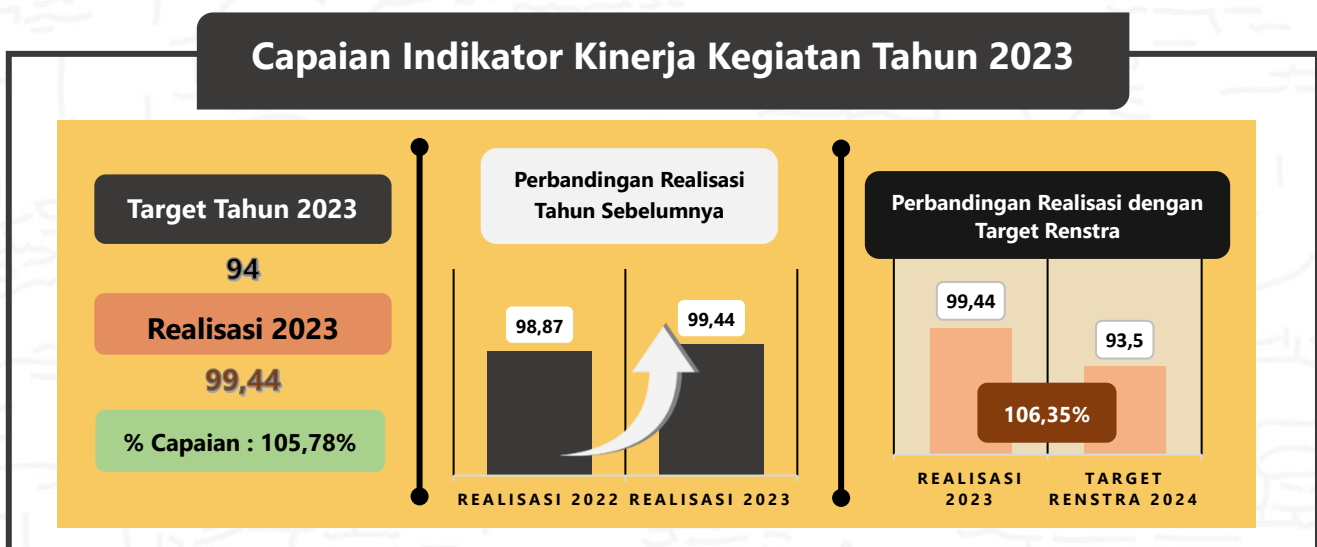
berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Penilaian kinerja anggaran dilakukan atas 2 indikator, yaitu: Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA). IKPA Berkontribusi 50% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 50%.

Pada tahun 2023, capaian NKA Direktorat Kursus dan Pelatihan sebesar **99,44** telah melampaui target awal yaitu **94** sehingga presentase capaiannya adalah sebesar **105,78%**. Melihat capaian di tahun 2022, terjadi peningkatan capaian sebanyak **0,57** dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2024 yakni dengan nilai sebesar **93,5** maka realisasi tahun 2023 adalah sebesar **106,35% dari target renstra tersebut**.

Realisasi yang melampaui target ini didukung oleh komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala didukung oleh komitmen bersama dengan tim yang terlibat untuk tertib dalam realisasi anggaran sesuai rencana di tiap periodenya. Selain itu, capaian output juga selalu dilaporkan setiap bulannya dengan tepat waktu melalui aplikasi SAKTI.

Untuk menghasilkan nilai NKA yang lebih optimal, Direktorat Kursus dan Pelatihan selalu berstrategi melalui berbagai macam inovasi untuk memaksimalkan capaian output. Inovasi-inovasi yang selalu dikembangkan setiap tahunnya telah mendorong peningkatan NKA di setiap tahunnya yang dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.



## METODE PERHITUNGAN

$$NKA = \frac{50\% \times EKA + 50\% \times IKPA}{100\%}$$

### Keterangan

- **Satuan** : Nilai
- **Tipe Penghitungan** : Nonkumulatif
- **Unit Pelaksana** : Direktorat Kursus dan Pelatihan
- **Sumber Data** : Laporan hasil evaluasi SAKIP
- **Polarisasi Indikator** : Maksimal
- **Periode Pengumpulan Data** : Tahunan



## Kendala/ Masalah

**1**

Defiasi anggaran sempat diatas 5% karena adanya penambahan anggaran BA-BUN di tanggal 24 juli 2023, sementara RPD ditutup tanggal 14 juli sehingga anggaran BA-BUN belum bisa masuk di RPD TW 3 dan 4

**2**

Adanya duplikasi sasaran RO pada aplikasi SMART akibat penambahan anggaran BA-BUN sehingga memberi pengaruh dalam perhitungan

**3**

Terjadinya perubahan mekanisme capaian output di SAKTI yang tadinya linier dengan penyerapan anggaran lalu berubah menjadi kesesuaian terhadap target yang ditetapkan

# Langkah Strategi

**1**

Mengajukan surat dispensasi ke DJPB tentang permohonan dispensasi penyesuaian RPD dan hasilnya dilakukan penyesuaian perhitungan IKPA secara manual melalui penetapan yang akan diterbitkan oleh DJA pada periode akhir penilaian IKPA 2023

**2**

Melakukan koordinasi dengan DJA terkait penyesuaian RO pada aplikasi SMART dengan DIPA revisi terakhir dan DJA melakukan penyesuaian di SAKTI

**3**

Melakukan koordinasi dengan seluruh pokja untuk monitoring capaian agar sesuai dengan target yang ditetapkan

## Realisasi Anggaran



Pagu anggaran Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam DIPA tahun 2023 sebesar **Rp 346.293.663.000,-** dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar **Rp 346.011.302.399** dengan presentase daya serap sebesar **99,92%**. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Anggaran		% Realisasi Anggaran
				Pagu 2023	Realisasi 2023	
Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	55.420 Orang	69.472 Orang	287.197.749.000	287.183.555.903	<b>99,99</b>
Meningkatnya Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1.020 Lembaga	1.261 Lembaga	29.841.519.000	29.728.994.393	<b>99,62</b>
Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Kursus Dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Kursus dan Pelatihan	A	AA	29.254.395.000	29.098.752.103	<b>99,47</b>
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA -K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	94	99,44			

Persoalan anggaran masih terus berulang. Dapat dilihat dari segi perencanaan keuangan dan kegiatan, alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga yang kurang wajar, efisiensi, relevan dengan *output/outcome* yang direncanakan, sehingga belum cukup mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dari segi pelaksanaan, masih ditemukan ketidaksesuaian dengan jadwal/rencana kegiatan maupun kebutuhan idealnya, realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana, serta penyerapan anggaran yang rendah dan jauh dari pola ideal serta cenderung tidak proporsional yang akhirnya menumpuk di akhir tahun. Hal tersebut masih dianggap sebagai sebuah kelaziman tahunan.

Secara prinsip, permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok aspek berdasarkan penyebabnya, seperti : perencanaan anggaran, persiapan pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, mekanisme pembayaran, dan faktor lainnya seperti adanya beberapa faktor lain dari pelaksanaan anggaran yang menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan, seperti blokir dan juga refocusing anggaran.

Blokir menjadi momok yang menghambat dalam proses pelaksanaan anggaran yang mengakibatkan realisasi anggaran rendah, terlebih pembukaan blokir dilakukan pada semester pertama atau pada awal semester pertama, kedua dan ke empat pada tahun anggaran 2023.

Blokir dikenal ada dua jenis, pertama: blokir yang terjadi diakibatkan dokumen sebagai dasar pengalokasian belum dilengkapi, biasanya disebut juga blokir eksisting. Jenis blokir ini selalu terjadi, walaupun target dari pimpinan yang mengatakan "zero blokir". Memang masih diperlukan kerja keras dan kecermatan dalam proses penyusunan anggaran dari semua kelompok kerja pada satuan kerja (satker) Direktorat kursus dan pelatihan untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam PMK terkait. Kemudian blokir kedua dikenal dengan sebutan Automatic Adjustment (AA). Blokir AA merupakan kebijakan Pemerintah sebagai tindakan pencadangan anggaran akan kondisi perekonomian yang memburuk akibat dari krisis ekonomi atau pandemi yang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Anggaran AA ditahan sebagai cadangan, namun apabila kondisi perekonomian membaik dapat dilakukan pencairan setelah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.

Dengan kondisi ini, maka dilakukan langkah-langkah pelaksanaan dan pencairan anggaran dengan mempersiapkan proses pembukaan blokir yang ada pada tahun 2023 dengan berpedoman pada PMK Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, PMK Nomor 151/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023, PMK Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, dan PMK Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang menjadi dasar dalam Penyusunan dan Perencanaan Anggaran.

Anggaran merupakan alat bantu manajemen dalam menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi, komunikasi dan pengendalian, maupun alat untuk mengukur kinerja para manajer. Proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* merupakan penyusunan anggaran dimana manajemen puncak menyusun anggaran untuk organisasi keseluruhan, termasuk operasi level bawah. Pendekatan *bottom up* memungkinkan adanya partisipasi dari seluruh kelompok kerja beserta jajarannya atau pelaksana anggaran untuk berperan pada proses pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tahun 2023.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas perencanaan anggaran dapat berpengaruh secara signifikan terhadap revisi DIPA. Adanya peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan akan bisa dijadikan sebagai upaya yang baik dalam meminimalisir revisi DIPA yang dilakukan oleh satuan kerja tentunya. Untuk itu maka perlu adanya perubahan sistem perencanaan anggaran yang perlu dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan.



## Efisiensi Anggaran

Pagu awal Anggaran yang diterima satuan kerja Direktorat Kursus dan Pelatihan adalah sebesar **Rp 157.551.553.000**, dengan mengalami beberapa jenis blokir pada jenis belanja barang barang yaitu Rp 318.800.000, dan belanja modal yaitu Rp 2.516.943.000 dengan total blokir adalah berjumlah Rp 2.835.743.00.

Pada perkembangannya di semester pertama terjadi penambahan blokir kembali pada belanja pegawai yaitu sebesar Rp 238.555.000, kemudian pada belanja barang sebesar Rp 3.501.820.000, dan pada belanja modal jumlah blokir masih tetap dengan kondisi awal yaitu sebesar Rp 2.835.743.000.

Pada semester ketiga tepatnya pada bulan agustus tahun 2023, satuan kerja Direktorat Kursus dan Pelatihan mendapatkan tambahan anggaran melalui dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BABUN. Penambahan anggaran ini diperuntukan dalam rangka menambah sasaran program Prioritas Nasional (PN) dan juga *Major Project* (MP) melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja, Pendidikan Kecakapan Wirausaha dan Beasiswa Uji Kompetensi Peserta didik Kursus dengan jumlah anggaran tambahan sebesar **Rp 189.886.144.000,-**.

Kemudian di semester keempat atau tepatnya pada bulan oktober tahun 2023, terjadi realokasi pada belanja perjalanan dinas luar negeri yang dipindahkan kepada satuan kerja Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam rangka mendukung kerjasama internasional dengan lembaga terkait yang melakukan kerjasama pengembangan program kursus dan pelatihan dengan jumlah Rp 1.144.034.000,- sehingga pagu akhir menjadi **Rp 346.293.663.000,-** sampai dengan akhir desember tahun 2023.



Kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan non formal lewat kursus dan pelatihan semakin dinamis sesuai dengan kebutuhan DUDIKA. Salah satu peran pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek sebagai penyelenggara sistem pendidikan nasional akan semakin strategis dan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Hal inilah yang mendorong pemerintah berupaya dalam peningkatan kualitas kinerja salah satunya dengan menghadirkan sebuah inovasi. Inovasi tidak hanya untuk mempermudah layanan untuk masyarakat akan tetapi juga akan meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada. Pada tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan membuat beberapa inovasi yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.



### **Sinkronisasi Kurikulum melalui Aplikasi Banper PKK**

Pelaksanaan program PKK dari mulai pengajuan proposal, pelaksanaan pembelajaran, pelaporan, hingga *tracer study* alumni sudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berbasis *online* melalui aplikasi:

[banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkk/](https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkk/)





Pada tahun 2023, terdapat pengembangan aplikasi program PKK yaitu sinkronisasi dengan kurikulum yang sudah disusun. Direktorat Kursus dan Pelatihan selalu menyusun dan memperbaharui kurikulum kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan DUDIKA secara berkala. Akan tetapi, kurikulum ini belum digunakan lembaga secara menyeluruh sehingga ketika lembaga mengajukan proposal program PKK ditemukan terdapat beberapa lembaga memiliki kurikulum yang berbeda dengan yang sudah disusun oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya pengembangan fitur ini di aplikasi program PKK.



MENU Tahun 2024 LKP Test PKK Keluar

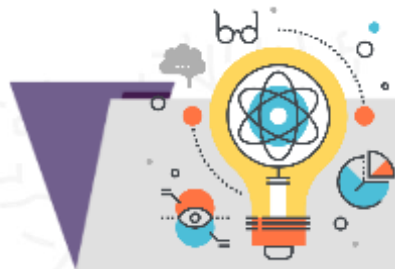
3 Kurikulum yang digunakan & Rencana Pembelajaran

Kurikulum dari Direktorat	Level	JPL	Dokumen materi tambahan dari dunia kerja (PDF)	
<a href="#">Kurikulum</a>	Jenjang 2	200 JPL	<a href="#">Materi Tambahan</a>	
16 Teori/Pengetahuan	Mampu menjelaskan teknik pengerjaan bagian-bagian busana	Pengelompokan macam- macam saku	2	0
17 Teori/Pengetahuan	Mampu menjelaskan teknik pengerjaan bagian-bagian busana	Pengelompokan macam-macam penutup busana	2	0
18 Teori/Pengetahuan	Mampu menjelaskan teknik pengerjaan bagian-bagian busana	Pengelompokan macam-macam junction	2	0
19 Teori/Pengetahuan	Mampu menjelaskan teknik pengerjaan bagian-bagian busana	Langkah-Langkah menjahit kelim	2	0
20 Teori/Pengetahuan	Mampu menjelaskan teknik pengerjaan bagian-bagian busana	Langkah-Langkah menjahit kampuh	2	0
21 Teori/Pengetahuan	Mampu menjelaskan teknik pengerjaan bagian-bagian busana	Langkah-Langkah menjahit garis leher/kerah	2	0

≡ Navigasi ↑ Scroll to Top

Kurikulum yang sudah disusun oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan dimasukkan ke dalam aplikasi di setiap materinya. Selanjutnya lembaga yang akan mengajukan proposal dapat menyusun kurikulum dengan memilih opsi materi apa saja sesuai yang ingin diajarkan

ke peserta didik. Adanya pengembangan fitur ini memudahkan lembaga dalam menyusun kurikulum, selain itu fitur ini juga membantu untuk memperkecil gap atau kesenjangan kurikulum antara yang disusun dengan yang diterapkan di lapangan.



## Sistem Informasi Uji Kompetensi Berbasis Online (SIKOMPETEN)

Sistem Informasi Uji Kompetensi Berbasis Online (SIKOMPETEN) ini adalah inovasi yang membantu registrasi dan pendataan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dalam menyelenggarakan uji kompetensi. Registrasi dan pendataan yang dimaksud dilakukan melalui sebuah website yang bernama SIKOMPETEN atau Sistem Informasi Uji Kompetensi melalui:

[banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/ujk/](https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/ujk/)



Pada tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan mengembangkan inovasi pada aplikasi SIKOMPETEN untuk mengubah mekanisme penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan uji kompetensi dari yang sebelumnya disusun hanya sekali setahun menjadi per rombel ujian. Inovasi dibuat untuk membuat administrasi menjadi lebih tertib, sehingga setelah pelaksanaan uji kompetensi di setiap rombel, maka pelaporannya bisa langsung diselesaikan dengan cepat.

Selain itu, pada aplikasi SIKOMPETEN juga kini dikembangkan inovasi presensi uji kompetensi dengan menggunakan fitur selfie/verifikasi wajah. Tujuannya adalah untuk mempermudah autentikasi identitas sehingga mengurangi risiko adanya pihak tertentu yang akan memanipulasi proses uji kompetensi.



## SIMantap atau Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kompetensi

Aplikasi SIMantap atau Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kompetensi adalah aplikasi yang dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan program-program kelembagaan kursus dan pelatihan diantaranya adalah Penilaian Kinerja Lembaga, Magang Instruktur dan Pengelola, PjBL, RPL, Pendampingan LKP bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/PTV serta Pusat Pengembangan Karier. Aplikasi SIMantap adalah aplikasi internal milik Direktorat Kursus dan Pelatihan yang dapat diakses melalui website

[banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/simantap/](https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/simantap/)



Salah satu pemanfaatan aplikasi ini adalah untuk melakukan monitoring pelaksanaan program-program kelembagaan yang mendukung IKK 2.1 - Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja. Di tahun 2023, aplikasi SIMantap dikembangkan dengan menambahkan menu instrumen pendampingan untuk program Pusat Pengembangan Karier, PJBL, dan program baru yakni LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/PTV. Tujuan dikembangkannya menu ini adalah untuk mempermudah tugas tim monitoring program untuk merekapitulasi data hasil kegiatan pendampingan.



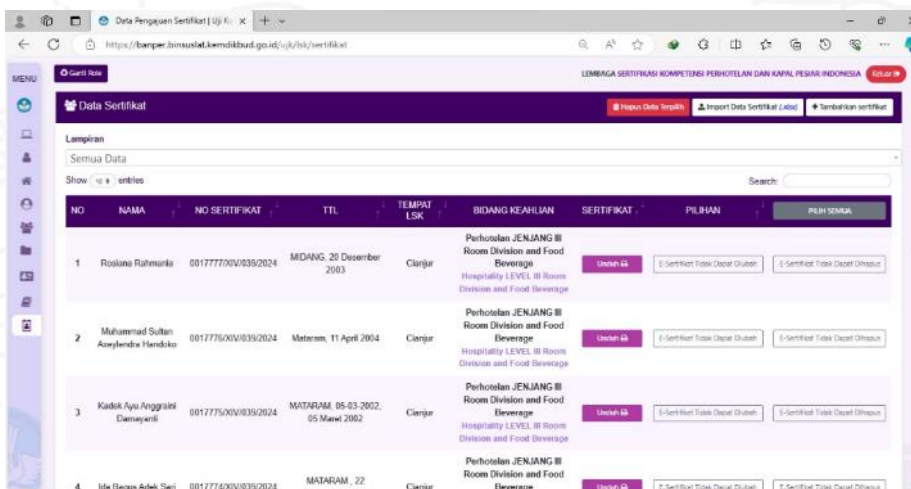


## Sertifikat Kompetensi Elektronik

Uji kompetensi adalah pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi dari hasil kursus dan pelatihan dengan menggunakan aplikasi SiKompeten. LSK selain sebagai penyelenggara uji kompetensi juga sebagai pelaksana dari sertifikasi kompetensi.

Sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi, bahwa penyediaan blanko sertifikat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Kursus dan Pelatihan. Sejalan dengan perkembangan digital yang semakin maju, blanko fisik sertifikat beralih menjadi berbasis elektronik. Hal ini juga berdampak pada penyediaan sertifikasi kompetensi oleh LSK yang sekarang mulai diberlakukan tanda tangan elektronik pada Sertifikat Uji Kompetensi. Pada kondisi sebelumnya, LSK harus mengambil blanko sertifikat ke Kantor Direktorat Kursus dan Pelatihan. Tetapi setelah adanya inovasi Sertifikat Kompetensi Elektronik, pengadaan untuk pembelian blanko sertifikat dapat dikurangi sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, lewat adanya sertifikat kompetensi elektronik ini proses sertifikasi dapat berjalan dengan lebih cepat.

### Sertifikat Elektronik pada aplikasi SIKOMPETEN



NO	NAMA	NO SERTIFIKAT	TTL	TEMPUL LSK	BIDANG KEAHLIAN	SERTIFIKAT	PILIHAN	PILIH SEMUA
1	Roslina Rahmania	001777700V/039/2024	MIDANG, 20 Desember 2003	Canjur	Perhotelan JENJANG III Room Division and Food Beverage Hospitality LEVEL III Rooms Division and Food Beverage	Unlaku IS	E-Sertifikat Tidak Dapat Diubah	E-Sertifikat Tidak Dapat Dihapus
2	Muhammad Sultan Asepjendra Handoko	001777500V/039/2024	Mataram, 11 April 2004	Canjur	Perhotelan JENJANG III Room Division and Food Beverage Hospitality LEVEL III Rooms Division and Food Beverage	Unlaku IS	E-Sertifikat Tidak Dapat Diubah	E-Sertifikat Tidak Dapat Dihapus
3	Kadek Ayu Anggraini Damayanti	001777500V/039/2024	MATARAM, 05-03-2002, 05 Maret 2002	Canjur	Perhotelan JENJANG III Room Division and Food Beverage Hospitality LEVEL III Rooms Division and Food Beverage	Unlaku IS	E-Sertifikat Tidak Dapat Diubah	E-Sertifikat Tidak Dapat Dihapus
4	Ide Bagus Adak Sani	001777400V/039/2024	MATARAM, 22 November 2004	Canjur	Perhotelan JENJANG III Room Division and Food Beverage	Unlaku IS	E-Sertifikat Tidak Dapat Diubah	E-Sertifikat Tidak Dapat Dihapus

### Contoh E-Sertifikat





Pada tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan menerima penghargaan dan apresiasi baik dari internal di lingkungan Kemendikbudristek maupun eksternal sebagai berikut.



Di tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan berhasil meraih penghargaan atas Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Terbaik Pertama Kategori Satuan Unit Organisasi Eselon II Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan nilai 98,87. Penganugerahan penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Kemendikbudristek, Nadiem Makarim sebagai bentuk apresiasi dari komitmen yang kuat dalam penerapan berbagai kebijakan serta mendorong kinerja unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kemendikburistek untuk memiliki kinerja terbaik. Penghargaan ini diberikan pada 30 Maret 2023 pada acara Penghargaan Mendikbudristek atas Kinerja Anggaran, SAKIP, dan Keterbukaan Informasi Publik 2022.



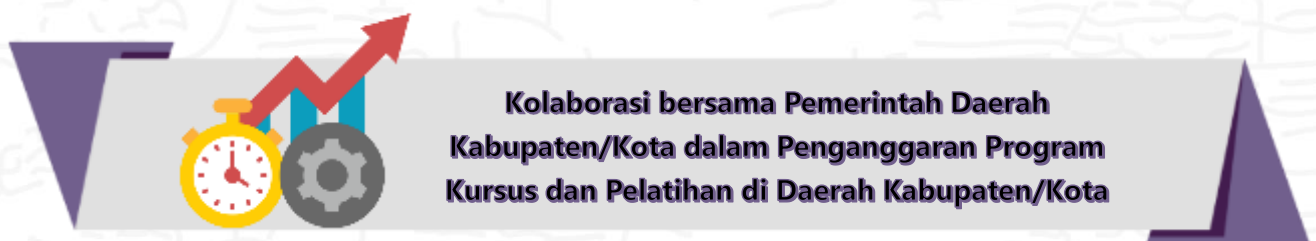
### Penghargaan oleh DEKRANAS Indonesia atas Kerja Sama Program PKW

Di tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional Indonesia atas kerja sama pada program Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam melakukan kolaborasi program PKW khususnya pada jenis keterampilan Tekun Tenun dan Kriya Indonesia. Kolaborasi yang telah berjalan selama 3 tahun sejak 2020 ini telah mendidik lebih dari 3.000 anak usia 15-25 tahun yang tidak sekolah, lulus tetapi tidak melanjutkan, atau putus sekolah yang masih belum bekerja, untuk memiliki kompetensi kerajinan tangan sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya nusantara anak di seluruh Indonesia.





Program *Crosscutting/Collaborative* dilakukan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tahun 2023 dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja serta mengoptimalkan capaian pada indikator kinerja kegiatan.



Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pembangunan kursus dan pelatihan bukan hanya menjadi agenda di pemerintah pusat melainkan perlu terjalin sinergitas antara pemerintah daerah (Pemda), dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), serta organisasi mitra kursus dan pelatihan.

Perpres Nomor 68 Tahun 2022 Pasal 22 mengamanatkan bahwa Pemda Kabupaten/Kota memiliki kewenangan terhadap pelatihan vokasi di lembaga pendidikan

nonformal. Lewat adanya Perpres tersebut, peran Pemda sangat erat dalam pendampingan dan pembinaan lembaga kursus dan pelatihan sehingga dapat mewujudkan revitalisasi vokasi di ranah kursus dan pelatihan.

Dari segi anggaran, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengalokasikan 20% dari APBD untuk urusan pendidikan di daerahnya masing-masing. Salah satu bentuk layanan pendidikan yang dapat diberikan adalah lewat pendidikan nonformal kursus dan pelatihan.

Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akhirnya akan mampu meningkatkan ketercapaian jumlah anak usia sekolah tidak sekolah dalam mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha serta jumlah satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

### Tujuan

Mengoptimalkan capaian pada Indikator Kinerja Kegiatan 1.1. - jumlah anak usia sekolah tidak sekolah dalam mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha serta Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 - jumlah satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kolaborasi ini akan meningkatkan kualitas sarana penyelenggara kursus dan pelatihan di LKP sehingga mampu menghasilkan angkatan lulusan yang siap kerja/berwirausaha serta meningkatkan kualitas sarana penyelenggara kursus dan pelatihan di LKP. Selain itu, kolaborasi lewat PKK dan PKW ini juga akan menyumbang capaian untuk sasaran Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran lewat pendampingan ATS melalui Program PKK dan PKW.

### Target

Satuan pendidikan kursus dan pelatihan di wilayah Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten masing-masing



## Peran

### 1. Direktorat Kursus dan Pelatihan

Memiliki program PKK dan PKW untuk memberikan bantuan kepada anak usia sekolah dan tidak sekolah dalam memperoleh pendidikan kecakapan kerja beserta ujian sertifikasinya, dan pendidikan kewirausahaan sebagai bekal melakukan wirausaha.

Selain itu, Direktorat Kursus dan Pelatihan juga memiliki program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja satuan pendidikan kursus dan pelatihan sehingga mampu menghasilkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan DUDIKA seperti contohnya melalui program PJBL, Kursus Daring, Unit Usaha/TEFA, Magang Instruktur/Pengelola, Peningkatan kompetensi bagi penguji uji kompetensi dan pengelola, RPL, PPK, penilaian kinerja, dan LKP siap bertransformasi menjadi AK/PTV.

### 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Membantu dalam pemberian izin pendirian LKP, alokasi bantuan dana untuk program teknis, alokasi dana untuk monitoring, alokasi dana untuk rapat koordinasi, alokasi dana untuk pemberian sarana dan prasarana, pemetaan DUDIKA yang membutuhkan lapangan pekerjaan, serta alokasi dana untuk pendanaan LKP

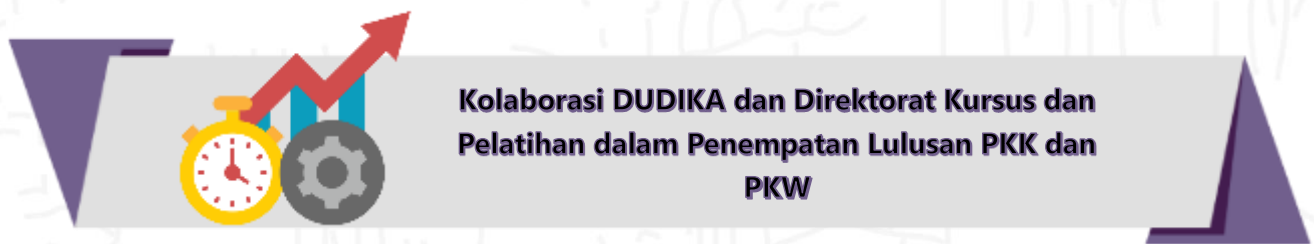
## Hasil

- Pembinaan LKP dalam peningkatan pelayanan kursus dan pelatihan
- Pemberian hibah uang dan hibah barang untuk pengembangan LKP
- Pemberian sarana dan prasarana

## Dampak

Bentuk keterlibatan setiap unsur dari pusat maupun daerah akan membantu dalam dalam mengakomodir lebih banyak anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha maupun peningkatan satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan DUDIKA. Lulusan kursus dan pelatihan yang difasilitasi dengan baik akan dapat terserap di DUDIKA sehingga dapat

membantu pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di masing-masing daerah yang ikut berkolaborasi.



Kolaborasi DUDIKA dan Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam penempatan lulusan PKK dan PKW adalah upaya yang dilakukan dengan cara berkoordinasi untuk menyalurkan lulusan langsung ke pelaku DUDIKA selaku pengguna lulusan. Sehingga para peserta didik setelah menyelesaikan sistem pembelajaran dalam program PKK dan PKW mampu terserap dengan tepat sasaran

### Tujuan

Mengoptimalkan capaian pada Sasaran Kegiatan 1 yaitu meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lewat kolaborasi Direktorat Kursus dan Pelatihan bersama DUDIKA, lulusan dari program PKK dan PKW akan ditempatkan di DUDIKA yang membutuhkan tenaga kerja

### Target

Peserta Didik Program PKK dan PKW

### Peran

#### 1. Direktorat Kursus dan Pelatihan

Memiliki program PKK dan PKW untuk memberikan bantuan kepada anak usia sekolah dan tidak sekolah dalam memperoleh pendidikan kecakapan kerja beserta ujian sertifikasinya, dan pendidikan kewirausahaan sebagai bekal melakukan wirausaha. Direktorat Kursus dan Pelatihan lewat program ini akan menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing di dunia industri dan dunia kerja

## 2. DUDIKA

Pemberian masukan dalam pemetaan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja sekaligus menjadi mitra penyalur ke dunia industri dan dunia kerja yang membutuhkan tenaga kerja.

### Hasil

Lulusan peserta didik program PKK dan PKW yang langsung terserap bekerja dan berwirausaha setelah menyelesaikan program

### Dampak

Pemberian masukan dalam pemetaan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja sekaligus menjadi mitra penyalur ke dunia industri dan dunia kerja yang membutuhkan tenaga kerja



Kolaborasi Program Penilaian Kinerja Lembaga dengan BBPPMPV adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk menyiasati pelaksanaan penilaian kinerja yang memiliki keterbatasan dalam anggaran dan juga SDM verifikator. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang menjadi sasaran dalam penilaian kinerja tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sementara SDM verifikator yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh target yang menjadi sasaran program secara optimal. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki BBPPMPV dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. BBPPMPV mampu menyediakan SDM verifikator yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program penilaian kinerja.

### Tujuan

Mengoptimalkan capaian pada Sasaran Kegiatan 2 yaitu meningkatnya jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lewat Program Penilaian Kinerja Lembaga

### Target

Lembaga kursus dan pelatihan yang dinilai kinerjanya

### Peran

#### 1. Direktorat Kursus dan Pelatihan

Memiliki program penilaian kinerja lembaga yang bertujuan untuk mengetahui dan mengukur kualitas lembaga kursus dan pelatihan dalam menyelenggarakan pendidikan kursus dan pelatihan yang berstandar DUDIKA.

#### 2. BBPPMPV

Merupakan UPT di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang memiliki lokasi dengan cakupan wilayah yang tersebar di Indonesia serta dapat menyediakan SDM verifikator yang akan membantu dalam penilaian kinerja lembaga di wilayah masing-masing.

### Hasil

Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang dinilai kinerjanya

### Dampak

Kolaborasi antara Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan BBPPMPV ini akan menghasilkan penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan. Sehingga dari hasil tersebut dapat dilihat bagaimana gambaran kinerja yang dicapai oleh lembaga. Selanjutnya dari hasil kolaborasi ini dapat ditetapkan kriteria lembaga kursus dan pelatihan yang dinilai perlu untuk mendapatkan pembinaan. Dan terakhir, hasil kolaborasi ini akan membantu menetapkan kebijakan program pembinaan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan lembaga sehingga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat tepat guna dan tepat sasaran.



## Kolaborasi Program LKP siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/PTV dengan LLDIKTI dan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi (KLSDPTV)

Kolaborasi Program LKP siap menjadi Akademi Komunitas/PTV dengan LLDIKTI dan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi (KLSDPTV) adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan basis pendidikan vokasional yang bertujuan untuk mengembangkan serta menyatukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan masyarakat di sekitarnya.

LKP merupakan salah satu institusi yang berguna bagi masyarakat untuk memperoleh bekal keterampilan, baik itu *hard skill* maupun *soft skill* untuk bekerja maupun berwirausaha. Hal ini selaras dengan tujuan didirikannya Akademi Komunitas yaitu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan lokal suatu daerah. Saat ini sudah banyak LKP yang mampu menunjukkan kinerja baik sehingga memiliki potensi yang strategis untuk bisa ditingkatkan menjadi akademi komunitas/PTV.

### Tujuan

Mengoptimalkan capaian pada Sasaran Kegiatan 2 yaitu meningkatnya jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lewat Program LKP siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/PTV

### Target

Lembaga Kursus dan Pelatihan yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/PTV

### Peran

#### 1. Direktorat Kursus dan Pelatihan

Memiliki program LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/PTV yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi LKP untuk dapat memenuhi persyaratan pendirian akademi komunitas/PTV

## 2. LLDIKTI

Lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi atas Pendirian Perguruan Tinggi baru termasuk perguruan tinggi vokasi (Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas)

## 3. Direktorat KLSDPTV

Satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang berwenang memberikan izin pendirian perguruan tinggi vokasi (Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas)

### Hasil

Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/PTV

### Dampak

Kolaborasi antara Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, dan LLDIKTI dalam mengoptimalkan capaian pada Program LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/PTV ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada LKP untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga mampu menyelenggarakan lebih banyak alternatif layanan pendidikan lewat pendirian Akademi Komunitas/PTV.



### Kolaborasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan Perguruan Tinggi

Kolaborasi Program RPL dengan Perguruan Tinggi adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan memberikan kesempatan lain bagi lulusannya untuk bisa melanjutkan studi ke pendidikan formal, selain memiliki pilihan untuk bekerja dan/atau berwirausaha. Untuk memaksimalkan capaian Program RPL ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk menyelaraskan kurikulum pembelajaran kursus dan pelatihan sehingga dapat direkognisi oleh pendidikan formal di Perguruan Tinggi.

### Tujuan

Mengoptimalkan capaian pada Sasaran Kegiatan 2 yaitu meningkatnya jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lewat Program RPL

### Target

Lembaga Kursus dan Pelatihan penyelenggara program RPL

### Peran

#### 1. Direktorat Kursus dan Pelatihan

Memiliki program RPL yang didalamnya berperan penting dalam melakukan Kerjasama dengan perguruan tinggi serta mampu memetakan dan melakukan pendampingan kepada lembaga kursus dan pelatihan yang menjadi sasaran program RPL

#### 2. Perguruan Tinggi

memberikan masukan dan informasi terkait kurikulum yang ada di perguruan tinggi yang bisa diintervensi sehingga dapat dilakukan sinkronisasi dengan kurikulum pendidikan kursus dan pelatihan, selain itu memberikan masukan terhadap perumusan petunjuk teknis pelaksanaan transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas

### Hasil

Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berpartisipasi pada Program RPL

### Dampak

Kolaborasi antara Direktorat Kursus dan Pelatihan dan Perguruan Tinggi dalam mengoptimalkan capaian pada Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini mampu meningkatkan kerjasama serta memberikan kepastian dan kesempatan lulusan peserta didik kursus dan pelatihan untuk dapat diakui penyetaraan kualifikasi, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki bagi pendidikan formal.



# BAB IV

## PENUTUP



Selama tahun 2023, Direktorat Kursus dan Pelatihan berhasil melaksanakan program atau kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Sehingga jika melihat realisasi pada seluruh IKK, semua capaiannya berhasil melampaui target. Berikut informasi pencapaian indikator kinerja kegiatan dan kinerja keuangan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	55.420 Orang	69.472 Orang	<b>125,35%</b>
Meningkatnya Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1.020 Lembaga	1.261 Lembaga	<b>123,67%</b>
Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Kursus Dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Kursus dan Pelatihan	A	AA (91,4)	
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA -K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	94	99,44	<b>105,78%</b>

## Kinerja Keuangan



# KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

## 1

**Komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan atau pendampingan pendidikan non formal kursus dan pelatihan di wilayahnya belum merata dan masih terbatas. Selain itu, peran aktif Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam padanan anggaran juga masih minim**

## 2

**Belum optimalnya pendampingan rintisan usaha yang dilakukan kepada lulusan peserta didik PKW. Salah satu penyebabnya karena tidak adanya anggaran untuk melakukan pendampingan lulusan program tersebut**

## 3

**Terbatasnya jumlah program studi yang selaras dengan bidang keterampilan di LKP serta biaya kuliah jalur RPL masih belum terjangkau**

## 4

**Luas lahan 5.000m<sup>2</sup> dan pendidik yang memenuhi kriteria sebagai syarat pendirian Akademi Komunitas/PTV masih sulit untuk dipenuhi**

## 5

**Target Renstra Direktorat Kursus dan Pelatihan belum sepenuhnya dipenuhi anggarannya**

# Upaya yang dilakukan

## 1

Melibatkan Pemerintah Daerah, DUDIKA, dan KemendesPDTT dalam agenda pelaksanaan program Ditsuslat baik dalam bentuk sosialisasi, diskusi terpumpun, dan seminar, serta menyiapkan konsep padanan anggaran bagi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pembinaan/pendampingan kursus dan pelatihan di wilayahnya untuk mendorong terbentuknya ekosistem kolaborasi yang lebih erat

## 2

Mendorong lembaga untuk berpartisipasi dalam program Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka serta mengarahkan lembaga untuk bekerjasama dengan UMKM dalam membantu pendampingan rintisan usaha

## 3

Dilakukan kegiatan sinkronisasi dengan Perguruan Tinggi yang terdaftar dalam Sierra, khususnya dengan Politeknik Negeri dan LLDIKTI. Sedangkan untuk mengatasi kendala pembiayaan dapat menajajaki ketersediaan beasiswa dari LPDP atau lembaga keuangan lainnya

## 4

Mengusulkan revisi Permendikbud No. 7 Tahun 2020 terutama mengenai luas lahan dan pendidik untuk persyaratan pendirian Akademi Komunitas

## 5

Mengusulkan penambahan dana lewat skema BA-BUN untuk memenuhi target renstra

Laporan Kinerja 2023



# LAMPIRAN

Direktorat Kursus dan Pelatihan



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Direktur Kursus dan Pelatihan  
Dengan  
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Wartanto**

**Jabatan : Direktur Kursus dan Pelatihan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Kiki Yuliati**

**Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Januari 2023

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,**

**Direktur Kursus dan Pelatihan,**



**Kiki Yuliati**



**Wartanto**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	19700
2	[SK 2] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1000
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	A
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	94

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 29.554.855.000
2	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp. 127.996.698.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 157.551.553.000</b>

Jakarta,30 Januari 2023

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,**

**Direktur Kursus dan Pelatihan,**



**Kiki Yulianti**



**Wartanto**



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan  
Dengan  
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Wartanto**

**Jabatan : Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Kiki Yuliati**

**Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Desember 2023

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,**

**Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan,**



**Kiki Yuliati**



**Wartanto**



## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	55420
2	[SK 2.0] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1020
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	A
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	94

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp. 317.039.268.000
2	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 29.254.395.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 346.293.663.000</b>

Jakarta, 29 Desember 2023

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,**

**Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan,**



**Kiki Yulianti**



**Wartanto**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN 1  
DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	orang	19700	<b>TW1 : 2955</b>	<b>TW1 : 4294</b>
1	[SK 2.0] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	lembaga	1000	<b>TW1 : 30</b>	<b>TW1 : 0</b>
1	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	Predikat	A	<b>TW1 : -</b>	<b>TW1 : -</b>
1	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	Nilai	94	<b>TW1 : -</b>	<b>TW1 : -</b>

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.157.551.553.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 12 Mei 2023 sebesar **Rp. 44.142.058.248** atau **28.02%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 12 Mei 2023 **Rp. 113.409.494.752**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja**

- IKK 1.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha

**Progress / Kegiatan :**

1. Program PKK: proses pencairan dana tahap 1 (SP2D) sebanyak 2.634 peserta didik
2. Program PKW: proses pencairan dana SK tahap 1 - 3 (SP2D) untuk tahap 1 sebanyak 155 peserta didik, tahap 2 sebanyak 850 peserta didik, dan tahap 3 sebanyak 655 peserta didik sehingga jumlah total peserta sebanyak 1660 peserta didik. Lembaga penyelenggara program PKK dan PKW sudah mulai pembelajaran

**Kendala / Permasalahan :**

1. Program PKK: a) Terdapat kendala saat penginputan data pada proses pengajuan proposal oleh lembaga karena adanya pengembangan aplikasi e-banper, b) Sistem aplikasi pelaporan pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan perencanaan masih dalam proses pengembangan, c Pelaksanaan pembelajaran sedikit terlambat dikarenakan ada penyesuaian fitur tambahan pada aplikasi e-banper
2. Program PKW: a) Terdapat kendala saat penginputan data pada proses pengajuan proposal oleh lembaga karena adanya pengembangan aplikasi e-banper, b) Monitoring pelaksanaan pembelajaran program PKW melalui aplikasi belum dilaksanakan secara merata dan terencana.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Program PKK: Melakukan koordinasi secara intensif dengan tim pengembang aplikasi untuk mempercepat kesiapan penggunaan aplikasi
2. Program PKW: Perlu dilakukan perencanaan teknis dan pendistribusian tugas monitoring pelaksanaan pembelajaran melalui aplikasi kepada seluruh tim pokja.

**B . SK 2.0 Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja**

- IKK 2.1 Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

**Progress / Kegiatan :**

1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Telah dilakukan sosialisasi SKL dan Kurikulum Review Bahan Ajar Audio Visual sesuai dengan SKL Kursus dan Pelatihan dimana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah melakukan proses produksi video yang rencananya akan dimulai di bulan april

dan dilakukan Penyusunan Naskah Skenario Video Bahan Ajar Program PKK

2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): Tahap revidi pedoman dan penyusunan perangkat pembelajaran melalui pendekatan PjBL
3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Tahap koordinasi penyelenggaraan kursus daring dan revidi pedoman penyelenggaraan kursus daring
4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Tahap revidi pedoman TEFA dan penguatan kerjasama dengan K/L, Pemda dan Ormit dalam pengembangan TEFA
5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Tahap uji publik pedoman, instrumen, dan aplikasi penilaian kinerja LKP
6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Tahap Penyusunan Program Magang Instruktur Kursus dan Pelatihan untuk bidang Tata Busana dan Tata Kecantikan Rambut
7. Jumlah penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tahap persiapan dan direncanakan akan diadakan kegiatan di bulan juni tahun 2023
8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tahap persiapan dan akan dilaksanakan bimtek di bulan april tahun 2023
9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Tahap Review Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Tahap Review pedoman LKP mempunyai pusat pengembangan karir
11. LKP yang siap bertransformasi menjadi AKOM: Koordinasi dan Kurasi Transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas/PTV dengan LLDIKTI, Dit KLSK, dan LKP.

#### **Kendala / Permasalahan :**

1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi SKL dan Kurikulum dikarenakan perbedaan kemampuan peserta dalam memahami materi yang disampaikan  
Pada review bahan ajar audio visual terdapat kendala sebelum maupun pada saat kegiatan yaitu pada saat penyusunan materi beberapa tim penyusun masih belum familiar dengan proses scripting  
Pada penyusunan naskah skenario video bahan ajar PKK kendalanya adalah belum dibentuknya tim penyusun naskah dan ada beberapa tim penyusun yang baru bergabung
2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): Masih kurang tersampaikan pemahaman akan penerapan pelaksanaan PjBL di LKP sehingga masih belum terselenggaranya pembelajaran berbasis masalah yang dapat membuat peserta didik memiliki inisiatif dan pengalaman terhadap ide dari wirausaha yang dilakukan
3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Banyak lembaga yang masih belum terbiasa menyelenggarakan pembelajaran dengan metode daring
4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Karena padatnya jadwal pimpinan dari pejabat eselon 1 di Ditjen Pendidikan Vokasi sehingga tidak bisa menghadiri acara
5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Terdapat 2 LKP yang tidak dapat melaksanakan uji publik sesuai jadwal
6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Dikarenakan adanya perbedaan mekanisme pelaksanaan magang tahun 2022 dengan pelaksanaan magang tahun 2023, sehingga dalam proses pelaksanaan magang dari mulai seleksi hingga proses magang di industri dirubah secara total
7. Jumlah penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tidak ada kendala
8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tidak ada kendala
9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: a) RPL melalui pengakuan kurikulum/program kursus dan pelatihan sebagai cara yang lebih efektif belum dapat ditempuh, karena prasyarat kurikulum/program pembelajaran yang dimiliki LKP tidak sesuai dengan kaidah sehingga PT kesulitan untuk menetapkan kesesuaiannya dengan mata kuliah, b) Belum ada regulasi seperti Permendikbudristek maupun Perdirjen yang mengatur RPL untuk LKP
10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Tidak ada kendala
11. LKP yang siap bertransformasi menjadi AKOM: a) pemenuhan persyaratan luas lahan/space menjadi kendala bagi LKP, b) terindikasi jumlah LKP yang memenuhi persyaratan relatif terbatas

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Pada pelaksanaan sosialisasi SKL dan Kurikulum adalah dengan menyusun tata cara yang mendukung partisipasi dalam memahami instruksi teknis secara jelas  
Pada review bahan ajar audio visual strateginya adalah dengan melakukan proses review terhadap script bahan ajar audio visual bersama tim penyusun script dan kru bagian produksi video  
Pada penyusunan naskah skenario video bahan ajar PKK strateginya adalah dengan memetakan jenis keterampilan yang akan dibuatkan video bahan ajarnya yang sesuai kebutuhan peserta didik dan melakukan pendampingan dari Narasumber
2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): Melakukan penyempurnaan pedoman dan perangkat pembelajaran PjBL dan perangkat pembelajaran yang telah disesuaikan dengan program PKW sehingga pada pelaksanaannya lembaga dapat mudah menerapkan PjBL dan peserta didik mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan wirausaha mikro yang diinisiasi oleh lembaga dan rintisan wirausaha mandiri yang didapatkan melalui program PKW serta memproses untuk segera membuat Perdirjennya
3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: a) Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap hasil pembelajaran, b) Monitoring dan evaluasi bagi lembaga yang menyelenggarakan pembelajaran secara daring lewat aplikasi dan membuat database lembaga yang termasuk kategori basic, intermediate dan advance
4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Menjadwalkan kepastian kehadiran pejabat Es I
5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: LKP yang tidak melaksanakan uji publik dijadikan sasaran PK LKP secara daring
6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Masing-masing bidang keterampilan membuat teknis proses pemagangan dari seleksi sampai evaluasi
7. Jumlah penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tidak ada strategi atau tindak lanjut
8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tidak ada strategi atau tindak lanjut
9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: PT mitra LKP melaksanakan bimbingan untuk rekonstruksi kurikulum dan membuat regulasi mengenai RPL untuk LKP agar ada peraturan yang jelas mengenai program RPL dan saat ini sudah disampaikan ke Dirjen Pendidikan Vokasi dan Dirjen menginstruksikan kepada Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi untuk segera membuat Perdirjennya
10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Perguruan Tinggi yang menjadi mitra LKP melaksanakan pembimbingan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

rekonstruksi kurikulum

11. LKP yang siap bertransformasi menjadi AKOM: a) Direktorat Kursus dan Pelatihan dan Direktorat Kelembagaan dan Sumberdaya melakukan pertemuan konsultatif dengan Dirjen dan hasilnya Dit Suslat menyusun draft Perdirjen DIKSI tentang Pedoman Perubahan LKP menjadi PTV, dan Dit KLSD menyusun draft Perdirjen DIKSI tentang Pendirian dan Penutupan Akademi Komunitas. Kedua perdirjen ini diharapkan akan menjadi dasar yuridis/regulasi yang afirmatif bagi LKP yang akan meningkatkan statusnya menjadi PTV, b) Dilakukan relaksasi persyaratan khususnya luas lahan bagi LKP yang akan bertransformasi menjadi PTV

### C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Melakukan pengumpulan kelengkapan dokumen
2. Melakukan rapat evaluasi di tiap awal bulan dan triwulan

#### **Kendala / Permasalahan :**

1. Pengumpulan dokumen pelaporan masih belum terfokus di satu tempat

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Menyiapkan tempat khusus pengumpulan dokumen pelaporan (google drive)

### D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana penarikan dana hal 3 DIPA
2. Menyelesaikan pembukuan UP sesuai jadwal yang ditetapkan
3. Menginput capaian kinerja anggaran EKA dan IKPA di aplikasi spasikita dan OMSPAN di setiap awal bulan berikutnya.

#### **Kendala / Permasalahan :**

1. Terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Melakukan revisi hal 3 dipa sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan rencana minimal 15% di TW1

## 3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Perlu adanya evaluasi dampak, terutama PKK dan PKW sehingga diketahui kebermanfaatannya bagi masyarakat
2. Transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas perlu koordinasi yang mantap dengan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi dan LKP yang akan diajukan perlu diseleksi dan dibina

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 12 Mei 2023

**Direktur Kursus dan Pelatihan**



**Wartanto**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN II  
DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	orang	19700	<b>TW2 : 6895</b>	<b>TW2 : 12803</b>
1	[SK 2.0] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	lembaga	1000	<b>TW2 : 367</b>	<b>TW2 : 475</b>
1	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	Predikat	A	<b>TW2 : -</b>	<b>TW2 : -</b>
1	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	Nilai	94	<b>TW2 : -</b>	<b>TW2 : -</b>

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.157.551.553.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Juli 2023 sebesar **Rp. 120.917.856.521** atau **76.75%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Juli 2023 **Rp. 36.633.696.479**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja**

- IKK 1.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha

**Progress / Kegiatan :**

1. Program PKK: Dilakukan penetapan dan pencairan dana SK tahap 2 (silver) kepada 603 peserta didik, tahap 3 (silver) kepada 372 peserta didik, tahap 4 (silver) kepada 3.397 peserta didik dan tahap 5 (silver) kepada 635 peserta didik, dan tahap 6 (silver) kepada 3.609 peserta didik. Sehingga bantuan PKK di TW II ini diberikan kepada total 8.616 peserta didik.

2. Program PKW: Dilakukan penetapan dan pencairan dana SK tahap 4 (silver) sebanyak 1.365 peserta didik, tahap 5 (silver) sebanyak 100 peserta didik, tahap 6 (silver) sebanyak 1.385 peserta didik, tahap 7 (silver) kepada 1.337 peserta didik. Sehingga bantuan PKW di TW II ini diberikan kepada total 4.187 peserta didik.

Perealisasi di triwulan II melebihi target dikarenakan terdapat efisiensi anggaran karena satuan biaya per jenis keterampilan berbeda

**Kendala / Permasalahan :**

PKK

1. Adanya ketidakseimbangan presentase antara pelaksanaan proses pembelajaran dengan pertanggungjawaban keuangan

2. Ada beberapa lembaga yang pelaksanaan pembelajarannya kurang sesuai dengan jadwal yang direncanakan

3. Terdapat lembaga yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran namun pertanggungjawaban keuangannya belum semuanya diupload

PKW

1. Kurang optimalnya pelaksanaan pendampingan rintisan usaha

2. Ada beberapa lembaga yang pelaksanaan pembelajarannya kurang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

3. Terdapat lembaga yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran namun pertanggungjawaban keuangannya belum semuanya diupload

**Strategi / Tindak Lanjut :**

PKK

1. Melakukan pendampingan melalui zoom meeting untuk penyusunan pertanggungjawaban keuangan

2. Menegur lembaga penyelenggara yang belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang direncanakan

3. Melaksanakan monitoring dan pendampingan pelaksanaan program baik melalui aplikasi e-banper maupun datang secara langsung ke lembaga

PKW

1. Pembelajaran dilaksanakan di lembaga kursus dan di UMKM
2. Melibatkan perguruan tinggi yang berpengalaman dalam melakukan pendampingan rintisan usaha baik melalui daring maupun datang langsung ke rintisan usaha (jika anggaran tersedia)
3. Mengikutsertakan Dinas Koperasi dan UKM dalam mendukung UMKM melakukan pendampingan rintisan usaha
4. Melakukan pendampingan melalui zoom meeting untuk penyusunan pertanggungjawaban keuangan
5. Menegur lembaga penyelenggara yang belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang direncanakan
6. Melaksanakan monitoring dan pendampingan pelaksanaan program baik melalui aplikasi e-banper maupun datang secara langsung ke lembaga

## **B . SK 2.0 Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja**

- IKK 2.1 Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

### **Progress / Kegiatan :**

1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Tahap penyusunan SKL baru dan review SKL lama, Bimtek Penguatan Penguasaan Kurikulum pada Lembaga Kursus, dan Penyusunan Pedoman Kurikulum.
2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): Tahap Finalisasi Pedoman Pembelajaran melalui Pendekatan Project Based Learning (PBL) dan sedang dilakukan pemetaan lembaga penyelenggara PKW tahun 2023 melalui formulir online
3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Dilakukan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kursus Daring kepada 20 peserta (luring) dan 346 (daring) sehingga totalnya 366 peserta.
4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Dilakukan Pengimbasan Unit Usaha/Teaching Factory (TEFA) dengan total sebanyak 152 lembaga.
5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Sudah dilakukan penetapan sasaran lembaga Penilaian Kinerja LKP Tahun 2023, sosialisasi Penilaian Kinerja LKP Tahun 2023 dan pemberian orientasi teknis verifikator Penilaian Kinerja LKP Tahun 2023.
6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Sudah dilakukan sosialisasi, seleksi hingga pelaksanaan program magang instruktur kursus kepada 15 peserta dari bidang tata busana dan 15 peserta dari bidang tata kecantikan rambut sehingga total penerima magang instruktur kursus sebanyak 30 orang.
7. Jumlah penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Pemberian Bimbingan Teknis Pelatihan Penguji UJK sebanyak 55 peserta.
8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Pemberian Bimbingan Teknis Penguatan Pengelola Uji Kompetensi hingga tahap II total 40 peserta.
9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Sudah dilakukan sosialisasi kerjasama LKP dengan PT dan pemberian orientasi teknis dalam rangka Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan sudah sebanyak 213 LKP yang bekerjasama dengan PT
10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Sudah sampai tahap finalisasi pedoman dan dilakukan koordinasi penyelenggaraan unit pengembangan karir LKP.
11. LKP yang siap bertransformasi menjadi AKOM: Dilakukan verifikasi teknis transformasi LKP menjadi AK/PTV dan pendampingan transformasi LKP menjadi akademi komunitas kepada 17 lembaga kursus dan pelatihan secara luring dan 5 lembaga secara daring.

### **Kendala / Permasalahan :**

1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: a) Belum semua SKL, KBK, dan Bahan Ajar direview sesuai dengan kebutuhan industri sedangkan alokasi anggaran sangat terbatas untuk melakukan revisi terhadap perubahan tersebut, b) Kesulitan untuk mendapatkan penyusun yang memahami dunia kerja
2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): Kurangnya pemahaman lembaga mengenai program PjBL.
3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Kesiapan SDM dan terbatasnya bahan ajar dalam menunjang kursus daring.
4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: a) Kurangnya pemahaman tentang konsep TEFA, b) Kurangnya pemahaman dalam mengelola TEFA.
5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Sasaran penilaian kinerja LKP tersebar di 23 provinsi, sementara UPT hanya ada di 5 provinsi sehingga SDM verifikator yang akan menilai kinerja lembaga masih kurang memadai.
6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: a) Peserta yang mendaftar tahap seleksi awal program magang masih rendah untuk bidang Tata Busana dan Tata Kecantikan Rambut karena dibatasi untuk usia calon peserta maksimal 40 tahun, b) Kendala dalam pemilihan industri tempat magang yang tepat sesuai dengan keterampilan dan level kompetensi yang diharapkan
7. Jumlah penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Proses seleksi calon peserta penguji uji kompetensi yang diusulkan oleh organisasi profesi tidak sesuai tepat waktu karena pengajuan calon dari organisasi profesi tidak bersamaan.
8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: a) Pemahaman tentang penanganan TTE untuk sertifikat kompetensi masih kurang, b) Banyaknya pergantian admin dari lama ke yang baru sehingga pemahaman terkait aplikasi terganggu.
9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: a) Lambatnya LKP menyerahkan informasi terkait minat alumni terhadap RPL, b) Belum semua perguruan tinggi/politeknik yang menerima lulusan kursus dalam program RPL.
10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Dikarenakan masih banyak LKP yang menggabungkan fungsinya dengan unit lain sehingga hanya LKP besar saja yang bisa mendirikan unit PPK tersendiri karena terkait sumber daya.
11. LKP yang siap bertransformasi menjadi AKOM: Teridentifikasi beberapa lembaga kesulitan memenuhi ketentuan akan luas lahan, jumlah dosen minimal, serta dalam penyusunan kurikulum

### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: a) Mendorong organisasi mitra untuk menginisiasi review SKL dan kurikulum di bidangnya masing-masing, b) melibatkan praktisi, akademisi, dan Kadin sebagai penyusun/reviewer
2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): a) Melakukan penyusunan pedoman PjBL, b) Penguatan program melalui sosialisasi kepada lembaga untuk memberikan pemahaman mengenai PjBL, c) mengambil percontohan/piloting ke LKP yang secara pelaksanaan dan penerapannya hampir mendekati dari sintaks pembelajaran berbasis proyek.

3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Peningkatan kompetensi SDM dan penyusunan bahan ajar kursus daring.
4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: a) Penyusunan pedoman TEFA, b) Mensosialisasikan pedoman TEFA bagi LKP, c) Melakukan pendataan terhadap LKP yang memiliki rintisan TEFA, d) melakukan penguatan manajemen TEFA.
5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Metode verifikasi dilakukan dengan cara luring dan daring serta sebaran sasaran untuk setiap UPT disesuaikan dengan jumlah verifikator.
6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: a) Membuka secara umum program magang instruktur ke seluruh wilayah indonesia, b) Melakukan koordinasi dengan LSK, organisasi profesi, organisasi mitra, dan Kadin untuk mencari alternatif industri yang memenuhi kualifikasi yang diminta untuk menjadi tempat magang instruktur.
7. Jumlah penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Memberi batas waktu kepada organisasi profesi untuk mengajukan calon penguji untuk diikutsertakan sebagai peserta.
8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Dilakukannya bimtek ke pengelola dan admin.
9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: a) Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/politeknik dan LPDP untuk pendanaan, b) Menambah kerjasama dengan perguruan tinggi.
10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Menyebarkan informasi ke group whatsapp FORUM, HIPKI dan penerima bantuan PKK untuk menjaring lebih banyak lembaga dan mengevaluasi data LKP yang masuk pada formulir yang sebelumnya sudah diisi.
11. LKP yang siap bertransformasi menjad AKOM: Menyiapkan juknis yang berisikan persyaratan LKP bertransformasi menjadi AKOM yang telah disesuaikan dengan kondisi lembaga kursus dan pelatihan saat ini sebagai landasan LKP untuk mempersiapkan diri

### C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Mempersiapkan kelengkapan dokumen penilaian SAKIP
2. Melakukan rapat evaluasi capaian pertriwulan

#### **Kendala / Permasalahan :**

1. Ketersediaan dokumen penilaian SAKIP masih ada di masing-masing pokja
2. Ketersediaan waktu bagi para pimpinan untuk ikut serta dalam rapat evaluasi capaian pertriwulan

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Berkoordinasi untuk mengumpulkan dokumen penilaian SAKIP
2. Memanfaatkan teknologi informasi (zoom meeting) untuk melaksanakan rapat evaluasi capaian pertriwulan

### D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan

#### **Progress / Kegiatan :**

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana halaman III DIPA triwulan II
2. Menyelesaikan pembukuan UP dan TUP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
3. Menginput capaian output di aplikasi SAKTI setiap awal bulan

#### **Kendala / Permasalahan :**

Terjadi kesalahan persepsi dalam penilaian revolving UP pada indikator penilaian IKPA sehingga nilai indikator tersebut tidak maksimal

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Revolving UP dilakukan setiap minggu

## 3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Percepat serapan PKK dan PKW anggaran reguler di awal triwulan III untuk mengantisipasi anggaran BA-BUN yang direncanakan turun di akhir juli. Minimal minggu kedua eksekusi PKK dan PKW dari anggaran reguler selesai
2. Lakukan monitoring segera baik daring maupun luring terkait dengan ketidakseimbangan antara proses pembelajaran dengan pertanggungjawaban keuangan
3. Aktifkan kembali bantuan platinum untuk lembaga yang besar-besar yang sudah dinilai kinerja A dan B baik untuk program PKK atau PKW
4. Segera diselesaikan juknis transformasi LKP menjadi AKOM
5. Lakukan dan susun RPD triwulan III dengan memperhatikan anggaran BA-BUN yang akan segera cair. Siapkan calon lembaga yang akan ditetapkan PKK dan PKW serta UJK sehingga saat cair tinggal eksekusi

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 17 Juli 2023

**Direktur Kursus dan Pelatihan**





**Wartanto**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN III  
DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	orang	19700	<b>TW3 : 13790</b>	<b>TW3 : 53956</b>
2	[SK 2.0] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	lembaga	1000	<b>TW3 : 842</b>	<b>TW3 : 1161</b>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	Predikat	A	<b>TW3 : -</b>	<b>TW3 : -</b>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	Nilai	94	<b>TW3 : -</b>	<b>TW3 : -</b>

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.346.293.663.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 25 Oktober 2023 sebesar **Rp. 320.059.356.446** atau **92.42%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 25 Oktober 2023 **Rp. 26.234.306.554**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja**

- IKK 1.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha

**Progress / Kegiatan :**

Dalam mencapai target pada IKK ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan melaksanakan dua program yaitu PKK dan PKW dengan capaian sebagai berikut:

1. Program PKK: Dilakukan penetapan dan pencairan dana (SK dan SP2D) untuk tahap 7 (silver) kepada 4.930 peserta didik, tahap 8 (silver) kepada 2.769 peserta didik, tahap 9 (silver) 2.933 peserta didik, tahap 10 (silver) kepada 948 peserta didik, tahap 11 (silver) kepada 5.551 peserta didik, tahap 12 (silver) kepada 791 peserta didik, tahap 13 (silver) kepada 2.810 peserta didik, tahap 1 (platinum) kepada 291 peserta didik, tahap 2 (platinum) kepada 551 peserta didik, tahap 3 (platinum) kepada 316 peserta didik, tahap 4 (platinum) kepada 98 peserta didik. Sehingga bantuan PKK di TW III ini diberikan kepada total 21.988 peserta didik. Beberapa lembaga yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran sedang dalam tahap penempatan kerja dan penyusunan laporan pertanggungjawaban

2. Program PKW: Dilakukan penetapan dan pencairan dana (SK dan SP2D) untuk tahap 8 (silver) kepada 4.534 peserta didik, tahap 9 (silver) kepada 3.620 peserta didik, tahap 10 (silver) 3.656 peserta didik, tahap 11 (silver) kepada 785 peserta didik, tahap 12 (silver) kepada 178 peserta didik, tahap 13 (platinum) kepada 1.348 peserta didik, tahap 14 (silver) kepada 750 peserta didik. Sehingga bantuan PKW di TW III ini diberikan kepada total 14.871 peserta didik. Beberapa lembaga yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran sedang dalam tahap pendampingan rintisan usaha dan penyusunan laporan pertanggungjawaban

Perealisasi di triwulan III melebihi target dikarenakan terdapat penambahan sasaran sebesar 35.720 dari sasaran sebelumnya sebesar 19.700 yang bersumber dari BA-BUN

**Kendala / Permasalahan :**

Program PKK:

1. Ada beberapa lembaga yang sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tetapi belum mengunci pada aplikasi sehingga pada sistem dianggap belum mengirim laporan
2. Terjadi pergantian peserta didik pada saat pelaksanaan pembelajaran
3. Adanya perubahan penempatan kerja peserta didik sehubungan dengan kebutuhan tenaga kerja pada DUDIKA.

Program PKW:

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

1. Ada beberapa lembaga yang sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tetapi belum mengunci pada aplikasi sehingga pada sistem dianggap belum mengirim laporan
2. Terjadi pergantian peserta didik pada saat pelaksanaan pembelajaran
3. Pendampingan rintisan usaha belum dilakukan secara optimal karena tidak ada anggaran untuk melakukan pendampingan tersebut.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Program PKK:

1. Melakukan koordinasi dalam bentuk bimbingan teknis dan pendampingan kepada lembaga untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya di aplikasi
2. Membuat berita acara pergantian peserta didik dengan syarat pembelajaran belum mencapai 50%
3. Melakukan update rencana penempatan kerja sehingga peserta didik dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan DUDIKA

Program PKW:

1. Melakukan koordinasi dalam bentuk bimbingan teknis dan pendampingan kepada lembaga untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya di aplikasi
2. Membuat berita acara pergantian peserta didik dengan syarat pembelajaran belum mencapai 50%
3. Pendampingan rintisan usaha dilakukan secara mandiri oleh lembaga
4. Pendampingan rintisan usaha bisa dilakukan secara daring.

**B . SK 2.0 Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja**

- IKK 2.1 Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

**Progress / Kegiatan :**

Dalam mencapai target pada IKK ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melaksanakan program-program dengan progress dan capaian sebagai berikut:

1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Telah dilakukan review 5 SKL jenis keterampilan baru, penyusunan 5 dokumen kurikulum jenis keterampilan baru dan 5 dokumen kurikulum jenis keterampilan lama, validasi SKL jenis keterampilan baru dan lama, review kurikulum jenis keterampilan lama, bimbingan teknis penguatan penguasaan kurikulum dalam penerapan pembelajaran kursus kepada 100 lembaga
2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): Program telah selesai dilaksanakan dan sudah ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 30 LKP Pelaksana Program PjBL Tahun 2023 yang telah mengikuti kegiatan orkestrasi, koordinasi, dan pendampingan penyelenggaraan program PjBL. Selain itu, telah dilakukan pengimbasan program PjBL kepada 100 LKP
3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Dilakukan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kursus Daring kepada 18 peserta luring dan dilakukan koordinasi persiapan pengimbasan kursus daring
4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Dilakukan pengimbasan TEFA kepada total 23 LKP, dan pembinaan TEFA kepada total 160 LKP
5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Dilakukan Validasi Penilaian Kinerja LKP dan Penetapan Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2023 sebanyak 120 LKP
6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Program telah selesai dilaksanakan di TW II dan telah dilakukan evaluasi program magang instruktur
7. Jumlah penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Program telah selesai dilaksanakan di TW II
8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Program telah selesai dilaksanakan di TW II
9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Dilakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Program telah selesai dilaksanakan dan sudah ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 30 LKP Pelaksana Program Percontohan PPK Tahun 2023 yang telah mengikuti kegiatan orkestrasi, koordinasi, pendampingan penyelenggaraan PPK, dan evaluasi program PPK. Selain itu, telah dilakukan pengimbasan program PPK kepada 100 LKP
11. LKP yang siap bertransformasi menjadi AKOM: Dilakukan bimbingan teknis transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas sebanyak dua tahap kepada total 22 LKP yang dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi akademi komunitas/AKOM, Saat ini terdapat 5 LKP telah mendapatkan rekomendasi dari LLDikti dan juga telah mengupload ke Silemkerma

**Kendala / Permasalahan :**

Kendala dalam pencapaian target pada IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: a) Adanya perubahan jadwal reviewer dari industri dengan rencana yang sudah ditetapkan, b) adanya regulasi terbaru yang menjadi acuan penyusunan kurikulum, c) kesulitan mencari validator dari industri pada beberapa bidang tertentu
2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): Kurangnya LKP yang sudah menerapkan PjBL untuk dijadikan pengimbas bagi LKP di sekitarnya
3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Kurang minatnya peserta didik mengikuti kursus daring yang diselenggarakan oleh LKP
4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Ada beberapa lembaga yang melaksanakan TEFA belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan TEFA bagi LKP
5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: a) Keterbatasan jumlah verifikator di setiap wilayah Indonesia, b) Hasil validasi penilaian kinerja LKP perlu analisis untuk melihat kendala yang dialami LKP dalam pengelolaan lembaga, c) Pengembangan aplikasi belum optimal
6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Sudah diuraikan di TW 2
7. Jumlah penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Sudah diuraikan di TW 2
8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Sudah diuraikan di TW 2
9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Kurangnya koordinasi lanjutan antara LKP dengan PT penyelenggara RPL terkait dengan kurikulum dan prodi
10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: belum optimalnya mekanisme pemilihan sasaran LKP pengimbasan
11. LKP yang siap bertransformasi menjadi AKOM: Penginputan dokumen persyaratan di website Silemkerma sementara belum mengakomodir pendirian D1 sementara beberapa lembaga yang menjadi sasaran program merencanakan pendirian D1

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mengatasi kendala pada pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: a) Membuat kesepakatan jadwal yang disetujui bersama, b) Dilakukan penyesuaian dengan menggunakan regulasi terbaru dalam penyusunan kurikulum, c) Melakukan koordinasi dengan organisasi mitra dalam memberikan referensi validator
2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): a) Melakukan pemetaan lembaga pelaksana PjBL melalui survey yang lebih intensif, b) Sosialisasi program PjBL kepada seluruh lembaga kursus
3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Melakukan perancangan bahan ajar daring yang menarik dan terkini serta meningkatkan strategi branding agar dapat menarik dan berkesan bagi calon peserta didik
4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Melakukan pendampingan kepada lembaga dalam penyelenggaraan TEFA
5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: a) Perlu penyesuaian mekanisme perekrutan verifikator agar bisa mengakomodir lebih banyak lembaga yang dinilai kinerjanya, b) Dilaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Penilaian Kinerja LKP, c) Optimalisasi pengembangan sistem aplikasi
6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Sudah diuraikan di TW 2
7. Jumlah penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Sudah diuraikan di TW 2
8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Sudah diuraikan di TW 2
9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Memfasilitasi koordinasi antara LKP dengan PT penyelenggara RPL
10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Pemilihan LKP akan dikurasi lebih ketat lagi agar tepat sasaran
11. LKP yang siap bertransformasi menjadi AKOM: Menyiapkan jadwal pertemuan dengan pihak Direktorat KLSD PTV dan LLDIKTI untuk berkoordinasi terkait permasalahan upload dokumen persyaratan di Silemkerma

### C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan

#### **Progress / Kegiatan :**

Dalam berupaya mencapai target predikat A pada penilaian SAKIP, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan kegiatan di TW III, meliputi:

1. Melakukan rapat pengukuran kinerja TW III bersama para koordinator dan tim evaluasi program dari masing-masing pokja
2. Melakukan analisis hambatan dan strategi/tindak lanjut program pada masing-masing kelompok kerja di triwulan III
3. Koordinasi pengumpulan data/informasi capaian melalui form online instrumen pengukuran kinerja internal
4. Melakukan koordinasi pengumpulan dokumen/data dukung dalam rangka penilaian SAKIP
5. Rapat reviu rencana strategis tahun 2022
6. Mengikuti pelatihan SAKIP tingkat dasar dari Pusdiklat untuk salah satu anggota tim evaluasi AKIP di Direktorat Kursus dan Pelatihan.

#### **Kendala / Permasalahan :**

Kendala/permasalahan dalam proses penilaian SAKIP di TW III adalah sebagai berikut:

1. Saat reviu renstra terdapat catatan yaitu pada bagian Definisi Operasional di lampiran Renstra yang belum memuat informasi terkait program baru yaitu LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas/Perguruan Tinggi Vokasi. Selain itu, terdapat program yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Program Microcredential karena adanya keterkaitan dengan program di satker lain yang belum berjalan tetapi masih menjadi perhitungan dalam definisi operasional di lampiran Renstra
2. Pengumpulan salah satu data dukung untuk penilaian SAKIP yaitu SKP sampling seluruh jabatan membutuhkan waktu cukup lama karena adanya penyesuaian aplikasi SKP terbaru
3. Terdapat pimpinan dari Pokja yang berhalangan hadir pada saat rapat pengukuran kinerja karena berbenturan dengan agenda lain.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam berupaya mengatasi kendala yang ada pada pencapaian IKK ini di TW III adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revisi Dokumen Definisi Operasional Indikator Kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan
2. Melakukan koordinasi dengan bagian kepegawaian dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penyusunan SKP pada aplikasi terbaru untuk mempercepat pengumpulan data dukung SKP pegawai
3. Rapat pengukuran kinerja dilakukan secara blended (daring dan luring).

### D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan

#### **Progress / Kegiatan :**

Dalam berupaya mencapai target nilai 94 pada IKK ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan kegiatan di TW III, meliputi:

1. Menginput capaian output di aplikasi SAKTI setiap awal bulan
2. Melakukan penyesuaian halaman III DIPA
3. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran
4. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan bersama seluruh pimpinan masing-masing kelompok kerja
5. Optimalisasi pengelolaan UP dan TUP

#### **Kendala / Permasalahan :**

Kendala/permasalahan pada pencapaian target pada IKK ini di TW III adalah sebagai berikut:

1. Defiasi anggaran diatas 5% karena adanya penambahan anggaran BA-BUN di tanggal 24 juli 2023, sementara RPD ditutup tanggal 14 juli sehingga anggaran BA-BUN belum bisa masuk di RPD TW 3 dan 4
2. Adanya duplikasi sasaran RO pada aplikasi SMART akibat penambahan anggaran BA-BUN
3. Terjadinya perubahan mekanisme capaian output yang tadinya linier dengan penyerapan anggaran menjadi kesesuaian dengan target yang ditetapkan

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam berupaya mengatasi kendala yang ada pada pencapaian IKK ini di TW III

adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat dispensasi ke DJPB tentang permohonan dispensasi penyesuaian RPD dan hasilnya dilakukan penyesuaian perhitungan IKPA secara manual melalui penetapan yang akan diterbitkan oleh DJA pada periode akhir penilaian IKPA 2023
2. Sudah dilakukan koordinasi dengan DJA terkait penyesuaian RO pada aplikasi SMART dengan DIPA revisi terakhir dan DJA berjanji akan melakukan penyesuaian di SAKTI
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh pokja untuk monitoring capaian agar sesuai dengan target yang ditetapkan

### 3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Eksekusi Program PKK dan PKW paling lambat dieksekusi minggu kedua bulan oktober di triwulan 4 tetap dengan memperhatikan lamanya proses pembelajaran, daerah PDT, percepatan papua dan papua barat serta daerah kemiskinan ekstrem
2. Proses evaluasi dan monitoring tetap dilakukan saat pembelajaran berjalan untuk melihat apakah ada kendala, jika ada masih tersedia waktu untuk merubahnya sebelum program PKK dan PKW berakhir
3. Segera lakukan prognosis untuk eksekusi di triwulan 4 untuk melihat sejauh mana anggaran terserap
4. Koordinasikan dengan KPPN dan Kanwil untuk melaksanakan langkah efektif di akhir tahun baik dalam hal eksekusi program maupun anggaran, pantau nilai IKPA dan NKA dan optimalkan nilai yang masih bisa dioptimalkan

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 25 Oktober 2023

**Direktur Kursus dan Pelatihan**



**Wartanto**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN IV  
DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	orang	19700	<b>TW4 : 19700</b>	<b>TW4 : 69472</b>
2	[SK 2.0] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	lembaga	1000	<b>TW4 : 1000</b>	<b>TW4 : 1261</b>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	Predikat	A	<b>TW4 : A</b>	<b>TW4 : AA</b>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	Nilai	94	<b>TW4 : 94</b>	<b>TW4 : 99.12</b>

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.346.293.663.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 346.011.302.399** atau **99,92%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 282.360.601**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja**

- IKK 1.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha

**Progress / Kegiatan :**

Dalam mencapai target pada IKK ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan melaksanakan program-program dengan capaian sebagai berikut:

1. Program PKK: Dilakukan penetapan dan pencairan dana (SK dan SP2D) untuk tahap 14 (sillver) kepada 3.915 peserta didik, tahap 15 (sillver) kepada 1.622 peserta didik, tahap 5 (platinum) kepada 67 peserta didik. Sehingga bantuan PKK di TW IV ini diberikan kepada total 5.604 peserta didik. Beberapa lembaga yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran sedang dalam tahap penempatan kerja dan penyusunan laporan pertanggungjawaban

2. Program PKW: Dilakukan penetapan dan pencairan dana (SK dan SP2D) untuk tahap 15 (sillver) kepada 1.505 peserta didik, tahap 16 (sillver) kepada 2.655 peserta didik, tahap 17 (sillver) 1.257 peserta didik Sehingga bantuan PKW di TW IV ini diberikan kepada total 5.417 peserta didik. Beberapa lembaga yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran sedang dalam tahap pendampingan rintisan usaha dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Direktorat Kursus dan Pelatihan juga berhasil menjalin kerjasama dengan lembaga kursus dan pelatihan pelaksana program PKK untuk memberikan bantuan dana uji kompetensi kepada 4.495 peserta didik anak usia sekolah tidak sekolah yang menyelesaikan pembelajaran di lembaga tersebut.

**Kendala / Permasalahan :**

1. Terdapat lembaga penyelenggara PKK dan PKW yang menyampaikan laporan akhir tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
2. Ditemukan ketidaksesuaian antara persentase progres pembelajaran dengan laporan keuangan di beberapa lembaga penyelenggara program PKK dan PKW

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Memberikan dispensasi waktu serta melakukan pendampingan secara intensif dalam pengumpulan laporan akhir
2. Memberikan bimbingan teknis melalui via daring (zoom meeting) terhadap lembaga penyelenggara PKK atau PKW yang persentase laporan keuangannya masih kecil padahal program sudah selesai untuk mencari penyebab dan solusi dari permasalahan tersebut

**B . SK 2.0 Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja**

- IKK 2.1 Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

### **Progress / Kegiatan :**

Dalam mencapai target pada IKK ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melaksanakan program-program dengan progress dan capaian sebagai berikut:

1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Dilakukan Uji Publik SKL Tahap 1, 2, dan 3, Penyusunan Bahan ajar e-modul tahap 2 dan 3, Final E-Modul Tahap 2 dan Tahap 3, Finalisasi SKL Kursus dan Pelatihan sebanyak 10 naskah, Finalisasi kurikulum, dan Konsolidasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Harmonisasi Lisensi Lembaga Sertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): Dilakukan Pendampingan Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL), Evaluasi Hasil Pelaksanaan pembelajaran melalui Pendekatan Project Based Learning (PjBL), dan Bimbingan Teknis Penyusunan RPP Program PjBL
3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: a) Dilakukan Pengimbasan Praktik Baik Penyelenggaraan Kursus Daring, b) Reviu Pedoman Penyelenggaraan Kursus Daring
4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai unit usaha/TEFA: Dilakukan pengimbasan unit usaha kepada 84 lembaga
5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Dilakukan Review Pedoman Penilaian Kinerja LKP Tahun 2023, Analisis dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Penilaian Kinerja LKP Tahun 2023, Tindak Lanjut Penetapan Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2023, dan Pelaksanaan Uji Publik Instrumen dan Aplikasi Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024
6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Program telah selesai dilaksanakan di TW 2
7. Jumlah penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Program telah selesai dilaksanakan di TW 2
8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Program telah selesai dilaksanakan di TW 2
9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Program telah selesai dilaksanakan di TW 3 dan pada periode TW 4 dilakukan Finalisasi Pedoman dan Instrumen Penilaian Kinerja Tahun 2024 serta Pendampingan Penyelenggaraan RPL bagi Lulusan LKP
10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Telah dilakukan pendampingan Pusat Pengembangan Karier (PPK)
11. LKP yang siap bertransformasi menjadi AKOM: Dilakukan kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan pendampingan transformasi LKP menjadi PTV, sinkronisasi transformasi LKP menjadi PTV, pelaksanaan pendampingan transformasi LKP menjadi PTV, dan Koordinasi Transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas/PTV tahap 2
12. Bantuan Uji Kompetensi: Telah disalurkan bantuan UJK ke 16 lembaga dengan total peserta ujian sebanyak 6.436 orang

### **Kendala / Permasalahan :**

Kendala dalam pencapaian target pada IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: a) Perubahan format SKL dan Kurikulum tidak dipahami oleh beberapa penyusun sehingga ada yang masih menggunakan format lama, b) Perbedaan pemahaman antara reviewer dan penyusun terkait dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri
2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): a) Masih kurangnya informasi dan pemahaman LKP terkait tentang metode yang ada di pedoman pembelajaran berbasis proyek pada saat sosialisasi sehingga dalam penerapannya pengelola masih belum sepenuhnya paham dalam langkah - langkah yang diperlukan dalam penerapan metode pembelajaran berbasis proyek di LKP, b) Beberapa LKP yang dijadikan percontohan masih belum sepenuhnya di dalam pembelajarannya menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek antara lain karena waktu penerapan peserta didik sudah memulai magang di industri dan kurangnya pemahaman LKP tersebut didalam menerapkan langkah yang sesuai di pedoman PjBL
3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: a) Beberapa lembaga kursus dan pelatihan masih memiliki pemikiran untuk mempertahankan pembelajaran konvensional karena kursus daring belum memberikan profit yang pasti, b) Lembaga belum memahami mekanisme pembuatan konten yang menarik, c) Rendahnya motivasi lembaga kursus dan pelatihan untuk menjadi penyelenggara kursus daring
4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai unit usaha/TEFA: Terdapat lembaga yang mempunyai unit usaha belum sesuai dengan pedoman
5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: LKP sasaran penilaian kinerja tahun 2023 masih sedikit, sehingga kurang menggambarkan pemetaan kinerja LKP berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota, pemetaan kinerja hanya bisa dilakukan berdasarkan kategori capaian kinerja dari hasil penilaian kinerja yaitu kategori A, B, dan C
6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Sudah diuraikan di TW 2
7. Jumlah penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Sudah diuraikan di TW 2
8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Sudah diuraikan di TW 2
9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: a) Keterbatasan program studi yang selaras dengan bidang keterampilan yang dibelajarkan di LKP dalam satu wilayah, b) Pembiayaan perkuliahan sebagian tidak terjangkau, c) Sistem penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL yang berbeda tiap perguruan tinggi
10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Kurangnya pemahaman dari pengelola LKP terhadap keberadaan PPK terutama berkaitan dengan manajemen anggaran dan ketersediaan SDM dari LKP. Sehingga program PPK hanya ditumpangi atau dicampur dengan fungsi lainnya seperti Tata Usaha dan Administrasi. Anggaran untuk ketersediaan PPK juga masih belum terpisah dan masih bergabung dengan anggaran umum pengelolaan LKP
11. LKP yang siap bertransformasi menjadi AKOM: a) Belum tersosialisasikannya dengan baik mengenai program Transformasi LKP Menjadi Akademi Komunitas/PTV kepada LL Dikti, LKP dan asesor Kelembagaan, b) ketentuan persyaratan terkait luasan lahan minimal yang harus tersedia dirasa memberatkan LKP

### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mengatasi kendala pada pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut: 1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Melakukan pendampingan rutin secara daring untuk menyesuaikan dengan pedoman yang baru, serta menunjukkan poin yang perlu diubah sesuai ketentuan terbaru, Penyusunan SKL berikutnya melibatkan instansi bidang keterampilan terkait , akademisi vokasi dan industri sebagai pengguna lulusan, bidang keterampilan di Kursus dan Pelatihan sangat beragam, sertifikat kompetensi tidak hanya untuk mencari pekerjaan tetapi juga untuk pengembangan diri, sehingga BNSP masih mempelajari terkait pemberian lisensi kepada LSK

2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): a) Penerapan pendampingan yang lebih mengutamakan tentang Rencana proses pembelajaran dengan melalui metode pembelajaran berbasis proyek secara lebih sederhana dan mudah dipahami oleh LKP dalam melakukan pelaksanaan metode ke peserta didiknya  
b) Melakukan penyederhanaan metode pada pedoman PjBL di tahun 2023 ini dengan menetapkan klasifikasi penerapan metode pembelajaran berbasis proyek di masing-masing LKP, melakukan sosialisasi secara lebih mendetail yang memudahkan LKP dalam

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- menerapkan metode pembelajaran, dan melakukan pendampingan terjadwal dengan melihat waktu dari LKP melaksanakan pembelajaran agar dapat lebih mudah dalam melakukan pendampingan penerapan metode pembelajaran berbasis proyek ke LKP
3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: a) Memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kursus daring, untuk meningkatkan pemahaman lembaga dan potensi perkembangannya di era digital. b) Memberikan bimbingan teknis yang secara khusus mengulas konten bahan ajar yang interaktif. c) Memberikan prioritas untuk mengakses program-program Direktorat Kursus dan Pelatihan kepada lembaga yang menyelenggarakan kursus daring
  4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Dilakukan pendampingan dan pembinaan kepada lembaga untuk mendirikan unit usaha yang sesuai dengan pedoman
  5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Menambah sasaran Penilaian Kinerja LKP tahun 2024, terutama di wilayah Kabupaten/Kota yang belum menjadi sasaran sebelumnya, terhadap LKP yang berkinerja A atau B didorong untuk menjadi sasaran program yang selama ini dilaksanakan Ditsuslat. LKP berkinerja C perlu mendapatkan pembinaan dalam hal manajemen penyelenggaraan LKP secara operasional, agar dapat dikelola dengan baik, memiliki SDM yang kompeten, dan dapat lebih mandiri tanpa mengandalkan bantuan pemerintah
  6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Sudah diuraikan di TW 2
  7. Jumlah penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Sudah diuraikan di TW 2
  8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Sudah diuraikan di TW 2
  9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: a) Untuk memperluas dan memperbanyak mitra perguruan tinggi penyelenggara program RPL maka perlu dilakukan sinkronisasi bersama dengan politeknik dan LLDIKTI, b) Menjajaki ketersediaan beasiswa dari LPDP, c) Memetakan perguruan tinggi penyelenggara RPL yang sesuai untuk masing-masing bidang keterampilan kursus dan pelatihan
  10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Perlu dilakukan pendampingan lanjutan yang lebih komprehensif sebagai tindak lanjut atas pendampingan yang sebelumnya telah dilakukan. Khususnya pemanfaatan sumber daya yang ada di LKP sehingga dapat secara efektif dan efisien membentuk unit PPK pada LKP
  11. LKP yang siap bertransformasi menjadi AKOM: a) Memperbanyak frekuensi untuk sosialisasi program Transformasi baik daring maupun luring kepada LKP sasaran, b) Sedang diusulkan untuk ada keringanan terkait pemenuhan luas lahan berkoodinasi dengan Dit. KLSd dan LL Dikti melalui Bagian Hukum Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi

### C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan

#### **Progress / Kegiatan :**

Dalam berupaya mencapai target pada penilaian SAKIP, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan kegiatan di TW IV, meliputi:

1. Melakukan rapat pengukuran kinerja TW IV bersama para koordinator dan tim evaluasi program dari masing-masing pokja
2. Melakukan analisis hambatan dan strategi/tindak lanjut program pada masing-masing kelompok kerja di triwulan IV
3. Koordinasi pengumpulan data/informasi capaian melalui form online instrumen pengukuran kinerja internal
4. Penyusunan program kerja Direktorat Kursus dan Pelatihan tahun 2024 dan penyusunan revisi RKA K/L
5. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023

#### **Kendala / Permasalahan :**

Kendala/permasalahan dalam pencapaian IKK ini di TW IV adalah sebagai berikut:

1. Terdapat informasi terkait dengan inovasi di tiap program yang belum diakomodir di dalam draft laporan kinerja
2. Sebagian ketua tim kerja berhalangan hadir pada saat pengukuran kinerja TW IV karena terdapat agenda lain
3. Pada penyusunan program kerja terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu adanya perbedaan teknis pengumpulan draft kertas kerja untuk menghimpun informasi program kerja karena kegiatan dilakukan di lokasi yang berbeda.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam berupaya mengatasi kendala yang ada pada pencapaian IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian dalam draft laporan kinerja dan mensosialisasikannya kepada seluruh tim untuk menyediakan informasi tersebut
2. Pengukuran kinerja dilakukan melalui pengisian instrumen dan dikonfirmasi secara daring
3. Penyusunan program kerja dilakukan secara blended (daring dan luring) yang dihadiri oleh seluruh pegawai agar saling menyamakan perspektif terkait informasi program kerja apa saja yang dibutuhkan untuk dilakukan penyusunan

### D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan

#### **Progress / Kegiatan :**

Dalam berupaya mencapai target nilai 94 pada IKK ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan kegiatan di TW IV, meliputi:

1. Menginput capaian output di aplikasi SAKTI setiap awal bulan
2. Melakukan penyesuaian halaman III DIPA
3. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran
4. Melaksanakan rapat evaluasi capaian output setiap bulan bersama seluruh pimpinan masing-masing kelompok kerja
5. Optimalisasi pengelolaan UP dan TUP

#### **Kendala / Permasalahan :**

Kendala/permasalahan pada pencapaian target pada IKK ini di TW IV ini adalah anggaran yang bersumber dari BA BUN tidak dapat direvisi

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam berupaya mengatasi kendala yang ada pada pencapaian IKK ini di TW IV ini adalah dengan melakukan optimalisasi pelaksanaan anggaran yang ada



### 3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Untuk program PKK dan PKW agar dilakukan serta update terkait outcome PKK yaitu lulusan yang bekerja dan PKW yaitu lulusan yang berwirausaha secara periodik karena penghitungan dilakukan sampai 1 tahun setelah lulus program
2. Koordinasi dengan DJA Kemenkeu untuk melakukan penyesuaian secara manual terkait hal III DIPA sesuai surat balasan dari DJA -Kemenkeu

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 17 Januari 2024

**Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan**



**Wartanto**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

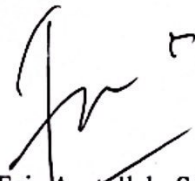
Kami telah mereviu laporan kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Kursus dan Pelatihan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Januari 2024

Ketua Tim Reviu,



Faiz Ayatullah, S.E., M.M.

NIP. 197901142005011003



**VOKASI**  
KUAT, MENGUATKAN  
INDONESIA



**Direktorat Kursus dan Pelatihan**  
**Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi**  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

# 2023

## KONTAK KAMI



KursusKita



Direktorat Kursus dan Pelatihan



@kursuskita



@kursuskita



[kursus.kemdikbud.go.id](https://kursus.kemdikbud.go.id)

